



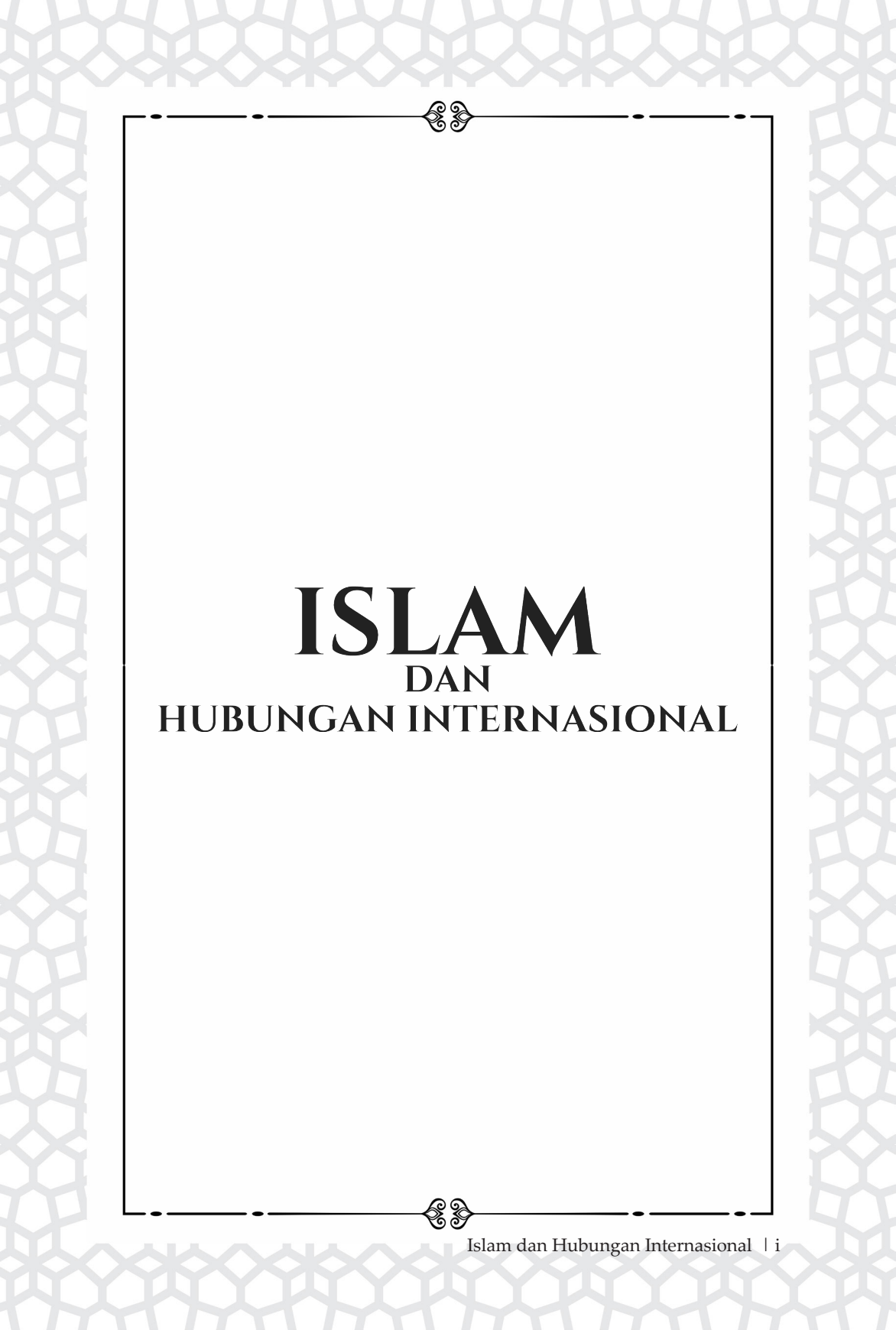
ISLAM

DAN

HUBUNGAN INTERNASIONAL



Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.



ISLAM

DAN

HUBUNGAN INTERNASIONAL



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL



ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Edisi Pertama
Copyright©2025
Cetakan Pertama: Maret, 2025

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: *xxii* + 205

wi.2025.0656

Penulis:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

Editor Isi : Wahyu Kurniawadi
Cover : Ardyan Arya
Tata letak : Joko Abi P

Penerbit
Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah
53172

Email : redaksi@wawasanilmu.co.id
Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN : 978-623-132-457-3

All Right Reserved

Hak Distribusi/Pemasaran pada Penerbit
Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

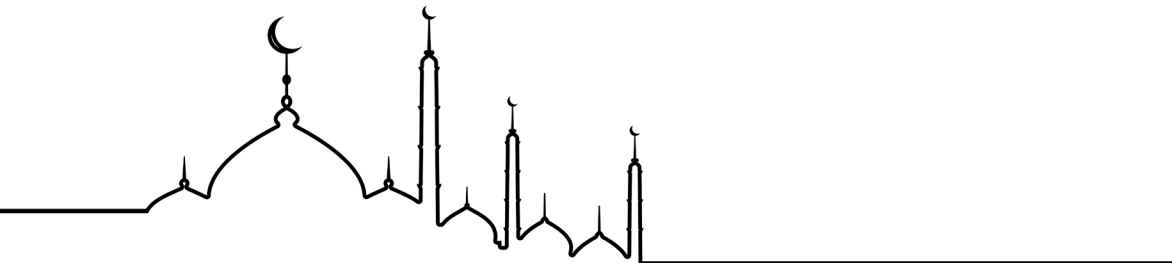
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Buku *Islam dan Hubungan Internasional* ini hadir sebagai upaya untuk memahami dinamika interaksi Islam dengan dunia internasional dari perspektif sejarah, diplomasi, politik, ekonomi, keamanan, hingga hak asasi manusia. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah memainkan peran signifikan dalam membentuk hubungan antarnegara, baik melalui ekspansi peradaban, perdagangan, diplomasi, maupun kontribusi intelektual.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berupaya mengelaborasi berbagai aspek hubungan Islam dan hubungan internasional secara sistematis. Bab pertama menguraikan sejarah hubungan Islam dengan negara-negara lain, menyoroti peran perdagangan, ekspansi, serta hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak masa awal Islam. Bab kedua membahas konsep diplomasi Islam dan peran negara-negara Muslim dalam diplomasi global. Bab ketiga menelaah keterlibatan Islam dalam organisasi internasional, termasuk peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam isu-isu global.



Lebih lanjut, buku ini juga mengupas hubungan bilateral negara-negara mayoritas Muslim dengan dunia, termasuk dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang berkembang. Bab mengenai Islam dan keamanan internasional menyoroti peran Islam dalam isu-isu global seperti terorisme, keamanan siber, serta kontribusi dalam misi perdamaian. Selain itu, isu lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, dan media internasional juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap hubungan Islam dan komunitas global.

Pada bab terakhir, penulis mengajak pembaca untuk melihat prospek masa depan hubungan Islam dan komunitas internasional dengan mempertimbangkan tantangan serta peluang yang ada. Harapannya, buku ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai posisi Islam dalam hubungan internasional serta mendorong terciptanya dialog, toleransi, dan kerja sama yang lebih baik di masa depan.

Terselesaikannya penulisan buku ini, tentu juga tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kolega penulis. Penulisan buku ini juga ditujukan terkhusus untuk putri semata wayang penulis, Aisyah Zahra Iqbal.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi bagi akademisi, praktisi, masyarakat umum, diplomat, dan pemerhati hubungan internasional yang tertarik memahami lebih dalam bagaimana Islam berinteraksi dengan dunia internasional dalam berbagai aspek politik, ekonomi, diplomasi, dan keamanan. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2025

Penulis

Dr. Rizki Damayanti, S.IP, M.A.

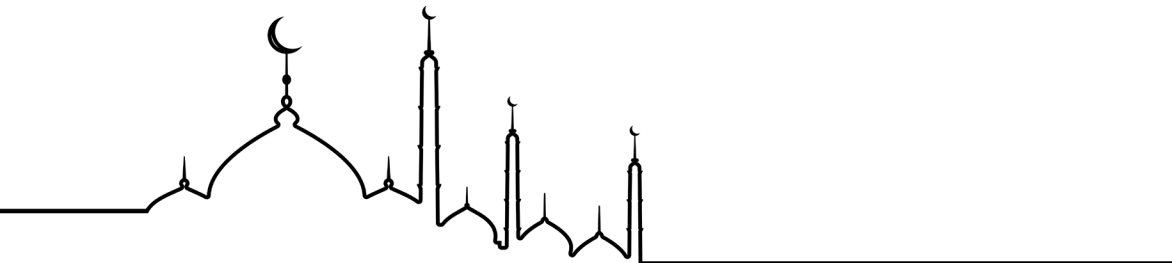
KATA PENGANTAR

Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem nilai yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk diplomasi, ekonomi, dan perdamaian dunia. Seiring dengan cepatnya perubahan global dari geopolitik, teknologi, hingga transformasi ekonomi—pemahaman mengenai interaksi Islam dalam konteks hubungan internasional menjadi semakin penting.

Banyak wajah Islam di panggung dunia yang menunjukkan kebaikan, kemajuan, dan ikut dalam transformasi global yang modern. Karena itu, hubungan dan diplomasi Islam di panggung dunia masih sangat signifikan.

Pada saat ini hubungan antara Islam dan politik global telah menjadi isu sentral dalam dinamika internasional modern. Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem nilai yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk diplomasi, ekonomi, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai interaksi Islam dalam konteks hubungan internasional menjadi semakin penting di tengah perubahan global yang cepat.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk memainkan peran strategis dalam membangun hubungan antara Islam dan dunia global.



Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem demokrasi yang berkembang, yang membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan tanpa kontradiksi.

Buku *Islam dan Hubungan Internasional* ini hadir sebagai kontribusi akademik yang tidak hanya menawarkan pemetaan teoritis yang solid, tetapi juga menganalisis realitas politik global yang melibatkan dunia Islam. Ditulis oleh seorang akademisi yang memiliki fokus kajian Islam dan hubungan internasional, buku ini menyajikan analisis berbasis penelitian yang kaya akan wawasan historis, geopolitik, serta refleksi terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara Muslim dalam percaturan global.

Universitas sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai Islam, keindonesiaan, dan modernitas sangat mengapresiasi kehadiran buku ini. Karya ini sejalan dengan visi universitas dalam membangun pemikiran Islam yang kontekstual, terbuka, dan berorientasi pada solusi bagi tantangan global. Lebih dari sekedar referensi akademik, buku ini dapat menjadi jembatan bagi para pemangku kepentingan baik akademisi, diplomat, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana Islam berkontribusi terhadap tata dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Saya meyakini bahwa buku ini akan menjadi bacaan penting bagi mereka yang ingin menggali lebih jauh tentang peran Islam dalam hubungan internasional, baik dari perspektif sejarah maupun kebijakan kontemporer. Semoga karya ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan menjadi rujukan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan yang tertarik pada interaksi antara Islam dan dunia global.

Selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini tidak hanya menjadi sumbangan bagi dunia akademik, tetapi juga menginspirasi lahirnya pemikiran dan kebijakan yang lebih inklusif dalam memahami peran Islam di kancah internasional.

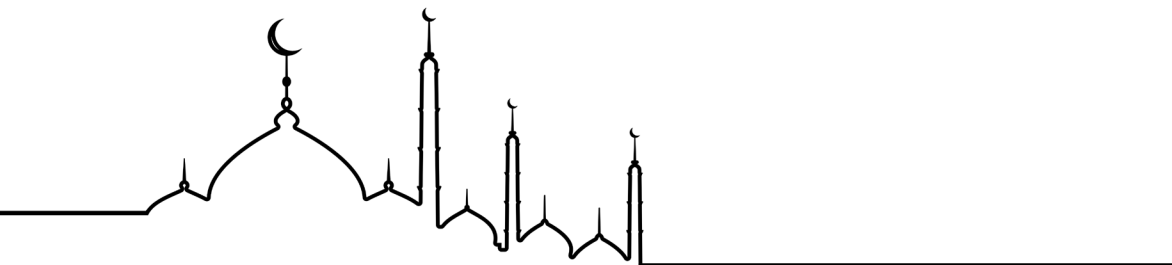
Prof. Didik. J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor Universitas Paramadina

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia untuk terus menimba ilmu dan memperkaya wawasan dalam memahami berbagai aspek Islam dalam kehidupan global. Kehadiran buku *Islam dan Hubungan Internasional* ini merupakan kontribusi penting dalam menjembatani pemahaman antara Islam dan dinamika politik dunia, terutama dalam konteks diplomasi, ekonomi, keamanan, lingkungan, serta isu-isu global yang melibatkan negara-negara Muslim dan organisasi internasional.

Buku ini hadir di tengah meningkatnya perdebatan mengenai posisi Islam dalam hubungan internasional. Selama berabad-abad, Islam tidak hanya menjadi agama dan sistem nilai, tetapi juga aktor yang berperan dalam membentuk tatanan dunia melalui berbagai peradaban, interaksi diplomatik, dan kerja sama internasional. Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis akademik, buku ini mengupas berbagai dimensi peran Islam dalam diplomasi modern serta bagaimana negara-negara Muslim dan organisasi Islam berkontribusi dalam penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, dan dialog antarperadaban.



Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan studi Islam dan hubungan internasional, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Dengan latar belakang akademik yang kuat, penulis telah mengintegrasikan berbagai perspektif historis dan kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara Islam dan dinamika global.

Buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi diplomat, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana Islam berinteraksi dalam sistem internasional.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian Islam dan hubungan internasional, serta mendorong diskusi yang lebih luas mengenai peran Islam dalam membangun dunia yang lebih damai, adil, dan harmonis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas karyanya yang sangat berharga ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi bagian dari kontribusi intelektual dalam memperkaya studi Islam dan hubungan internasional di Indonesia maupun di kancah global.

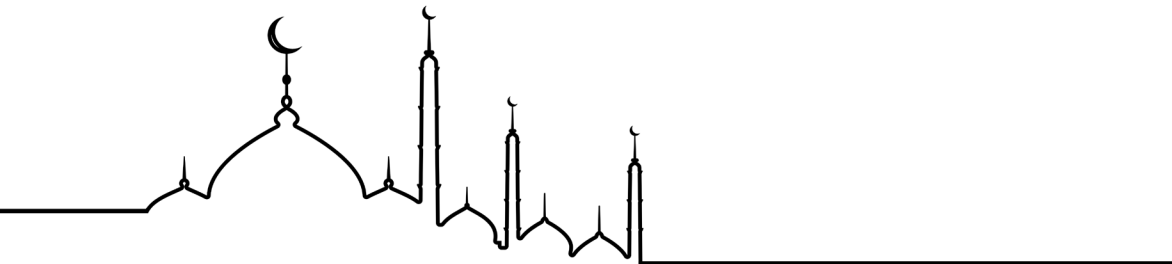
Wallahu a'lam bishawab

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kajian mengenai Islam dan hubungan internasional menjadi semakin relevan dan mendesak. Islam bukan hanya sebuah ajaran spiritual, tetapi juga sistem nilai yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik, ekonomi, dan diplomasi dunia. Buku *Islam dan Hubungan Internasional* ini hadir sebagai sebuah karya akademik yang menawarkan perspektif mengenai interaksi Islam dengan tatanan global, baik dalam konteks sejarah, teori, maupun praktik kontemporer.

Buku ini menyajikan kajian yang komprehensif, menghubungkan konsep-konsep dalam studi hubungan internasional dengan prinsip-prinsip Islam yang telah lama menjadi bagian dari peradaban dunia. Lebih dari itu, buku ini mengulas bagaimana negara-negara Muslim, organisasi Islam, serta para aktor non-negara berperan dalam membentuk kebijakan global dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di berbagai belahan dunia. Dengan pendekatan berbasis penelitian yang kaya referensi, buku ini memberikan wawasan bagi akademisi, diplomat, mahasiswa, serta pengambil kebijakan yang tertarik pada persinggungan antara Islam dan hubungan internasional.



Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada kajian Islam dalam perspektif global, kami sangat mengapresiasi kehadiran buku ini. Karya ini sejalan dengan misi UIII dalam mengembangkan pemikiran Islam yang progresif dan kontekstual terhadap isu-isu internasional. Di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga perubahan iklim, pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi Islam dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan damai menjadi semakin penting.

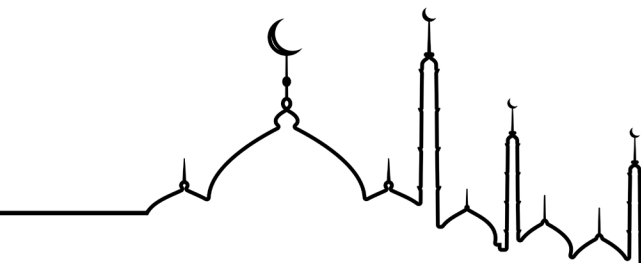
Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat menginspirasi kajian lebih lanjut mengenai Islam dan hubungan internasional. Semoga karya ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman yang lebih luas tentang peran Islam dalam percaturan global serta mendorong dialog yang lebih konstruktif antara dunia Islam dan komunitas internasional.

Selamat kepada penulis atas kontribusi intelektual yang berharga ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak kalangan dan menjadi pijakan dalam memperkaya diskursus mengenai Islam dan hubungan internasional di Indonesia maupun di tingkat global.

Prof. Jamhari Makruf, M.A., Ph.D.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I	
SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL	1
A. Konteks Sejarah Awal Hubungan Islam dengan Negara- Negara Lain	2
B. Pengaruh Peristiwa Sejarah: Ekspansi Islam, Perdagangan, dan Hubungan Diplomatik	5
C. Peran Perdagangan dan Ekspansi Islam di Afrika dan Asia Selatan	10
D. Peran Islam dalam Penemuan dan Pengembangan Jalur Sutra.....	14



E. Peran Tokoh dan Kerajaan Islam dalam Mengembangkan Hubungan Internasional.....	18
F. Diplomasi Transregional Aceh dan Kesultanan Ottoman pada Abad ke-16: Sebuah Contoh Hubungan Internasional Islam	22

BAB II

ISLAM DAN DIPLOMASI MODERN..... 27

A. Konsep Diplomasi dalam Konteks Islam	27
B. Peran Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Diplomasi Internasional.....	30
C. Peran Diplomasi Islam dalam Menangani Konflik di Timur Tengah	34
D. Tantangan dan Peluang bagi Diplomasi Islam dalam Dunia Kontemporer	38
E. Diplomasi Turki di Era Erdogan: Contoh Kebangkitan Diplomasi Islam dalam Dunia Modern.....	41

BAB III

ISLAM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL..... 47

A. Kontribusi Islam dalam Isu-Isu Global	48
B. Keterlibatan Negara-Negara Muslim dalam Berbagai Organisasi Internasional.....	51
C. Keterlibatan Negara-Negara Muslim dalam Kelompok G-20.....	54
D. Keterlibatan OKI dalam Penanganan Krisis Pengungsi Rohingya: Sebuah Contoh Diplomasi Islam dalam Organisasi Internasional	58

BAB IV

ISLAM DAN HUBUNGAN BILATERAL 63

- A. Faktor-faktor dalam Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim: Politik, Ekonomi, dan Keamanan 64
- B. Potensi Kerjasama dan Tantangan dalam Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim 67
- C. Berbagai Dinamika Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim..... 71
- D. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat: Contoh Kerjasama Strategis di Bidang Politik, Ekonomi, dan Keamanan 74
- E. Hubungan Bilateral antara Arab Saudi dan Rusia: Contoh Diplomasi Energi dan Keamanan 77

BAB V

ISLAM DAN KEAMANAN INTERNASIONAL 83

- A. Peran Islam dalam Isu-Isu Keamanan Internasional: Terorisme, Konflik, dan Pemeliharaan Perdamaian 84
- B. Inisiatif Negara-negara Islam dalam Meningkatkan Keamanan Siber 87
- C. Upaya-Upaya Membangun Dialog Antaragama dan Toleransi dalam Mendorong Stabilitas dan Perdamaian 91
- D. Peran Indonesia dalam Misi Perdamaian di Lebanon: Studi Kasus Islam dan Stabilitas Keamanan Internasional..... 94

BAB VI

ISLAM DAN LINGKUNGAN GLOBAL 99

- A. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan dalam Islam..... 100

B. Kontribusi Islam dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.....	103
C. Peran Negara-Negara Muslim dalam Menghadapi Perubahan Iklim.....	107
D. Tantangan Lingkungan di Negara-Negara Mayoritas Muslim.....	112
E. Konservasi Hutan dan Air di Negara-Negara Muslim .	116
F. Studi Kasus: Gerakan Green Islam sebagai Manifestasi Etika Lingkungan dalam Praktik	119

BAB VII

ISLAM DAN EKONOMI GLOBAL..... 123

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Pengaruhnya dalam Konteks Ekonomi Global.....	124
B. Peran Negara-Negara Muslim dalam Sistem Keuangan Internasional.....	127
C. Potensi Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Muslim dan non-Muslim.....	131
D. Peran Ekonomi Syariah Indonesia dalam Kerja Sama Global: Studi Kasus Kerja Sama Ekonomi Syariah dengan Negara Non-Muslim	136

BAB VIII

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA..... 141

A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam	142
B. Tantangan dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Muslim	144
C. Upaya-Upaya untuk Memperbaiki Catatan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Mayoritas Muslim	148
D. Peran Negara-negara Muslim dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia.....	153

- E. Studi Kasus: Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Syariah di Arab Saudi 157

BAB IX

ISLAM DAN MEDIA INTERNASIONAL 161

- A. Peran Media dalam Membentuk Citra Islam di Arena Internasional 162
- B. Pengaruh Media terhadap Persepsi Negara-Negara Muslim dan Agama Islam 165
- C. Upaya Memperbaiki Representasi Islam dalam Media Global 168
- D. Studi Kasus: Representasi Islam dalam Media Barat Pasca Serangan 11 September 2001 171

BAB X

MASA DEPAN HUBUNGAN ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 175

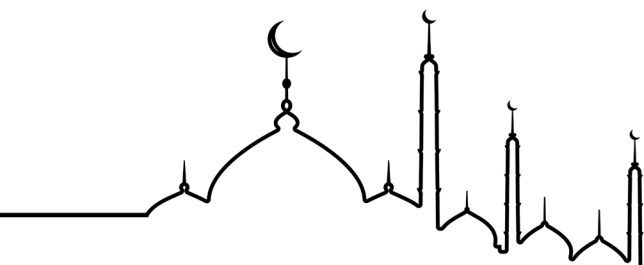
- A. Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Hubungan Islam dengan Komunitas Internasional 176
- B. Prospek Kerjasama dalam Konteks Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Budaya 178
- C. Harapan untuk Memperkuat Dialog Antaragama, Toleransi, dan Kerjasama Global di Masa Depan 182
- D. Studi Kasus: Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Meningkatkan Hubungan Islam dan Komunitas Internasional 186

DAFTAR PUSTAKA 191

TENTANG PENULIS 203

DAFTAR SINGKATAN

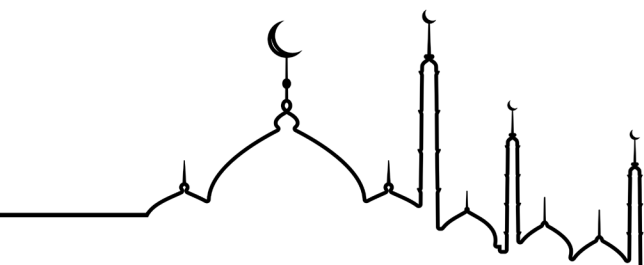
AAOFI	: <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AICHR	: <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
COMCEC	: <i>The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation</i>
COP	: <i>Conference of The Parties</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
EIPR	: <i>Egyptian Initiative for Personal Rights</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
G-20	: <i>Group of 20</i>
HAM	: <i>hak asasi manusia</i>
IFEES	: <i>Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Lakpesdam	: <i>Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>



NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NU	: <i>Nahdlatul Ulama</i>
IFSB	: <i>Islamic Financial Services Board</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
IsDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
ISESCO	: <i>The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
IWRM	: <i>Integrated Water Resource Management</i>
JCPOA	: <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i>
KNEKS	: <i>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah</i>
KWI	: <i>Konferensi Waligereja Indonesia</i>
MENA	: <i>Middle East and North Africa</i>
MUI	: <i>Majelis Ulama Indonesia</i>
MVM	: <i>Muslim Volunteer Malaysia</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
OKI	: <i>Organisasi Kerjasama Islam</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SWF	: <i>Sovereign Wealth Funds</i>
TIK	: <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>
UE	: <i>Uni Eropa</i>
UEA	: <i>Uni Emirat Arab</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNIFIL	: <i>United Nations Interim Force in Lebanon</i>

DAFTAR GAMBAR

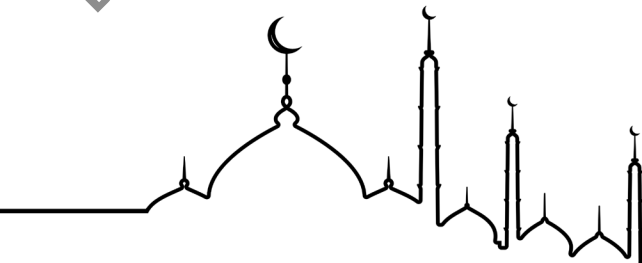
Gambar 1.	Wilayah Dinasti Mughal.....	9
Gambar 2.	Jalur Sutra dan Masuknya Dakwah Islam	14
Gambar 3.	Pertemuan Puncak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab.....	32
Gambar 4.	Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dan Presiden Rusia Vladimir Putin	80
Gambar 5.	Pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Indonesia Bertugas di Lebanon	94
Gambar 6.	Transisi Energi Hijau Berkelanjutan di Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030.....	108
Gambar 7.	Sepuluh Negara Teratas Berdasarkan Aset Keuangan Islam (2020)	128
Gambar 8.	Prospek Ekonomi Islam Global (2017-2023)	134
Gambar 9.	Kasus Hilangnya Wartawan Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi, Menjadi Perhatian Dunia	158
Gambar 10.	Reaksi Media Pasca Tragedi 9/11	171
Gambar 11.	KTT OKI di Banjul, Gambia, 4-5 Mei 2024.....	187



BAB I

SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sejarah hubungan Islam dengan negara-negara lain telah dimulai sejak masa awal penyebarannya, ketika interaksi antara komunitas Muslim dengan berbagai peradaban luar mulai terbentuk. Sejak zaman Nabi Muhammad, hubungan diplomatik dan politik mulai terjalin, yang kemudian berkembang pesat melalui ekspansi Islam ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Selain perluasan wilayah, perdagangan juga memainkan peran penting dalam menjalin hubungan antara umat Islam dan berbagai kerajaan serta bangsa, yang tidak hanya memperluas pengaruh ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Peristiwa-peristiwa sejarah, seperti ekspansi besar-besaran ke Asia, Afrika, dan Eropa, memberikan dampak signifikan terhadap pola hubungan internasional pada masa itu. Pengaruh Islam semakin mengakar melalui hubungan diplomatik yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, seperti Khalifah dan sultan, serta kerajaan-kerajaan besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap politik global. Melalui kemampuan mereka menjalin aliansi, membangun jaringan perdagangan, dan mendirikan pusat-pusat kekuasaan, Islam menjadi kekuatan utama dalam dunia hubungan internasional, yang mempengaruhi peradaban global hingga masa kini.



A. Konteks Sejarah Awal Hubungan Islam dengan Negara-Negara Lain

Hubungan internasional Islam dimulai sejak masa awal penyebarannya, yaitu di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-7, Islam tidak hanya berfokus pada penyebaran agama, tetapi juga pada pembentukan hubungan diplomatik dengan entitas politik di luar Arab. Salah satu contoh paling awal dari hubungan ini adalah surat yang dikirim Nabi Muhammad kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, seperti Kaisar Heraklius dari Bizantium dan Kisra dari Persia, yang mengajak mereka untuk memeluk Islam atau berdamai dengan umat Muslim (Esposito, 1999). Inisiatif ini menunjukkan kesadaran politik Islam sejak masa-masa awalnya, bahwa menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain adalah hal penting.

Ekspansi Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan para khalifah setelahnya melampaui batas-batas politik tradisional. Melalui proses penaklukan, seperti pada masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah, wilayah-wilayah yang dikuasai mencakup sebagian besar Timur Tengah, Persia, Mesir, hingga Spanyol. Hubungan Islam dengan negara-negara non-Muslim berkembang pesat melalui kebijakan luar negeri yang tidak hanya didasarkan pada agama, tetapi juga pragmatisme politik dan ekonomi (Hourani, 1991). Di sisi lain, hubungan dagang antara Arab dan kawasan lain, seperti Bizantium, Persia, dan India, memperkuat interaksi antarbudaya dan ekonomi, yang kemudian memperluas pengaruh Islam di dunia.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama, Abu Bakar, dan penerusnya Umar bin Khattab, memimpin berbagai ekspansi militer ke wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab. Selain tujuan politik dan agama, hubungan dengan negara-negara lain juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi umat Muslim. Keberhasilan mereka tidak hanya menguasai secara militer, tetapi juga merangkul penduduk lokal untuk berinteraksi secara damai dan membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan (Kennedy, 2004). Konsep ini menjadi landasan hubungan internasional Islam di kemudian hari.

Salah satu contoh penting hubungan Islam dengan negara-negara non-Muslim adalah hubungan diplomatik yang dijalin dengan Bizantium. Pada masa Dinasti Umayyah, meskipun terjadi berbagai peperangan dengan Bizantium, hubungan perdagangan antara kedua pihak tetap berlangsung. Bizantium dan Muslim melakukan pertukaran barang-barang mewah seperti sutra, perhiasan, dan rempah-rempah, menunjukkan bahwa meskipun ada konflik politik dan militer, hubungan ekonomi tetap terjalin secara baik (Lewis, 2002). Ini mengindikasikan bahwa sejak awal, Islam memiliki pendekatan yang fleksibel dalam hubungan internasional, terutama dalam hal ekonomi.

Seiring dengan ekspansi militer yang terus berlangsung, umat Muslim juga membangun aliansi strategis dengan negara-negara non-Muslim. Pada masa Dinasti Abbasiyah, hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan India semakin kuat. Melalui jalur perdagangan maritim, umat Muslim memperdagangkan barang-barang seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah dengan penguasa dinasti Tang di Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di India (Fisher, 2001). Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada penyebaran agama, tetapi juga sangat menghargai hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara non-Muslim.

Pengaruh perdagangan dalam membangun hubungan internasional Islam juga terlihat di Afrika Timur. Para pedagang Muslim dari Arab dan Persia berlayar ke pantai timur Afrika dan mendirikan pusat-pusat perdagangan di Zanzibar, Mogadishu, dan Mombasa. Hubungan dagang ini memperkuat pengaruh Islam di Afrika, serta menciptakan hubungan saling menguntungkan antara umat Muslim dan penguasa lokal yang bersedia bekerja sama (Horton & Middleton, 2000). Pengaruh Islam di Afrika kemudian berkembang pesat dengan masuknya penguasa-penguasa lokal ke dalam Islam dan integrasi mereka ke dalam jaringan perdagangan internasional yang lebih luas.

Selain perdagangan, hubungan diplomatik formal juga memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi antarnegara. Pada masa Dinasti Abbasiyah, khalifah Harun al-Rasyid menjalin hubungan diplomatik dengan Charlemagne, penguasa Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Kedua pemimpin bertukar hadiah dan

utusan, menandai awal hubungan baik antara Muslim dan Eropa. Hal ini membuktikan bahwa hubungan internasional Islam pada saat itu sudah sangat maju dan tidak terbatas pada dunia Islam saja, tetapi juga mencakup dunia Kristen Eropa (Kennedy, 2004).

Di Asia Selatan, hubungan internasional Islam dimulai sejak perdagangan maritim dengan India dan Sri Lanka. Para pedagang Muslim dari Arabia dan Persia sudah sejak lama terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, kain, dan logam mulia dengan India. Keberadaan Muslim di India semakin berkembang ketika Dinasti Ghaznaviyah dan Mughal mulai menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, membawa serta budaya dan agama Islam ke dalam struktur politik dan ekonomi lokal (Thapar, 1990). Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan Islam dengan Asia Selatan tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga berujung pada pertukaran budaya dan keagamaan.

Hubungan Islam dengan negara-negara lain juga berkembang pesat melalui berbagai perjanjian diplomatik yang dibuat dengan negara-negara Kristen di Eropa. Salah satu perjanjian terkenal adalah Treaty of Tudmir yang dibuat oleh penguasa Muslim di Spanyol dengan penguasa Kristen lokal. Perjanjian ini memungkinkan umat Kristen untuk mempertahankan keyakinan mereka selama mereka tunduk pada pemerintahan Muslim dan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam dari awal memiliki pendekatan toleransi dalam hubungan internasional, khususnya terkait dengan keberagaman agama (Fletcher, 2006).

Selain hubungan diplomatik, umat Muslim juga berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui hubungan dengan Yunani, Persia, dan India, para sarjana Muslim menerjemahkan karya-karya besar filsafat dan sains yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia Muslim. Hubungan internasional ini memainkan peran signifikan dalam membentuk peradaban Islam yang maju secara intelektual dan ilmiah, yang pada gilirannya berdampak pada hubungan dengan dunia Barat di kemudian hari (Saliba, 2007).

Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Al-Farabi juga memainkan peran penting dalam pemikiran politik dan hubungan internasional. Ibnu Khaldun, dengan konsep-konsepnya tentang siklus dinasti dan hubungan antarnegara, memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan di dunia Islam dan non-Islam. Pemikirannya tentang 'asabiyyah (solidaritas kelompok) dan bagaimana kekuatan politik dibangun dari hubungan sosial dan ekonomi masih relevan dalam studi hubungan internasional hingga saat ini (Ibn Khaldun, 1967).

Kerajaan Islam yang berbeda-beda, seperti Umayyah di Spanyol, Abbasiyah di Baghdad, dan Utsmaniyah di Turki, juga memainkan peran penting dalam mengembangkan hubungan internasional yang kompleks. Masing-masing kerajaan memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalin hubungan dengan dunia non-Muslim, baik melalui diplomasi, perdagangan, maupun ekspansi militer. Namun, semua kerajaan ini memiliki kesamaan dalam hal memperluas pengaruh Islam melalui hubungan internasional yang terorganisir (Lapidus, 2002).

Pada akhirnya, sejarah awal hubungan Islam dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa Islam, sejak masa awal, sudah terlibat dalam jaringan internasional yang luas. Melalui diplomasi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, Islam berhasil membangun hubungan yang kuat dengan berbagai peradaban. Hal ini memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan global yang berpengaruh dan membuka jalan bagi interaksi lintas budaya yang kaya.

B. Pengaruh Peristiwa Sejarah: Ekspansi Islam, Perdagangan, dan Hubungan Diplomatik

Ekspansi Islam yang berlangsung pada abad ke-7 hingga ke-8 memainkan peran penting dalam pembentukan hubungan internasional dan pengaruh geopolitik Islam di berbagai wilayah. Proses ekspansi ini bukan hanya merupakan penaklukan militer semata, tetapi juga disertai dengan penyebaran agama dan budaya Islam yang berdampak luas terhadap peradaban di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Asia Tengah (Kennedy, 2007). Melalui ekspansi ini, Islam berhasil menjalin interaksi dengan

berbagai kekuatan politik dan ekonomi di dunia, baik melalui perdagangan maupun diplomasi.

Ekspansi Islam pertama kali terjadi di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dengan Khalifah Abu Bakar yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad untuk menyatukan Jazirah Arab. Di bawah Khalifah Umar bin Khattab, Islam mulai menaklukkan wilayah-wilayah di luar Arab, termasuk Persia, Mesir, dan Syam (Donner, 1981). Proses ekspansi ini berlanjut pada masa Dinasti Umayyah, yang berhasil membawa Islam ke Spanyol di Barat dan wilayah Asia Tengah di Timur. Penaklukan ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menciptakan jaringan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antara dunia Islam dan non-Islam.

Ekspansi Islam tidak hanya berfokus pada penaklukan wilayah, tetapi juga berusaha membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar dunia Islam. Salah satu contoh penting dari diplomasi Islam pada masa awal adalah surat-surat yang dikirim Nabi Muhammad kepada berbagai penguasa, termasuk Heraklius dari Bizantium dan Kisra dari Persia, yang mengajak untuk menerima Islam atau hidup berdamai dengan umat Muslim (Esposito, 1999). Diplomasi semacam ini menunjukkan bagaimana Islam, sejak awal, menyadari pentingnya hubungan damai dengan kekuatan-kekuatan besar di luar dunia Muslim.

Peran ekspansi Islam dalam membangun jaringan perdagangan global juga sangat signifikan. Melalui jalur darat dan laut, umat Muslim menjalin perdagangan dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Salah satu contoh adalah peran Muslim dalam Jalur Sutra, yang menghubungkan China, Asia Tengah, dan dunia Islam dengan Eropa. Di sepanjang jalur ini, para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan perhiasan, tetapi juga menyebarkan agama, bahasa, dan budaya Islam ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Islam (Fisher, 2001). Pengaruh perdagangan ini memperluas cakrawala Islam di dunia internasional.

Dalam konteks perdagangan maritim, umat Muslim juga menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia dan Laut Merah. Para pedagang Muslim dari Arabia dan Persia memainkan peran

kunci dalam menghubungkan India, Asia Tenggara, dan Afrika Timur melalui perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Kota-kota pelabuhan seperti Basra, Aden, dan Mogadishu menjadi pusat perdagangan internasional yang penting, di mana umat Muslim dan non-Muslim bertukar barang dan budaya (Hourani, 1995). Hubungan perdagangan ini menjadi fondasi penting dalam hubungan diplomatik Islam dengan berbagai kerajaan non-Muslim di Asia dan Afrika.

Selain peran perdagangan, hubungan diplomatik formal juga memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi antara dunia Islam dan non-Muslim. Pada masa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid menjalin hubungan diplomatik dengan Charlemagne, penguasa Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Kedua pemimpin ini saling bertukar hadiah dan utusan, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, hubungan diplomatik antar dua kekuatan besar dapat tetap terjalin (Kennedy, 2004). Diplomasi semacam ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas Islam dalam menjalin hubungan internasional.

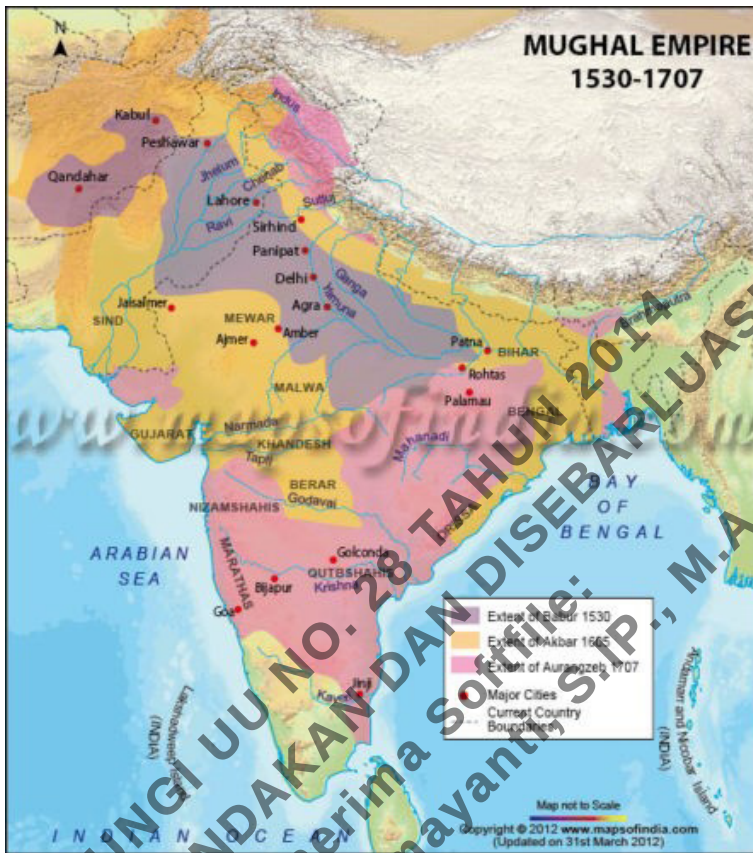
Peran ekspansi dan perdagangan dalam menyebarkan Islam juga terlihat di Afrika Utara dan Sub-Sahara. Para penakluk Muslim, seperti Dinasti Umayyah, menaklukkan wilayah Afrika Utara dan mendirikan pemerintahan di sana. Melalui jalur perdagangan trans-Sahara, Islam kemudian menyebar ke Afrika Barat, di mana kerajaan-kerajaan seperti Ghana, Mali, dan Songhai mulai mengadopsi Islam sebagai agama resmi (Horton & Middleton, 2000). Interaksi antara pedagang Muslim dan penguasa lokal menciptakan ikatan diplomatik dan ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya memperkuat posisi Islam di kawasan tersebut.

Di Asia Tengah, ekspansi Islam membawa dampak signifikan terhadap hubungan internasional di wilayah tersebut. Melalui penaklukan wilayah-wilayah seperti Persia dan Transoxiana, Islam menjalin hubungan dengan dinasti-dinasti lokal seperti Samanid dan Ghaznaviyah, yang kemudian menjadi pendukung setia kekhalifahan Abbasiyah (Lapidus, 2002). Hubungan antara kekuatan politik Muslim dan non-Muslim di wilayah ini berlangsung melalui diplomasi dan pernikahan antar-kerajaan, yang memperkuat aliansi politik dan memperluas pengaruh Islam di Asia Tengah.

Hubungan diplomatik Islam juga berkembang di Timur Jauh, khususnya dengan Tiongkok pada masa Dinasti Tang. Melalui jalur perdagangan darat dan laut, umat Muslim menjalin hubungan yang erat dengan kekaisaran Tiongkok. Para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan Tiongkok seperti Guangzhou membawa serta budaya dan agama mereka, menciptakan komunitas Muslim yang cukup besar di sana (Wade, 2009). Hubungan diplomatik ini tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup pertukaran budaya dan teknologi antara dunia Islam dan Tiongkok.

Perdagangan Islam di kawasan Asia Selatan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan internasional di wilayah tersebut. Melalui jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan India, para pedagang Muslim membawa rempah-rempah, kain, dan logam mulia ke pasar-pasar di Asia Selatan. Interaksi antara umat Muslim dan penduduk lokal di India menciptakan hubungan ekonomi dan diplomatik yang saling menguntungkan, yang kemudian membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut, terutama pada masa Dinasti Mughal (Thapar, 1990).

Dinasti Mughal, yang berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-18, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Selatan. Para penguasa Mughal, seperti Babur, Akbar, dan Aurangzeb, tidak hanya membawa sistem administrasi yang kuat tetapi juga mendorong integrasi budaya dan agama antara Islam dan tradisi lokal. Akbar, misalnya, dikenal dengan kebijakan toleransinya melalui konsep *Din-i Ilahi*, yang mencoba menyatukan berbagai kepercayaan dalam kerangka pemerintahan yang inklusif. Selain itu, perdagangan yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Mughal menarik banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah, yang mempercepat penyebaran Islam melalui interaksi sosial dan ekonomi. Kombinasi perdagangan, patronase kerajaan, serta interaksi antara ulama dan masyarakat lokal menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan politik di India selama periode tersebut (Eaton, 2003).



Gambar 1. Wilayah Dinasti Mughal

Sumber: <https://wawasansejarah.com/dinasti-mughal/>

Selain perdagangan dan diplomasi, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan internasional Islam. Melalui penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India, umat Muslim berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan ilmiah ke seluruh dunia. Pusat-pusat pengetahuan seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat intelektual di mana para sarjana Muslim dan non-Muslim berkumpul untuk belajar dan bertukar ide (Saliba, 2007). Ini menunjukkan bagaimana ekspansi Islam tidak hanya membawa pengaruh politik dan ekonomi, tetapi juga intelektual dan budaya.

Hubungan diplomatik Islam juga terlihat di Eropa Barat, khususnya di Spanyol Muslim (al-Andalus). Para penguasa Umayyad di Spanyol berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan Kristen di Eropa, seperti Kerajaan Frank dan Inggris. Salah satu contoh adalah Treaty of Tudmir, yang memungkinkan umat Kristen di Spanyol untuk mempertahankan agama mereka selama mereka tunduk pada pemerintahan Muslim dan membayar pajak (Fletcher, 2006). Perjanjian semacam ini menunjukkan pendekatan toleran Islam dalam hubungan internasional, yang sering kali didasarkan pada kompromi politik dan ekonomi.

Pada akhirnya, pengaruh ekspansi Islam, perdagangan, dan hubungan diplomatik sangat signifikan dalam membentuk hubungan internasional di dunia pra-modern. Melalui penaklukan, perdagangan, dan diplomasi, Islam berhasil menciptakan jaringan global yang menghubungkan dunia Muslim dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Pengaruh ini tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga pada pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan yang memperkaya peradaban dunia (Lewis, 2002). Dengan demikian, Islam tidak hanya dipandang sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai peradaban.

C. Peran Perdagangan dan Ekspansi Islam di Afrika dan Asia Selatan

Ekspansi Islam di Afrika dan Asia Selatan melalui jalur perdagangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap hubungan internasional dan diplomasi di wilayah tersebut. Sejak abad ke-7, Islam menyebar melalui para pedagang yang melakukan perjalanan melintasi jalur perdagangan di sepanjang Laut Merah, Samudra Hindia, dan sekitarnya (Lapidus, 2014). Jalur perdagangan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur komersial, tetapi juga sebagai sarana penyebaran agama Islam ke wilayah baru. Para pedagang Muslim membawa serta nilai-nilai dan budaya Islam ke Afrika dan Asia Selatan, menciptakan hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang erat antara berbagai komunitas (Chaudhuri, 2015).

Di Afrika, khususnya Afrika Utara, penyebaran Islam dimulai sejak penaklukan Arab pada abad ke-7. Pedagang Muslim yang melintasi Gurun Sahara membawa Islam ke Afrika Barat, dan melalui jalur perdagangan emas dan garam, Islam menyebar ke kota-kota besar seperti Timbuktu, Gao, dan Djenne (Thornton, 2019). Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan dan intelektual, di mana hubungan internasional antara berbagai kerajaan Afrika dan dunia Islam mulai terjalin. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang-barang dagangan, tetapi juga memfasilitasi pertukaran ide dan budaya yang memperkuat hubungan internasional antar wilayah (Ali, 2016). Selain itu, para penguasa Afrika, seperti Mansa Musa dari Kekaisaran Mali, memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan internasional melalui diplomasi Islam. Mansa Musa terkenal karena perjalanan hajinya ke Mekah pada tahun 1324, yang tidak hanya meningkatkan pengaruh Islam di Afrika Barat tetapi juga mengokohkan hubungan diplomatik antara Mali dan negara-negara Muslim lainnya (Ahmad, 2021). Kunjungan Musa ke berbagai wilayah Muslim memperkuat jaringan perdagangan dan hubungan diplomatik yang bertahan selama berabad-abad.

Sementara itu, di Asia Selatan, Islam mulai masuk melalui para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang berlayar melalui Samudra Hindia pada awal abad ke-8 (Aslan, 2017). Jalur perdagangan maritim ini memungkinkan hubungan langsung antara para pedagang Muslim dengan penguasa lokal di pantai barat India. Kota-kota pelabuhan seperti Calicut, Cochin, dan Surat menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Selatan dengan dunia Islam. Para pedagang Muslim ini tidak hanya memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan permata, tetapi juga membawa agama Islam dan membangun masjid serta komunitas Muslim di sepanjang pesisir India (Faruqui, 2016).

Perdagangan juga menjadi sarana utama bagi penyebaran Islam di Kepulauan Maladewa dan Sri Lanka. Para pedagang Muslim secara bertahap memperkenalkan Islam kepada penduduk lokal, dan pada abad ke-12, Maladewa telah sepenuhnya memeluk Islam (Vernet, 2018). Ini memperkuat hubungan maritim antara Maladewa dan dunia Muslim, termasuk kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan

Gujarat. Hubungan perdagangan ini mendorong terjalinnya aliansi politik dan budaya yang memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut.

Salah satu aspek penting dari ekspansi Islam melalui perdagangan di Afrika dan Asia Selatan adalah adaptasi budaya Islam dengan tradisi lokal. Di banyak tempat, Islam diterima dan diadaptasi oleh masyarakat lokal tanpa meninggalkan budaya dan tradisi mereka (Loimeier, 2017). Di Afrika, misalnya, Islam berintegrasi dengan praktik budaya lokal seperti penghormatan terhadap leluhur dan penggunaan bahasa lokal dalam penyebaran agama. Hal ini menciptakan bentuk Islam yang unik, yang dikenal sebagai "Islam Afrika." Di Asia Selatan, hal serupa terjadi, terutama di wilayah India. Ketika Islam menyebar melalui perdagangan, agama ini diserap ke dalam masyarakat yang sudah kaya dengan tradisi Hindu dan Buddha (Chaudhuri, 2015). Para penguasa Muslim di India, seperti Sultan Delhi dan Mughal, berperan dalam menciptakan sintesis antara budaya Islam dan lokal, yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan hukum. Contohnya, arsitektur Mughal merupakan perpaduan antara tradisi Islam dan Hindu yang menghasilkan mahakarya seperti Taj Mahal.

Kontribusi lain dari jalur perdagangan Islam adalah pembentukan jaringan intelektual di Afrika dan Asia Selatan. Kota-kota seperti Timbuktu dan Delhi menjadi pusat ilmu pengetahuan, di mana para cendekiawan Muslim berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni (Ali, 2016). Hubungan intelektual ini memperkuat diplomasi Islam di wilayah tersebut, karena pengetahuan dan budaya Islam menyebar melalui jaringan perdagangan yang sama. Selain itu, jalur perdagangan Islam di Afrika dan Asia Selatan memperkuat hubungan antar wilayah dalam hal politik. Para pedagang Muslim sering kali bertindak sebagai perantara antara penguasa lokal dan penguasa Muslim lainnya (Faruqui, 2016). Mereka tidak hanya memperdagangkan barang-barang tetapi juga menyampaikan informasi politik, diplomatik, dan militer, yang memungkinkan terjalinnya aliansi politik di antara wilayah-wilayah Muslim.

Contoh lain dari diplomasi perdagangan Islam adalah Kesultanan Zanzibar di Afrika Timur. Zanzibar menjadi pusat perdagangan utama antara dunia Islam, Afrika, dan Asia Selatan (Thornton, 2019). Kesultanan ini menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan besar saat itu, termasuk Kekaisaran Utsmaniyah dan Kesultanan Gujarat. Melalui perdagangan rempah-rempah dan gading, Zanzibar memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan internasional yang memperkuat hubungan diplomasi Islam. Namun, meskipun perdagangan Islam berhasil menyebarkan agama dan memperkuat hubungan internasional, tidak dapat diabaikan bahwa konflik juga muncul dalam proses ini. Di beberapa tempat, perdagangan Islam menyebabkan persaingan dengan kekuatan non-Muslim, seperti Portugis di Asia Selatan dan Afrika Timur (Lapidus, 2014). Meskipun demikian, konflik ini sering kali diselesaikan melalui perjanjian diplomatik yang memperkuat hubungan internasional.

Pada abad ke-16, ekspansi perdagangan Islam di Afrika dan Asia Selatan mencapai puncaknya dengan keterlibatan Kesultanan Ottoman. Melalui kontrol maritim dan pengaruh diplomatiknya, Kesultanan Ottoman memperkuat hubungan antara dunia Muslim di Afrika dan Asia Selatan (Vernet, 2018). Hubungan ini diperkuat oleh peran Ottoman sebagai pelindung komunitas Muslim di wilayah tersebut, termasuk membantu para penguasa Muslim dalam menghadapi kekuatan kolonial Eropa. Dalam hal ini, peran perdagangan Islam di Afrika dan Asia Selatan tidak hanya terbatas pada pertukaran ekonomi tetapi juga mencakup pertukaran budaya, agama, dan politik yang memperkuat hubungan internasional. Perdagangan menjadi alat penting bagi diplomasi Islam di wilayah tersebut, menciptakan jaringan hubungan yang berkelanjutan hingga hari ini (Ahmad, 2021).

Terakhir, pengaruh perdagangan Islam di Afrika dan Asia Selatan juga berlanjut hingga zaman modern. Jalur perdagangan lama kini menjadi rute penting dalam hubungan internasional modern antara negara-negara Muslim dan non-Muslim (Loimeier, 2017). Hubungan ini menunjukkan bagaimana warisan sejarah perdagangan Islam terus mempengaruhi dinamika hubungan internasional di abad ke-21.

D. Peran Islam dalam Penemuan dan Pengembangan Jalur Sutra

Jalur Sutra merupakan salah satu jaringan perdagangan internasional paling berpengaruh yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Meskipun Jalur Sutra telah ada jauh sebelum munculnya Islam, dunia Islam memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan, memfasilitasi, dan mempertahankan jalur perdagangan ini selama Abad Pertengahan. Perdagangan yang berlangsung di sepanjang Jalur Sutra memungkinkan pertukaran barang, gagasan, agama, dan budaya antara berbagai peradaban, menjadikannya jembatan ekonomi dan budaya antar benua (Beckwith, 2015).

Islam berkembang pesat di sepanjang Jalur Sutra sejak abad ke-7 setelah kekhalifahan Islam menyebar melalui Timur Tengah, Persia, dan Asia Tengah. Pada abad ke-8 dan ke-9, dengan berdirinya Dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat intelektual dan ekonomi dunia Islam, memainkan peran utama dalam mengoordinasikan perdagangan di sepanjang Jalur Sutra (Foltz, 2019). Abbasiyah membangun hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat dengan berbagai kerajaan di sepanjang Jalur Sutra, termasuk Kekaisaran Tiongkok Tang, yang memungkinkan perdagangan berlangsung dengan lebih lancar.



Gambar 2. Jalur Sutra dan Masuknya Dakwah Islam

Dunia Islam bukan hanya penghubung geografis antara Timur dan Barat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat inovasi dalam perdagangan dan teknologi. Pedagang Muslim memainkan peran kunci dalam memperkenalkan dan menyebarkan teknologi baru, seperti kertas, dari Tiongkok ke dunia Islam dan Eropa (Liu, 2019). Teknologi kertas, yang dikembangkan di Tiongkok, diadopsi oleh Muslim setelah Pertempuran Talas pada tahun 751, di mana mereka menangkap beberapa pengrajin kertas Tiongkok. Ini memungkinkan pembuatan kertas di dunia Islam, mempercepat transmisi ilmu pengetahuan dan budaya melalui Jalur Sutra.

Kontribusi besar lainnya dari dunia Islam terhadap Jalur Sutra adalah pengembangan sistem keuangan dan perbankan yang lebih efisien. Sistem perbankan Muslim, termasuk pengenalan cek dan surat kredit (*hawala*), memungkinkan pedagang untuk melakukan transaksi jarak jauh tanpa harus membawa barang atau emas fisik. Ini memfasilitasi perdagangan antar benua yang lebih aman dan lebih cepat, yang pada gilirannya memperkuat Jalur Sutra sebagai rute perdagangan utama (Khan, 2020). Selain itu, kaum Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan perdagangan maritim di sepanjang Jalur Sutra. Meskipun jalur darat tetap penting, rute maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok menjadi semakin strategis di bawah kendali pedagang Muslim (Abu-Lughod, 2018). Melalui Laut Arab dan Samudra Hindia, pedagang Muslim menghubungkan kota-kota pelabuhan di Timur Tengah dan Afrika Timur dengan pelabuhan-pelabuhan di India dan Asia Tenggara, memperluas cakupan Jalur Sutra.

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam menyebar ke Asia Tengah melalui perdagangan di Jalur Sutra. Islamisasi wilayah ini memperkuat kontrol Muslim atas Jalur Sutra dan mendorong lebih banyak interaksi budaya dan diplomasi. Kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara menjadi pusat intelektual dan spiritual yang juga berfungsi sebagai stasiun perdagangan penting (Beckwith, 2015). Para ulama dan cendekiawan Muslim di kota-kota ini berkontribusi

pada pertukaran pengetahuan di sepanjang Jalur Sutra, khususnya dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran.

Perdagangan di Jalur Sutra juga mendorong difusi agama Islam ke Asia Timur dan Tenggara. Para pedagang Muslim, bersama dengan para ulama dan misionaris, membawa Islam ke wilayah-wilayah ini, memperluas pengaruh agama dan budaya Islam. Di Tiongkok, para pedagang Muslim mendirikan komunitas di kota-kota pelabuhan besar seperti Guangzhou dan Quanzhou (Sen, 2020). Komunitas Muslim di Tiongkok tidak hanya terlibat dalam perdagangan tetapi juga memainkan peran penting dalam diplomasi, bertindak sebagai jembatan antara kekaisaran Tiongkok dan dunia Islam.

Selain perdagangan barang, Jalur Sutra juga menjadi saluran utama untuk pertukaran pengetahuan ilmiah dan intelektual. Dunia Islam memainkan peran penting dalam penerjemahan teks-teks Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, yang kemudian disebarluaskan ke Eropa melalui Jalur Sutra (Nasr, 2016). Karya-karya ilmiah dari filsuf seperti Aristoteles dan Galen diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan Muslim, yang pada gilirannya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka sendiri. Pengetahuan ini kemudian mencapai Eropa melalui hubungan perdagangan dan diplomasi.

Kontribusi lain yang signifikan dari dunia Islam terhadap Jalur Sutra adalah penyebaran budaya dan seni. Seni Islam, yang terkenal dengan motif geometris dan kaligrafinya, menyebar ke seluruh Asia dan Eropa melalui Jalur Sutra. Barang-barang seperti tekstil, keramik, dan logam yang diproduksi di dunia Islam menjadi sangat dicari di pasar-pasar Tiongkok, India, dan Eropa (Pereira, 2019). Pertukaran ini menciptakan perpaduan budaya yang memperkaya berbagai peradaban yang terlibat dalam perdagangan Jalur Sutra.

Selain kontribusi ekonomi dan budaya, dunia Islam juga berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di sepanjang Jalur Sutra. Kekhalifahan Islam secara aktif bekerja untuk memastikan keselamatan para pedagang yang melakukan perjalanan di sepanjang jalur ini, baik melalui darat maupun laut. Mereka membangun pos-pos perdagangan dan karavansera (tempat peristirahatan bagi pedagang) di sepanjang Jalur Sutra untuk memberikan

perlindungan dan akomodasi bagi para pedagang (Hansen, 2020). Keamanan yang diberikan oleh kekhalifahan memungkinkan Jalur Sutra berfungsi sebagai jaringan perdagangan yang efektif selama berabad-abad. Sebagai tambahan, dunia Islam juga berkontribusi pada pengembangan navigasi dan teknologi maritim. Para ilmuwan Muslim mengembangkan berbagai instrumen navigasi seperti *astrolabe* dan peta maritim yang membantu para pelaut dalam menavigasi rute perdagangan laut di sepanjang Jalur Sutra (Khan, 2020). Inovasi-inovasi ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan antar wilayah tetapi juga memperkuat posisi dunia Islam sebagai kekuatan maritim global.

Dalam hal diplomasi, Jalur Sutra menjadi saluran utama bagi interaksi politik antara dunia Islam dan kekaisaran lain seperti Kekaisaran Bizantium, Persia, dan Tiongkok. Perdagangan yang berkembang di Jalur Sutra menciptakan kebutuhan akan hubungan diplomatik yang stabil antara berbagai negara yang terlibat dalam perdagangan (Foltz, 2019). Hubungan diplomatik ini membantu menjaga perdamaian di sepanjang jalur perdagangan dan memungkinkan para pedagang untuk beroperasi tanpa gangguan besar.

Pada abad ke-13, ketika Kekaisaran Mongol menguasai sebagian besar Asia, Jalur Sutra kembali mengalami kebangkitan di bawah Pax Mongolica. Para penguasa Mongol, yang menghormati dan mendukung perdagangan, berperan dalam menghidupkan kembali Jalur Sutra dengan memberikan perlindungan kepada para pedagang Muslim dan memastikan keamanan di sepanjang rute perdagangan (Liu, 2019). Pengaruh Islam di Jalur Sutra terus tumbuh selama periode ini, dengan para pedagang Muslim memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional di bawah Mongol.

Peran dunia Islam dalam pengembangan Jalur Sutra tidak hanya terbatas pada perdagangan fisik, tetapi juga mencakup penyebaran ide-ide tentang hukum, etika, dan diplomasi. Konsep-konsep seperti perdagangan yang adil dan perlindungan bagi para pedagang asing menjadi bagian integral dari hukum Islam yang mengatur perdagangan di sepanjang Jalur Sutra (Nasr, 2016). Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan semua kontribusi

ini, jelas bahwa dunia Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penemuan dan pengembangan Jalur Sutra sebagai jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Keberhasilan Jalur Sutra selama berabad-abad sebagian besar bergantung pada peran pedagang Muslim, penguasa Islam, dan cendekiawan dalam memfasilitasi perdagangan, menjaga keamanan, serta memperkuat hubungan diplomatik dan budaya antar peradaban.

E. Peran Tokoh dan Kerajaan Islam dalam Mengembangkan Hubungan Internasional

Sejarah peran tokoh dan kerajaan Islam dalam mengembangkan hubungan internasional mencerminkan betapa pentingnya kontribusi mereka dalam membentuk tatanan dunia global. Khalifah, sultan, dan pemimpin Muslim lainnya tidak hanya terlibat dalam diplomasi dan perdagangan tetapi juga memelopori jaringan politik yang melampaui batas-batas geografis. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Khalifah Harun al-Rashid dari Dinasti Abbasiyah, yang dikenal karena hubungan diplomatiknya dengan Charlemagne, penguasa Kekaisaran Romawi Suci (Kennedy, 2004). Pertukaran hadiah dan utusan diplomatik antara kedua pemimpin ini mencerminkan upaya aktif dalam membangun hubungan yang damai antara kekuatan Muslim dan Kristen pada abad pertengahan.

Selain Harun al-Rashid, tokoh penting lainnya yang memainkan peran dalam diplomasi internasional adalah Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Mehmed II membangun hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan Eropa, termasuk Republik Venesia dan Hungaria. Melalui perjanjian damai dan aliansi, ia berhasil memperluas pengaruh Utsmaniyah di Eropa, sementara tetap menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut (Imber, 2002). Peran Mehmed II dalam hubungan internasional menjadi contoh penting bagaimana pemimpin Muslim memanfaatkan diplomasi untuk mencapai tujuan politik dan militer.

Kekaisaran Utsmaniyah secara umum juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional selama beberapa abad. Di bawah pemerintahan *Suleiman the Magnificent*, Kekaisaran Utsmaniyah menjalin hubungan diplomatik dengan Prancis, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya. Suleiman dianggap sebagai salah satu diplomat terhebat dalam sejarah Islam, yang tidak hanya memperkuat posisi Utsmaniyah di Eropa tetapi juga memperluas pengaruhnya ke Afrika Utara dan Timur Tengah (Ágoston, 2011). Hubungan diplomatik ini didorong oleh perdagangan, persaingan dengan kekuatan Kristen, serta kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas di wilayah-wilayah yang dikuasai Utsmaniyah.

Di Afrika Barat, peran Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali, dalam hubungan internasional sangat terkenal, terutama setelah perjalanan hajinya ke Mekah pada tahun 1324. Perjalanan ini tidak hanya meningkatkan reputasi Kekaisaran Mali di dunia Islam, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan diplomatik dan perdagangan dengan dunia Arab dan Afrika Utara (Levtzion & Hopkins, 2000). Mansa Musa dikenal sebagai salah satu pemimpin Muslim paling kaya dalam sejarah, dan kekayaannya yang luar biasa menarik perhatian dunia internasional. Setelah haji tersebut, Mali menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan yang penting, khususnya melalui kota Timbuktu.

Kerajaan Safawiyah di Persia, di bawah pemerintahan Shah Abbas I, juga memainkan peran utama dalam mengembangkan hubungan internasional dengan kekuatan-kekuatan Eropa dan Asia. Shah Abbas memindahkan ibu kota ke Isfahan, yang kemudian menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan internasional. Ia membangun hubungan dengan berbagai negara Eropa, seperti Inggris dan Portugal, serta membentuk aliansi strategis melawan Kekaisaran Utsmaniyah dan Mughal (Savory, 2007). Perjanjian perdagangan yang disepakati dengan Inggris, misalnya, memperkuat posisi Persia dalam perdagangan sutra dan komoditas lainnya.

Demikian halnya Kerajaan Mughal di India, terutama pada masa pemerintahan Akbar Agung, dikenal karena hubungan diplomatik dan keterbukaan terhadap kekuatan-kekuatan asing. Akbar menjalin hubungan dengan Portugis dan Belanda, serta mengirim utusan diplomatik ke Kekaisaran Safawi dan Utsmaniyah (Richards, 1995).

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.**

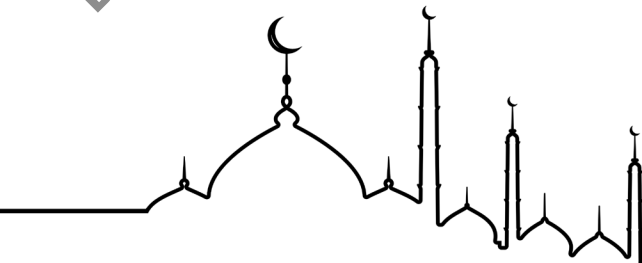
BAB II

ISLAM DAN DIPLOMASI MODERN

Diplomasi dalam Islam memiliki akar kuat yang bersumber dari tradisi serta nilai-nilai keagamaan. Sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan keadilan, Islam telah mengembangkan pendekatan diplomatik yang menekankan dialog, persahabatan, dan solusi damai dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks modern, konsep diplomasi Islam terus berkembang seiring dengan munculnya negara-negara mayoritas Muslim yang memainkan peran signifikan dalam percaturan internasional. Negara-negara ini, baik di kawasan Timur Tengah, Afrika, maupun Asia, seringkali menjadi mediator dalam konflik global serta berpartisipasi dalam upaya internasional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia kontemporer, diplomasi Islam juga harus beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Meskipun terdapat peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk memperkuat pengaruh diplomatiknya, negara-negara Muslim juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti isu politik global, ekstremisme, dan ketegangan antar-agama.

A. Konsep Diplomasi dalam Konteks Islam

Diplomasi dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran agama yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan hubungan baik antar bangsa. Konsep diplomasi dalam



Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan diplomatik dengan berbagai kekuatan politik pada zamannya, seperti Persia, Byzantium, dan suku-suku Arab lainnya. Diplomasi dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global (Abdallah, 2021).

Salah satu prinsip utama diplomasi dalam Islam adalah *sulh* (perdamaian), yang menjadi landasan bagi semua bentuk interaksi internasional. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menciptakan perdamaian dan mencegah konflik. Misalnya, Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal (8:61) menyatakan, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan perdamaian sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik (Ahmad, 2020).

Selain *sulh*, konsep *ummah* atau komunitas global juga memainkan peran penting dalam diplomasi Islam. *Ummah* tidak terbatas pada komunitas Muslim, tetapi meluas ke seluruh umat manusia. Ini menegaskan bahwa Islam mendorong diplomasi inklusif yang tidak didasarkan pada etnisitas, kebangsaan, atau agama, tetapi pada kemanusiaan secara keseluruhan (Fakhry, 2019). Dengan kata lain, Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dan harmoni dalam hubungan antarbangsa.

Selama masa Rasulullah SAW, banyak perjanjian diplomatik yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah, yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana Islam memprioritaskan diplomasi dalam menyelesaikan konflik, bahkan dalam situasi yang penuh ketegangan (Kamali, 2020). Islam juga memiliki konsep *hudna* atau gencatan senjata. Dalam konteks perang, Islam mengajarkan bahwa jika ada peluang untuk berdamai, maka hal tersebut harus diupayakan terlebih dahulu. Konsep ini mencerminkan pandangan Islam tentang perang sebagai jalan terakhir, di mana diplomasi dan perundingan menjadi sarana utama untuk mencapai perdamaian (Ali, 2018).

Pada abad pertengahan, kerajaan-kerajaan Islam memainkan peran signifikan dalam hubungan internasional, terutama di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Contoh nyata adalah Kerajaan Ottoman, yang terkenal dengan diplomasi cerdasnya dalam menjaga hubungan damai dengan kekaisaran-kekaisaran Eropa. Kerajaan Ottoman menggunakan diplomasi sebagai sarana untuk mengelola keragaman etnis dan agama dalam wilayahnya serta menjaga hubungan perdagangan dan politik dengan negara-negara non-Muslim (Islahi, 2019).

Diplomasi dalam Islam juga erat kaitannya dengan konsep *justice* (keadilan) dan *adl* (timbangan yang seimbang). Islam menekankan bahwa diplomasi harus didasarkan pada keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini mencakup tidak hanya aspek politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian, diplomasi dalam Islam tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Hassan, 2021).

Konsep *shura* (musyawarah) juga penting dalam diplomasi Islam. *Shura* mengacu pada konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif, yang menekankan bahwa keputusan diplomatik harus dibuat secara adil dan berdasarkan pada masukan dari semua pihak yang terlibat. Prinsip ini telah diadopsi oleh banyak negara Muslim modern dalam pendekatan mereka terhadap hubungan internasional (El-Fadl, 2020).

Diplomasi dalam Islam juga mengakui pentingnya *amanah* (kepercayaan) dan *sidq* (kejujuran) dalam berinteraksi dengan negara lain. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan internasional, serta pentingnya memenuhi janji dan perjanjian yang dibuat dengan negara lain (Moussalli, 2018). Hal ini menjadi landasan moral dalam diplomasi Islam yang mengutamakan transparansi dan integritas.

Pada abad modern, banyak negara mayoritas Muslim yang telah mengadopsi nilai-nilai diplomasi Islam dalam kebijakan luar negeri mereka. Sebagai contoh, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering terlibat dalam upaya diplomasi multilateral di forum internasional. Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam pendekatan diplomatiknya, terutama

dalam mendorong perdamaian dan kerjasama di kawasan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Anwar, 2022).

Peran diplomasi Islam juga tercermin dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang berfungsi sebagai platform bagi negara-negara mayoritas Muslim untuk berkolaborasi dalam isu-isu global. OKI telah berperan dalam memfasilitasi dialog antaragama dan menyelesaikan konflik di negara-negara Muslim, yang mencerminkan pentingnya diplomasi dalam mencapai tujuan bersama (Mahmud, 2020). Namun, tantangan globalisasi dan meningkatnya ketegangan antaragama dan budaya di dunia kontemporer telah menguji kemampuan diplomasi Islam untuk beradaptasi. Banyak negara Muslim menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip-prinsip tradisional diplomasi Islam dan merespon dinamika politik global yang semakin kompleks (Khan, 2019). Sebagai contoh, diplomasi dalam menangani krisis pengungsi di dunia Muslim menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) diterapkan dalam merespon situasi kemanusiaan. Negara-negara seperti Turki dan Yordania, misalnya, telah menunjukkan diplomasi Islam melalui keterlibatan aktif mereka dalam menangani krisis pengungsi dari Suriah (Gül, 2021).

Dalam perjalanannya, diplomasi Islam terus berkembang sebagai kekuatan moral dalam tatanan global. Prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, musyawarah, dan kejujuran tetap menjadi landasan penting dalam mengarahkan kebijakan luar negeri negara-negara Muslim dalam hubungan internasional modern. Dalam dunia yang terus berubah, diplomasi Islam tetap relevan dan berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan tantangan kontemporer (Saeed, 2020).

B. Peran Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Diplomasi Internasional

Negara-negara mayoritas Muslim memainkan peran signifikan dalam diplomasi internasional, baik dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral. Negara-negara ini sering berperan sebagai jembatan antara dunia Muslim dan non-Muslim, mempromosikan

dialog antarperadaban, serta berkontribusi dalam berbagai forum internasional. Sebagai negara-negara yang mewakili populasi Muslim besar, kebijakan luar negeri mereka sering mencerminkan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional (Ahmad, 2019).

Salah satu contoh peran negara mayoritas Muslim dalam diplomasi internasional adalah peran Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia aktif dalam diplomasi regional dan global. Indonesia telah memanfaatkan posisinya di ASEAN untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, serta berpartisipasi dalam berbagai inisiatif internasional yang mendukung kerjasama antarnegara, termasuk dalam isu-isu kemanusiaan dan konflik di dunia Muslim (Anwar, 2021). Negara-negara mayoritas Muslim juga memainkan peran penting dalam OKI, sebuah organisasi multilateral yang terdiri dari negara-negara Muslim. OKI berfungsi sebagai platform bagi negara-negara Muslim untuk berkolaborasi dalam berbagai isu global, termasuk hak asasi manusia, konflik internasional, dan pengembangan ekonomi. Misalnya, OKI telah berperan dalam memfasilitasi solusi untuk krisis Palestina dan mendukung upaya penyelesaian konflik di Suriah dan Yaman (Mahmood, 2020). Selain itu, peran Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Muslim sangat penting dalam diplomasi internasional, terutama melalui pengaruhnya di OKI dan Liga Arab. Arab Saudi secara aktif terlibat dalam upaya mediasi dalam konflik regional dan sering menjadi perantara dalam perundingan damai antara negara-negara yang berkonflik. Misalnya, peran Arab Saudi dalam mendukung solusi dua negara di Palestina dan keterlibatannya dalam konflik Yaman menunjukkan komitmen kerajaan ini terhadap perdamaian regional (Khashan, 2020).



Gambar 3. Pertemuan Puncak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
dan Liga Arab pada 10-11 November 2024

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2024/11/2101906-120-1165632/5-poin-ktt-liga-arab-oki-embargo-desak-israel-angkat-kaki-dari-gaza>

Negara-negara mayoritas Muslim juga memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk memperkuat pengaruh mereka di panggung internasional. Qatar, misalnya, menggunakan kekayaannya dari gas alam untuk memperluas pengaruh global melalui investasi di berbagai sektor di seluruh dunia, serta dengan mendirikan Al Jazeera, yang menjadi saluran media internasional terkemuka. Melalui diplomasi media, Qatar memproyeksikan narasi yang mendukung negara-negara Muslim dan memperkuat citranya sebagai pemain global yang berpengaruh (Ulrichsen, 2021). Turki juga telah muncul sebagai kekuatan diplomatik yang signifikan di dunia Muslim, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Turki aktif terlibat dalam diplomasi kemanusiaan, terutama dalam merespon krisis pengungsi dari Suriah dan wilayah lainnya. Turki juga menjadi penghubung antara Eropa dan dunia Muslim, memanfaatkan posisinya yang strategis di antara dua benua untuk memperkuat pengaruh diplomatiknya (Altunisik, 2020).

Diplomasi perdamaian juga merupakan area di mana negara-negara mayoritas Muslim aktif berperan. Misalnya, Malaysia terlibat dalam berbagai proses perdamaian, termasuk konflik Moro di Filipina Selatan, di mana Malaysia berperan sebagai mediator. Peran ini

mencerminkan komitmen negara-negara Muslim untuk mendukung penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan diplomatis (Noor, 2019). Iran, meskipun sering dianggap sebagai negara yang kontroversial di panggung internasional, juga memainkan peran signifikan dalam diplomasi internasional. Diplomasi Iran sering fokus pada mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah dan menghadapi sanksi internasional. Melalui pendekatan ini, Iran berusaha memperkuat posisinya dalam sistem internasional sambil menavigasi hubungan yang kompleks dengan negara-negara Barat dan tetangga regionalnya (Ehteshami, 2018).

Peran Mesir sebagai salah satu negara terbesar di dunia Arab juga tidak bisa diabaikan. Mesir telah lama menjadi pusat diplomasi Arab dan dunia Muslim, terutama dalam isu-isu seperti Palestina dan konflik regional lainnya. Sebagai anggota Liga Arab, Mesir secara aktif terlibat dalam upaya mediasi konflik dan mempromosikan stabilitas di kawasan Timur Tengah (Soliman, 2021). Pakistan, sebagai negara mayoritas Muslim yang memiliki kekuatan nuklir, memainkan peran unik dalam diplomasi internasional. Pakistan terlibat dalam berbagai upaya diplomasi, termasuk hubungan yang kompleks dengan India serta keterlibatannya dalam isu-isu keamanan di Asia Selatan dan Afghanistan. Pakistan juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan (Khan, 2019).

Selain peran diplomatik di wilayah masing-masing, negara-negara mayoritas Muslim juga berkontribusi pada upaya global dalam isu-isu perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara seperti Bangladesh, yang menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim, telah memainkan peran penting dalam forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan membawa perspektif dunia Muslim ke dalam diskusi global tentang lingkungan (Haque, 2020).

Selain itu, negara-negara Muslim di Afrika seperti Nigeria dan Senegal terlibat dalam diplomasi regional dan internasional, khususnya di bidang keamanan dan pembangunan ekonomi. Negara-negara ini memainkan peran dalam menjaga stabilitas regional, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme di wilayah Sahel dan Afrika Barat (Abubakar, 2020).

Peran diplomasi negara-negara mayoritas Muslim juga terlihat dalam hubungan mereka dengan organisasi internasional seperti PBB. Banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Turki, berperan aktif dalam misi-misi perdamaian PBB dan inisiatif pembangunan global, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kerjasama internasional dan perdamaian dunia (Anwar, 2022). Sebagai tambahan, negara-negara Muslim juga terlibat dalam diplomasi pendidikan dan budaya, dengan mendirikan berbagai program beasiswa dan pertukaran pelajar untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya. Program-program ini berfungsi untuk memperkuat hubungan diplomatik antar negara dan menciptakan jaringan kerjasama di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan seni (Al-Rasheed, 2019).

Di lain sisi, negara-negara mayoritas Muslim sering kali menghadapi tantangan dalam diplomasi internasional, terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan beragama. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Iran, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas catatan hak asasi manusia mereka. Meskipun demikian, negara-negara ini tetap berperan aktif dalam diplomasi global dan berusaha menavigasi kritik tersebut dengan memperkuat hubungan dengan sekutu regional dan global mereka (Khashan, 2020).

Secara keseluruhan, peran negara-negara mayoritas Muslim dalam diplomasi internasional sangat kompleks dan beragam. Negara-negara ini tidak hanya berperan dalam hubungan bilateral dan multilateral, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai Islam dalam tatanan internasional. Melalui diplomasi politik, ekonomi, dan budaya, negara-negara mayoritas Muslim terus membangun pengaruh mereka di panggung global, meskipun dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal yang signifikan (Mahmood, 2021).

C. Peran Diplomasi Islam dalam Menangani Konflik di Timur Tengah

Timur Tengah telah menjadi pusat berbagai konflik besar yang melibatkan sejumlah negara Muslim, termasuk Suriah dan Yaman. Diplomasi Islam telah memainkan peran penting dalam upaya

meredakan ketegangan dan memfasilitasi perdamaian di kawasan ini. Negara-negara Muslim, baik melalui organisasi internasional seperti OKI maupun melalui diplomasi bilateral, telah berusaha menawarkan solusi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam mengenai perdamaian, dialog, dan mediasi (Sunnah & Ibrahim, 2018). Dalam konteks ini, negara-negara Muslim telah menjadi mediator kunci dalam proses perdamaian di Suriah dan Yaman, meskipun tantangan politik dan sektarian sering kali memperumit upaya diplomasi tersebut.

Konflik di Suriah yang dimulai pada 2011 dan Yaman yang dimulai pada 2015, masing-masing telah menciptakan ketegangan regional yang melibatkan berbagai negara Muslim. Dalam kedua kasus, diplomasi Islam memainkan peran utama dalam mencoba menengahi solusi damai. Negara-negara seperti Turki, Qatar, dan Iran, yang memiliki pengaruh politik dan agama di kawasan tersebut, telah aktif dalam melakukan mediasi (Al-Rasheed, 2020). Namun, pendekatan diplomasi Islam ini sering kali diwarnai oleh perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan sektarian di antara negara-negara tersebut.

Diplomasi Islam sendiri memiliki akar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam mengenai penyelesaian konflik. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya perdamaian dan resolusi konflik melalui dialog dan mediasi (Qur'an, 4:58), dan banyak ulama serta pemimpin Muslim merujuk pada ajaran ini dalam upaya mereka untuk memfasilitasi proses perdamaian di Timur Tengah. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini seringkali berhadapan dengan realitas politik di lapangan, yang melibatkan persaingan kekuatan regional dan kepentingan geopolitik yang kompleks (Zartman, 2016).

Di Suriah, Turki telah berperan sebagai salah satu negara Muslim utama yang terlibat dalam diplomasi perdamaian. Sebagai negara dengan kepentingan langsung di perbatasannya, Turki secara aktif terlibat dalam upaya mediasi antara berbagai kelompok oposisi Suriah dan pemerintah Bashar al-Assad. Selain itu, Turki telah menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi Suriah dan berusaha mendorong solusi politik yang damai di bawah payung diplomasi internasional (Cagaptay, 2017). Meskipun demikian, posisi Turki yang sering kali dipandang pro-oposisi membuatnya sulit untuk

mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Iran, sebagai negara mayoritas Syiah, memiliki pengaruh yang signifikan dalam konflik Suriah karena dukungannya terhadap rezim Assad, yang juga didominasi oleh kelompok Alawi, cabang dari Syiah. Dalam konteks diplomasi Islam, Iran memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah Suriah, baik secara militer maupun diplomatik (Goodarzi, 2018). Namun, dukungan Iran untuk Assad seringkali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Sunni seperti Arab Saudi, yang mendukung kelompok oposisi Suriah. Konflik sektarian ini menjadi salah satu tantangan utama bagi diplomasi Islam di kawasan tersebut.

Di Yaman, konflik antara pemberontak Houthis yang didukung oleh Iran dan pemerintah yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi telah menciptakan dinamika diplomasi yang kompleks. Arab Saudi, sebagai kekuatan Sunni terkemuka, memandang konflik ini sebagai bagian dari pertempuran lebih luas untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut (Al-Mughni & Altorki, 2021). Dalam hal ini, diplomasi Islam Arab Saudi berfokus pada membangun aliansi dengan negara-negara Muslim lainnya untuk mendukung intervensi militer di Yaman, meskipun upaya diplomatik juga dilakukan untuk mengakhiri konflik melalui mediasi.

Qatar juga memainkan peran penting dalam diplomasi Islam di kawasan Timur Tengah. Meskipun kecil secara geografis, Qatar memiliki pengaruh diplomatik yang signifikan melalui dukungannya terhadap kelompok-kelompok tertentu di Suriah dan hubungannya dengan Iran. Qatar telah berulang kali menawarkan mediasi dalam konflik Suriah dan Yaman, sering kali bekerja melalui saluran diplomatik dan organisasi internasional seperti OKI (Roberts, 2020). Namun, blokade diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 2017 menambah kompleksitas diplomasi Qatar di kawasan tersebut.

Sementara, OKI sebagai organisasi terbesar yang mewakili negara-negara Muslim, telah berupaya memainkan peran mediasi dalam berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk Suriah dan Yaman. Organisasi ini secara rutin mengeluarkan pernyataan yang

menyerukan gencatan senjata dan dialog damai (Khoury, 2021). Meskipun demikian, efektivitas OKI dalam memfasilitasi perdamaian sering kali terbatas oleh perpecahan internal di antara anggotanya, terutama karena adanya perbedaan kepentingan sektarian dan geopolitik antara negara-negara anggota utama seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki.

Peran diplomasi Islam dalam konflik Yaman juga mencerminkan dinamika yang kompleks antara aktor-aktor Muslim di wilayah tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontak Houthi, sementara Iran diduga mendukung Houthi secara militer dan logistik (Juneau, 2016). Peran Iran dalam diplomasi Islam di Yaman memang sering kali dipandang kontroversial, karena banyak negara Muslim lainnya melihat dukungan Iran untuk Houthi sebagai bagian dari ekspansionisme Syiah di kawasan tersebut. Meski demikian, Iran secara konsisten menyatakan bahwa mereka mendukung penyelesaian damai melalui dialog politik, di mana Iran telah terlibat dalam beberapa putaran negosiasi internasional mengenai konflik Yaman (Goodarzi, 2018). Keterlibatan Iran menunjukkan bahwa diplomasi Islam tidak selalu seragam, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologis. Selain Iran, Turki juga memainkan peran dalam diplomasi Islam yang terkait dengan konflik di Yaman, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Turki lebih berfokus pada bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya perdamaian yang dipimpin oleh PBB, sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan Arab Saudi dan Iran (Cagaptay, 2017). Diplomasi Turki di kawasan ini menunjukkan bahwa negara-negara Muslim dapat mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dalam menyelesaikan konflik.

Terkait situasi ini, diplomasi Islam dipandang menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh persaingan sektarian dan geopolitik antara negara-negara Sunni dan Syiah, sehingga berpotensi memperburuk upaya untuk mencapai solusi damai. Meskipun terdapat perpecahan ini, upaya diplomasi Islam terus dilakukan. Misalnya, Kuwait, sebagai negara kecil dengan kebijakan luar negeri yang netral, telah beberapa kali menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik Yaman (Nonneman, 2018). Peran Kuwait sebagai

mediator netral menunjukkan bahwa negara-negara Muslim yang lebih kecil dapat memainkan peran penting dalam proses diplomasi Islam dengan menawarkan jalur dialog yang tidak terpengaruh oleh persaingan kekuatan besar.

Selain negara-negara Muslim, aktor non-pemerintah juga memainkan peran dalam diplomasi Islam. Misalnya, ulama dan pemimpin agama telah mempromosikan dialog antar kelompok yang bertikai berdasarkan ajaran Islam tentang perdamaian dan rekonsiliasi (Al-Sabah, 2020). Peran mereka sebagai mediator non-politik telah memberikan alternatif bagi diplomasi formal yang terkadang terhambat oleh kepentingan geopolitik. Pada akhirnya, diplomasi Islam di Timur Tengah menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, negara-negara Muslim dan organisasi internasional berbasis Islam terus memainkan peran dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan ini. Meskipun hasilnya sering kali terbatas oleh kompleksitas politik dan sektarian, upaya diplomasi ini mencerminkan komitmen untuk menemukan solusi yang damai dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

D. Tantangan dan Peluang bagi Diplomasi Islam dalam Dunia Kontemporer

Diplomasi Islam telah menjadi salah satu instrumen penting dalam politik global, terutama bagi negara-negara mayoritas Muslim yang terlibat dalam isu-isu internasional terkait umat Islam. Pada abad ke-21, diplomasi Islam menghadapi berbagai tantangan baru yang sifatnya transnasional, namun pada saat yang sama, terdapat pula peluang signifikan untuk berperan lebih aktif dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia. Era globalisasi dan percepatan arus informasi yang menyertainya telah mengubah lanskap diplomasi, termasuk diplomasi Islam. Globalisasi menuntut negara-negara Muslim untuk menyesuaikan identitas dan kebijakan luar negeri mereka agar tetap relevan di dunia yang semakin terhubung, namun juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman ketika berhadapan dengan ide-ide global yang cenderung sekuler (Qodir, 2020).

Salah satu tantangan terbesar bagi diplomasi Islam adalah stigma radikalisme dan ekstremisme yang seringkali melekat pada Islam. Meskipun sebagian besar umat Muslim tidak terlibat dalam tindakan radikal, persepsi ini tetap memengaruhi hubungan diplomatik negara-negara Muslim dengan dunia internasional. Negara-negara Barat, khususnya, cenderung mengaitkan tindakan kelompok ekstremis dengan Islam secara keseluruhan, sehingga menciptakan hambatan bagi dialog yang konstruktif di tingkat global (Huntington, 2018; Alshamsi, 2021). Hal ini diperburuk dengan meningkatnya Islamofobia di berbagai negara Barat, yang kerap menimbulkan kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim. Akibatnya, negara-negara Muslim sering kali berada dalam posisi defensif, berusaha memulihkan citra Islam dan membangun diplomasi yang inklusif dengan negara-negara non-Muslim (Bayrakli & Hafez, 2019).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah fragmentasi internal dalam dunia Islam. Konflik sektarian, perpecahan politik, serta perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara Muslim sering kali menghambat upaya diplomasi kolektif. Kompetisi kekuasaan antara negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki menunjukkan bagaimana dinamika internal dunia Islam dapat menjadi penghalang bagi solidaritas dan sinergi diplomatik (Mandaville, 2017). Situasi ini diperparah dengan lemahnya institusi diplomasi Islam yang mampu memediasi konflik tersebut. Meskipun OKI telah berdiri sejak 1969, efektivitasnya dalam menangani isu-isu internal dunia Islam masih dipertanyakan, terutama ketika negara-negara anggota lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka (Akgün & Vural, 2020).

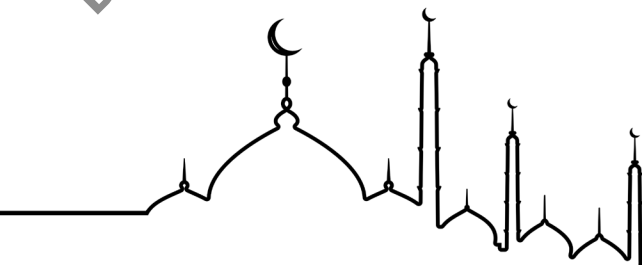
Selain tantangan dari dalam, diplomasi Islam juga menghadapi pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, dan China. Negara-negara Muslim sering kali harus menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka dengan dinamika yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar ini. Dalam banyak kasus, negara-negara Muslim berada pada posisi dilematis: di satu sisi harus menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar, namun di sisi lain, mereka dituntut untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam (Hamid, 2019). Ketergantungan ekonomi dan keamanan terhadap

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.**

BAB III

ISLAM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Keterlibatan negara-negara Muslim dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memainkan peran yang signifikan dalam membentuk tatanan global saat ini. Melalui partisipasi aktif di berbagai forum internasional, negara-negara Muslim turut serta dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan isu-isu global, mulai dari perdamaian dan keamanan hingga keadilan sosial. Organisasi Islam bukan hanya memiliki kontribusi besar dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keamanan global, tetapi juga mengambil berbagai inisiatif untuk mencegah konflik, mediasi dalam proses perdamaian, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Ajaran Islam sendiri telah memberi sumbangsih dalam penanganan isu-isu global kontemporer seperti perubahan iklim, krisis pengungsi, dan konflik antarnegara, di mana nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan bagi keterlibatan dalam mencari solusi kolektif. Peran negara-negara Muslim dalam kancah internasional menunjukkan bahwa Islam, sebagai agama dan sistem nilai, memiliki pengaruh besar dalam menghadapi tantangan dunia modern.



A. Kontribusi Islam dalam Isu-Isu Global

Islam sebagai agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai isu global, termasuk perubahan iklim, pengungsi, dan konflik. Prinsip-prinsip dalam ajaran Islam terkait dengan keadilan sosial, pemeliharaan lingkungan, dan perdamaian menjadi landasan penting bagi keterlibatan umat Islam dan negara-negara Muslim dalam mengatasi tantangan global ini. Salah satu bentuk kontribusi Islam yang terlihat jelas adalah dalam isu perubahan iklim, di mana konsep *khalifah* atau pengelola bumi dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam (Nasr, 2018).

Dalam isu perubahan iklim, negara-negara mayoritas Muslim semakin menunjukkan komitmen mereka dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan negara-negara Teluk, melalui platform multilateral seperti OKI, telah terlibat dalam diskusi global mengenai mitigasi perubahan iklim (Hefner, 2020). OKI sendiri telah mempromosikan tindakan kolektif di antara anggotanya untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Islam juga memiliki tradisi panjang dalam hal perlindungan lingkungan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak referensi tentang pentingnya menjaga bumi dan alam sebagai bentuk ibadah. Konsep *mizan* atau keseimbangan dalam Islam mendorong umat Muslim untuk hidup selaras dengan alam dan tidak melakukan kerusakan di bumi (Esposito, 2019). Dalam konteks modern, banyak organisasi berbasis Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang telah terlibat dalam kampanye kesadaran lingkungan dan aksi iklim. Salah satu organisasi yang berkontribusi dalam isu lingkungan adalah *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES), yang berfokus pada pendidikan lingkungan dan advokasi perubahan iklim berdasarkan ajaran Islam. Organisasi ini telah memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan tentang tanggung jawab lingkungan di kalangan umat Islam global, serta mempromosikan solusi yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Ali, 2018).

Di sisi lain, masalah pengungsi juga menjadi isu global yang semakin penting di dunia Islam, khususnya dengan meningkatnya krisis pengungsi akibat konflik di Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Islam secara jelas mengajarkan tentang kewajiban umat Muslim untuk melindungi dan membantu mereka yang membutuhkan, termasuk pengungsi. Prinsip *zakat* dan *sadaqah* dalam Islam mendorong umat Muslim untuk berbagi kekayaan dan sumber daya mereka dengan orang-orang yang kurang beruntung (Khan, 2017). Negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, Yordania, dan Lebanon telah menerima jutaan pengungsi dari Suriah dalam beberapa dekade terakhir, yang mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan pengungsi. Sebagai negara dengan populasi pengungsi terbesar di dunia, Turki telah menjadi pemimpin dalam membantu pengungsi Suriah, memberikan tempat perlindungan, pendidikan, dan akses kesehatan, yang semuanya didorong oleh nilai-nilai Islam terkait kemanusiaan dan solidaritas (Roy, 2020). OKI juga telah berupaya untuk merespon krisis pengungsi melalui inisiatif-inisiatif yang melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Melalui berbagai forum internasional, OKI telah menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap pengungsi Muslim dan menekankan perlunya solidaritas antarnegara Muslim dalam menangani masalah pengungsi (Brown, 2019).

Dalam konteks konflik, Islam memiliki pendekatan yang sangat jelas terkait dengan perdamaian dan penyelesaian sengketa. Islam mengajarkan bahwa perang harus dihindari kecuali dalam kondisi di mana keamanan umat Muslim terancam, dan bahkan dalam konflik, prinsip-prinsip seperti melindungi warga sipil dan mencari solusi damai harus diutamakan (Kamrava, 2020). Konsep *sulh* atau perdamaian dalam Islam mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa negara Muslim yang memainkan peran mediator dalam konflik regional. Negara-negara Muslim seperti Qatar dan Oman telah dikenal sebagai mediator dalam beberapa konflik regional, termasuk konflik di Yaman dan Afghanistan. Diplomasi Qatar dalam proses perdamaian Afghanistan, misalnya, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian dan keadilan dapat diterapkan dalam

penyelesaian konflik modern (Esposito, 2019). Dalam hal ini, kontribusi Islam dalam menyelesaikan konflik menjadi semakin relevan di tengah ketegangan global yang terus meningkat. Organisasi seperti Liga Arab dan Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) juga terlibat dalam mediasi konflik di kawasan Timur Tengah. Liga Arab sering kali berperan sebagai fasilitator dialog antarnegara yang berkonflik, meskipun sering kali menghadapi tantangan internal yang menghambat efektivitasnya (Peterson, 2021). Meskipun demikian, prinsip-prinsip Islam tetap menjadi landasan dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh negara-negara Muslim.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Muslim juga semakin aktif dalam memperjuangkan keadilan iklim di berbagai forum internasional. Banyak negara Muslim, terutama yang berada di kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah, telah menyadari bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga perdamaian dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, keterlibatan negara-negara Muslim dalam negosiasi iklim global menjadi sangat penting (Nasr, 2018). Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh OKI dan lembaga-lembaga Islam lainnya telah menekankan pentingnya solidaritas antarnegara Muslim dalam menghadapi tantangan iklim. Di samping itu, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang mulai menyuarakan pentingnya aksi iklim yang berbasis pada ajaran Islam, dengan menekankan bahwa menjaga keseimbangan alam merupakan tanggung jawab umat Muslim (Hefner, 2020).

Peran umat Islam dalam isu pengungsi juga semakin terlihat dalam konteks globalisasi, di mana banyak Muslim yang hidup di diaspora terlibat dalam upaya kemanusiaan untuk membantu pengungsi. Berbagai lembaga bantuan Muslim internasional seperti *Islamic Relief* dan *Muslim Aid* telah memberikan kontribusi signifikan dalam membantu pengungsi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di Eropa dan Amerika Utara (Brown, 2019).

Sebagai agama yang memiliki pengaruh besar di berbagai belahan dunia, Islam memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pengungsi, dan konflik. Namun, keterlibatan ini juga memerlukan dukungan dari komunitas internasional, termasuk kerjasama antara negara-negara Muslim dan organisasi global seperti PBB, untuk memastikan bahwa kontribusi Islam dapat memberikan dampak yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi Islam dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, pengungsi, dan konflik mencerminkan ajaran dasar agama ini tentang keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab. Melalui organisasi-organisasi Islam dan negara-negara Muslim, ajaran-ajaran ini diterapkan dalam konteks modern untuk menangani tantangan global yang kompleks. Dengan semakin meningkatnya peran Islam di kancah global, diharapkan nilai-nilai Islam yang universal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

B. Keterlibatan Negara-Negara Muslim dalam Berbagai Organisasi Internasional

Keterlibatan negara-negara Muslim dalam berbagai organisasi internasional mencerminkan peran aktif mereka dalam memperjuangkan kepentingan bersama di kancah global. Salah satu organisasi yang menjadi wadah penting bagi negara-negara Muslim adalah PBB. Negara-negara Muslim, sebagai bagian dari komunitas global, berpartisipasi dalam PBB untuk memperjuangkan isu-isu global seperti perdamaian, keamanan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan (Brown, 2019). Keanggotaan negara-negara Muslim di PBB ini memberikan akses ke forum internasional yang penting untuk pengambilan keputusan terkait berbagai isu dunia.

Di PBB, negara-negara Muslim terlibat dalam berbagai mekanisme, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-badan khusus lainnya seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan UNHCR. Mereka menggunakan platform ini untuk memperjuangkan kepentingan dunia Muslim serta berpartisipasi dalam diskusi global mengenai isu-isu seperti konflik, kemiskinan, dan pengungsi (Ali, 2018). Partisipasi negara-negara Muslim dalam proses diplomasi multilateral telah memberikan

mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam penciptaan resolusi damai atas berbagai konflik yang melibatkan negara-negara Muslim maupun lainnya (Acharya, 2021).

Selain PBB, keterlibatan negara-negara Muslim juga terlihat dalam OKI, yang secara khusus dirancang untuk mengkoordinasikan posisi negara-negara Muslim dalam isu-isu global dan regional. OKI, yang terdiri dari 57 negara anggota, merupakan organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB dan berperan dalam memperkuat solidaritas antara negara-negara Muslim (Esposito, 2019). OKI berfungsi sebagai platform diplomasi di mana negara-negara Muslim dapat bekerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi dan budaya (Khan, 2017).

Salah satu peran utama OKI adalah dalam menanggapi konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, seperti konflik di Palestina, Kashmir, dan Suriah. OKI berusaha memediasi dan mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, meskipun tantangan besar dalam menyatukan pandangan negara-negara anggotanya tetap ada (Kamrava, 2020). Keterlibatan OKI dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, misalnya, menunjukkan bahwa negara-negara Muslim berupaya untuk memajukan perdamaian di kawasan tersebut meski menghadapi tekanan politik yang kompleks.

Selain PBB dan OKI, banyak negara-negara Muslim juga tergabung dalam organisasi regional dan internasional lainnya, seperti Liga Arab dan GCC. Liga Arab, yang didirikan pada tahun 1945, berfungsi sebagai forum untuk negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya Muslim, dengan tujuan memajukan kerja sama politik dan ekonomi di antara negara-negara anggotanya (Peterson, 2021). Meski Liga Arab sering dikritik karena kurang efektif dalam menangani konflik di antara anggotanya, organisasi ini tetap memainkan peran penting dalam membangun solidaritas antar-negara Arab. Sementara GCC, yang terdiri dari enam negara di kawasan Teluk, lebih berfokus pada isu-isu ekonomi dan keamanan. Negara-negara Muslim di kawasan ini berkolaborasi melalui GCC untuk mengatasi tantangan keamanan regional, termasuk ancaman dan konflik yang berkaitan dengan terorisme (Nasr, 2018). Kerjasama di antara negara-negara Muslim dalam GCC memperlihatkan

pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi tantangan geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks di Timur Tengah.

Di luar OKI, negara-negara Muslim juga memainkan peran penting dalam organisasi internasional lain yang bersifat non-sektarian, seperti Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IsDB*). IsDB mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim dan membantu dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pendidikan (Esposito, 2019). Dengan berfokus pada prinsip syariah dalam keuangan, IsDB menjadi contoh penting bagaimana negara-negara Muslim dapat berkontribusi pada sistem keuangan global melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai

Di bidang perubahan iklim, negara-negara Muslim juga telah berpartisipasi aktif dalam *Conference of The Parties* (COP) di bawah Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). Banyak negara Muslim yang menghadapi dampak signifikan dari perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, kekeringan, dan banjir, sehingga mereka memiliki kepentingan besar dalam mencari solusi global untuk masalah ini (Acharya, 2021). Sebagai contoh, negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Mesir telah berkomitmen pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan berpartisipasi aktif dalam negosiasi COP (Roy, 2020).

Selain itu, keterlibatan negara-negara Muslim dalam *Group of 20* (G-20) juga menunjukkan peran mereka dalam ekonomi global. Indonesia, Turki, dan Arab Saudi adalah contoh negara-negara Muslim yang menjadi anggota G-20 dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan ekonomi global yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan stabilitas keuangan (Peterson, 2021). Keterlibatan negara-negara Muslim dalam G-20 penting dalam upaya mereka untuk memperjuangkan agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di dunia Muslim.

Keterlibatan negara-negara Muslim dalam berbagai organisasi internasional ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya persatuan di antara negara-negara Muslim itu sendiri. Meski berbagi identitas agama yang sama, perbedaan politik, ekonomi, dan sosial sering kali menjadi hambatan

bagi kerja sama yang lebih erat (Roy, 2020). Konflik regional, seperti perselisihan antara Arab Saudi dan Iran, juga memperburuk situasi dan menghambat upaya kolaboratif di forum internasional. Meskipun demikian, peluang bagi negara-negara Muslim untuk memperkuat pengaruh di organisasi internasional tetap ada. Dengan populasi Muslim yang terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika, negara-negara Muslim memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan global yang lebih adil dan inklusif (Hefner, 2020). Selain itu, meningkatnya permintaan untuk solusi berbasis nilai-nilai keadilan dan solidaritas juga memberikan ruang bagi negara-negara Muslim untuk memperkuat diplomasi mereka di tingkat internasional (Nasr, 2018).

Sebagai kesimpulan, keterlibatan negara-negara Muslim dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, OKI, dan lainnya, memainkan peran penting dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan bersama di kancah global. Meski tantangan besar masih ada, peluang untuk meningkatkan pengaruh negara-negara Muslim dalam organisasi internasional tetap terbuka, terutama melalui kerja sama yang lebih erat di antara mereka dan penggunaan forum internasional untuk memperjuangkan isu-isu global yang relevan

C. Keterlibatan Negara-Negara Muslim dalam Kelompok G-20

Kelompok G-20, sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional, melibatkan berbagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Di antara anggota-anggota G-20, beberapa negara Muslim berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi global. Negara-negara Muslim yang berpartisipasi dalam G-20 termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Turki, memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak hanya berdampak pada negara mereka sendiri tetapi juga pada dunia Islam dan negara-negara berkembang lainnya (Pfeiffer, 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran kunci dalam G-20. Sejak menjadi anggota G-20 pada 1999, Indonesia telah aktif mendorong agenda yang lebih inklusif dalam kebijakan ekonomi global. Indonesia sering

mengadvokasi isu-isu seperti ketahanan pangan, pertumbuhan inklusif, dan ekonomi hijau, yang relevan tidak hanya untuk negara-negara Muslim tetapi juga untuk negara-negara berkembang lainnya (Nasution, 2019). Partisipasi Indonesia di G-20 menunjukkan bagaimana negara Muslim dapat menjadi jembatan antara dunia Islam dan komunitas internasional dalam forum ekonomi global.

Arab Saudi, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Timur Tengah, juga memainkan peran sentral dalam G-20. Negara ini memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan energi global, terutama mengingat perannya sebagai eksportir minyak terbesar di dunia. Melalui G-20, Arab Saudi telah berusaha untuk mendorong stabilitas pasar energi global dan memperkuat kerja sama di antara negara-negara produsen minyak (Al-Sheikh, 2020). Arab Saudi juga berusaha untuk menggunakan posisinya dalam G-20 untuk mempromosikan reformasi ekonomi domestik, seperti yang tercantum dalam visi ambisiusnya, *Vision 2030*.

Turki, sebagai negara Muslim yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, juga memiliki peran strategis dalam G-20. Sebagai salah satu dari sedikit negara Muslim yang memiliki ekonomi berkembang pesat, Turki sering menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi global, reformasi institusi keuangan internasional, dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi (Cagaptay, 2020). Dengan letak geografisnya yang strategis dan ekonomi yang berkembang, Turki menjadi penghubung antara dunia Barat dan dunia Islam di dalam G-20.

Negara-negara Muslim yang tergabung dalam G-20 ini juga memberikan perhatian besar pada masalah pembangunan dan inklusi sosial. Indonesia, Arab Saudi, dan Turki sering kali memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang lainnya dalam diskusi G-20, menekankan perlunya peningkatan akses ke sumber daya keuangan, perdagangan, dan teknologi (Hassan, 2018). Negara-negara ini juga mendorong agar kebijakan-kebijakan G-20 mencakup strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

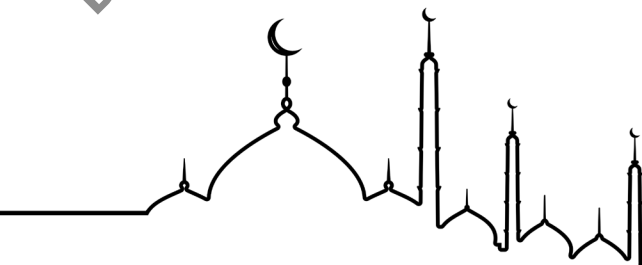
Selain agenda ekonomi, partisipasi negara-negara Muslim di G-20 juga penting dalam konteks diplomasi global. Melalui partisipasi dalam G-20, negara-negara Muslim dapat meningkatkan

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.**

BAB IV

ISLAM DAN HUBUNGAN BILATERAL

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim mencerminkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam banyak kasus, interaksi ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan nasional dan prinsip-prinsip agama, namun juga menawarkan peluang besar untuk kerjasama. Faktor geopolitik sering kali menjadi penggerak utama dalam membentuk hubungan tersebut, tetapi faktor lain seperti perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya juga berperan penting. Potensi kerjasama di berbagai bidang, termasuk energi, pendidikan, dan kesehatan, sering kali diimbangi dengan tantangan seperti perbedaan ideologi, masalah keamanan regional, dan dinamika global. Studi kasus yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim akan mengungkapkan bagaimana hubungan ini dapat menjadi model atau, dalam beberapa hal, sumber ketegangan, tergantung pada konteks dan kondisi politik yang mendasarinya.



A. Faktor-Faktor dalam Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim: Politik, Ekonomi, dan Keamanan

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup politik, ekonomi, dan keamanan. Kompleksitas hubungan ini tidak hanya didasarkan pada sejarah dan ideologi, tetapi juga pada kepentingan praktis dalam menjaga stabilitas regional dan global. Faktor-faktor politik sering kali menjadi penggerak utama dalam hubungan ini, di mana perbedaan ideologi, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai budaya antara negara mayoritas Muslim dan non-Muslim memainkan peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Brown (2018) menyebutkan bahwa perbedaan ideologis dapat menyebabkan gesekan politik yang mendalam, terutama dalam isu-isu seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Faktor ekonomi juga memiliki dampak besar terhadap hubungan bilateral. Negara-negara mayoritas Muslim yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, menjadi mitra strategis bagi negara-negara non-Muslim yang membutuhkan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Ketergantungan negara-negara Barat pada energi dari Timur Tengah telah memperkuat hubungan ekonomi di antara mereka, meskipun perbedaan politik sering kali menyebabkan ketegangan. Perdagangan lintas batas dan investasi asing juga memainkan peran penting dalam hubungan ini, di mana negara-negara Muslim dan non-Muslim saling membutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Acharya, 2017).

Selain itu, hubungan keamanan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral. Ancaman terorisme, kekerasan ekstremis, dan konflik regional di dunia Muslim sering kali mendorong negara-negara non-Muslim untuk terlibat dalam kerja sama keamanan dengan negara-negara mayoritas Muslim. Kerja sama keamanan ini sering kali didorong oleh kepentingan bersama dalam memerangi ancaman global seperti terorisme dan radikalisme. Hal ini terutama terlihat dalam hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Muslim di Timur Tengah, di mana kerja sama militer dan intelijen telah menjadi inti dari hubungan bilateral di antara

negara-negara ini (Kaldor, 2019). Meskipun demikian, hubungan yang terjalin ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik politik, seperti perang di Irak dan Afghanistan, telah menyebabkan keretakan dalam hubungan antara negara-negara Muslim dan non-Muslim, terutama terkait dengan persepsi dominasi Barat atas dunia Muslim. Intervensi militer Barat di negara-negara mayoritas Muslim sering kali dipandang sebagai bentuk imperialisme modern, yang memicu sentimen anti-Barat di kalangan masyarakat Muslim (Esposito, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa faktor politik dan keamanan sering kali saling terkait dan memengaruhi dinamika hubungan bilateral.

Peran organisasi internasional, seperti PBB dan OKI, juga memengaruhi hubungan antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Organisasi ini sering kali menjadi platform bagi negara-negara Muslim untuk memperjuangkan kepentingan kolektif mereka dalam isu-isu global, seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan konflik regional. Di lain sisi, keterlibatan negara-negara non-Muslim dalam organisasi internasional ini juga sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan multilateral (Yusuf, 2019).

Lebih lanjut, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi hubungan bilateral yang terjalin di antara negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Persepsi tentang Islam di negara-negara non-Muslim, terutama di Eropa dan Amerika Utara, sering kali dibentuk oleh media dan wacana politik yang mencitrakan Islam sebagai agama yang berhubungan dengan kekerasan dan ekstremisme. Saleem (2020) mengemukakan bahwa Islamofobia dan stereotip negatif terhadap umat Muslim sering kali menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang harmonis antara negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, diplomasi budaya menjadi alat penting dalam memperbaiki citra negara-negara Muslim di mata dunia internasional.

Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan iklim dan isu-isu lingkungan semakin menjadi pusat perhatian dalam hubungan bilateral ini. Negara-negara mayoritas Muslim yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti Bangladesh dan Maladewa, membutuhkan kerja sama dengan negara-negara non-Muslim untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Kerja sama lingkungan lintas

negara ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan bilateral, di mana negara-negara Muslim dan non-Muslim bekerja sama dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampak lingkungan (Stern, 2019).

Dalam konteks keamanan regional, banyak negara mayoritas Muslim berada di kawasan yang rawan konflik, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Konflik-konflik ini sering kali menarik keterlibatan negara-negara non-Muslim, baik dalam bentuk mediasi diplomatik maupun intervensi militer. Keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik di dunia Muslim sering kali dipicu oleh kepentingan geopolitik, seperti menjaga stabilitas energi dan mencegah penyebaran kekerasan ekstremis ke wilayah mereka sendiri (Hinnebusch, 2020). Oleh karena itu, keamanan regional menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan hubungan antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim.

Di sisi lain, kerja sama ekonomi juga menjadi pilar utama dalam hubungan bilateral ini. Negara-negara Muslim, terutama yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti minyak dan gas, sering kali menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara non-Muslim. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan dan investasi lintas batas antara negara-negara Muslim dan non-Muslim memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (Slaughter, 2018). Namun, hubungan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal di negara-negara mayoritas Muslim. Perubahan rezim, revolusi, dan ketidakstabilan politik di beberapa negara Muslim sering kali memengaruhi hubungan bilateral dengan negara-negara non-Muslim. Perubahan politik di negara-negara Muslim sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan luar negeri, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas hubungan bilateral (Barkawi, 2019).

Isu migrasi dan diaspora Muslim di negara-negara non-Muslim juga berperan dalam hubungan bilateral antara negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Komunitas Muslim yang besar di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan AS sering kali menjadi jembatan antara negara-negara mayoritas Muslim dan negara-negara non-Muslim. Namun, kebijakan imigrasi dan integrasi yang keras di beberapa negara non-Muslim dapat memicu ketegangan dan

memperburuk hubungan bilateral. Pew Research (2020) mencatat bahwa persepsi negatif terhadap imigran Muslim di negara-negara Barat sering kali mencerminkan dinamika politik yang lebih luas, di mana identitas nasional dan agama menjadi isu yang diperdebatkan. Dalam konteks ini, diplomasi budaya telah memainkan peran yang penting. Negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, sering kali menggunakan diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Muslim melalui promosi nilai-nilai Islam moderat dan dialog antaragama. Diplomasi budaya dipandang dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan bilateral.

Dalam perdagangan internasional, perjanjian dagang dan kesepakatan komersial antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim menjadi salah satu faktor utama yang menggerakkan hubungan bilateral. Kesepakatan ini sering kali mencakup berbagai sektor, mulai dari energi hingga teknologi, dan membantu menciptakan ikatan ekonomi yang lebih kuat antara negara-negara tersebut. Perjanjian dagang juga sering kali menjadi alat diplomasi yang efektif dalam meredakan ketegangan politik dan memperkuat kerja sama internasional (Bromley, 2020).

Secara keseluruhan, hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Meskipun perbedaan ideologi dan agama sering kali menimbulkan tantangan, kerja sama di bidang perdagangan, keamanan, dan diplomasi budaya dapat menjadi dasar bagi hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan di masa depan.

B. Potensi Kerjasama dan Tantangan dalam Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim menawarkan berbagai potensi kerja sama di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, budaya, hingga keamanan. Salah satu potensi terbesar yang dapat dieksplorasi adalah perdagangan dan

investasi. Negara-negara mayoritas Muslim, terutama di kawasan Timur Tengah, memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas yang menjadi daya tarik utama bagi negara-negara non-Muslim. Di sisi lain, negara-negara non-Muslim memiliki teknologi dan modal yang dapat diinvestasikan di sektor-sektor yang belum berkembang di negara-negara mayoritas Muslim. Kerja sama ekonomi lintas negara ini dapat menciptakan saling ketergantungan yang meningkatkan stabilitas hubungan bilateral (Esposito, 2016).

Selain itu, sektor pendidikan juga menawarkan potensi kerja sama yang signifikan. Banyak negara mayoritas Muslim memiliki populasi muda yang besar, sementara negara-negara non-Muslim sering kali memiliki sistem pendidikan yang maju dan dapat menawarkan peluang beasiswa, program pertukaran pelajar, dan pelatihan profesional. Hal ini tidak hanya membuka peluang pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga mempererat hubungan budaya dan sosial antara masyarakat di kedua kelompok negara (Yusuf, 2019). Melalui kolaborasi di bidang pendidikan, kedua pihak dapat saling bertukar ide dan memperluas wawasan global.

Di bidang keamanan, terdapat potensi kerja sama yang kuat dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan ekstremisme. Negara-negara mayoritas Muslim sering kali berada di garis depan dalam memerangi kelompok-kelompok ekstremis yang beroperasi di wilayah mereka. Kerja sama intelijen dan militer dengan negara-negara non-Muslim yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam menangani ancaman-ancaman ini. Keterlibatan dalam misi perdamaian internasional atau latihan militer bersama dapat meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di tingkat global (Hinnebusch, 2020).

Isu lingkungan juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan adalah tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional. Negara-negara mayoritas Muslim yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Asia Selatan, dapat bekerja sama dengan negara-negara non-Muslim dalam pengembangan teknologi hijau dan kebijakan adaptasi iklim (Stern, 2019). Kemitraan dalam pengelolaan

sumber daya air, energi terbarukan, dan penanggulangan bencana dapat meningkatkan kapasitas negara-negara mayoritas Muslim dalam menghadapi dampak lingkungan.

Di sisi lain, tantangan utama dalam hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim terletak pada perbedaan politik dan ideologis yang sering kali memicu ketegangan. Perbedaan dalam sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai budaya dapat menjadi sumber konflik. Negara-negara non-Muslim yang mendukung demokrasi liberal sering kali mengkritik negara-negara mayoritas Muslim yang masih menerapkan sistem pemerintahan otoriter atau memiliki kebijakan yang dianggap mengekang kebebasan beragama. Ketegangan ini dapat menghambat upaya kerja sama, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa kedaulatan mereka sedang dilanggar (Hefner, 2020). Selain itu, perbedaan dalam persepsi terhadap Islam juga menjadi tantangan besar. Di beberapa negara non-Muslim, Islam sering kali dipersepsikan secara negatif karena dikaitkan dengan terorisme dan kekerasan ekstremis. Stereotip negatif ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, dan pada gilirannya berpotensi menghambat upaya diplomasi yang lebih luas. Mengatasi Islamofobia dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam di negara-negara non-Muslim juga merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat kerja sama bilateral (Esposito, 2016).

Perbedaan kepentingan geopolitik juga menjadi tantangan signifikan. Negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim sering kali memiliki prioritas yang berbeda dalam hal kebijakan luar negeri. Misalnya, intervensi militer oleh negara-negara non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, seperti di Irak dan Afghanistan, telah menimbulkan rasa tidak percaya yang mendalam. Bagi banyak negara mayoritas Muslim, intervensi ini dipandang sebagai campur tangan asing yang bertentangan dengan kedaulatan nasional. Di sisi lain, negara-negara non-Muslim sering kali berpendapat bahwa keterlibatan mereka diperlukan untuk menjaga stabilitas regional dan mengatasi ancaman terorisme (Kaldor, 2019). Meskipun demikian, terdapat peluang dalam membangun kepercayaan melalui dialog dan diplomasi multilateral. Organisasi internasional seperti

PBB dan OKI menyediakan platform bagi negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim untuk berdialog dan mencari solusi atas masalah-masalah global yang dihadapi bersama. Forum-forum ini memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan yang konstruktif dan membantu mengurangi ketegangan dengan cara yang damai (Barkawi, 2019).

Tantangan lainnya adalah masalah ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Banyak negara mayoritas Muslim, terutama di Afrika dan Asia Selatan, masih berada dalam kategori negara berkembang, sementara negara-negara non-Muslim, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, memiliki ekonomi yang lebih maju. Ketidaksetaraan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan bilateral, di mana negara-negara non-Muslim mendominasi dalam hal kekuatan ekonomi dan politik. Untuk menciptakan hubungan yang lebih setara, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara mayoritas Muslim melalui bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan peningkatan perdagangan (Stern, 2019).

Migrasi juga merupakan isu sensitif dalam hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Gelombang migrasi dari negara-negara mayoritas Muslim ke negara-negara non-Muslim, terutama di Eropa, telah memicu perdebatan tentang integrasi, identitas nasional, dan keamanan. Krisis pengungsi dari negara-negara seperti Suriah dan Afghanistan telah memperlihatkan bahwa hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim dapat menjadi rumit ketika melibatkan isu migrasi. Negara-negara non-Muslim sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan populasi Muslim yang besar, sementara negara-negara mayoritas Muslim sering kali mengkritik kebijakan imigrasi yang dipandang diskriminatif (Hinnebusch, 2020).

Di bidang budaya, terdapat potensi besar untuk memperkuat hubungan melalui diplomasi budaya dan pertukaran antaragama. Banyak negara mayoritas Muslim memiliki warisan budaya yang kaya yang dapat dibagikan dengan dunia luar. Program pertukaran budaya, festival seni, dan dialog antaragama dapat membantu membangun jembatan pemahaman antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Inisiatif ini dapat membantu mengurangi prasangka

dan menciptakan ruang untuk kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang lainnya (Barkawi, 2019). Namun, terdapat pula tantangan di bidang ini terkait bagaimana menghadapi ketidakpahaman budaya yang sering kali memperburuk stereotip negatif. Pendidikan dan komunikasi yang lebih baik mengenai budaya dan agama masing-masing dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Negara-negara mayoritas Muslim dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan Islam sebagai agama yang damai dan toleran, sambil bekerja sama dengan negara-negara non-Muslim dalam program-program pendidikan dan media (Hefner, 2020).

Terakhir, dalam hal kerja sama teknologi, negara-negara mayoritas Muslim memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kemitraan dengan negara-negara non-Muslim yang maju di bidang teknologi. Pengembangan teknologi di bidang energi, infrastruktur, dan digitalisasi dapat memberikan manfaat besar bagi negara-negara Muslim yang tengah berupaya mengejar ketertinggalan dalam bidang ini. Tantangannya, bagaimanapun, adalah memastikan bahwa kerja sama teknologi ini dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak menciptakan ketergantungan yang merugikan negara-negara Muslim di masa depan (Yusuf, 2019).

C. Berbagai Dinamika Hubungan Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim memainkan peran penting dalam dinamika politik internasional. Salah satu contoh paling menonjol adalah hubungan antara Turki dan AS, yang berlandaskan kepentingan strategis meskipun terdapat ketegangan terkait kebijakan regional. Turki, sebagai negara mayoritas Muslim yang terletak di kawasan strategis, memiliki hubungan yang dinamis dengan negara-negara Barat. Hubungan ini sering kali diwarnai oleh perbedaan kebijakan luar negeri, terutama mengenai isu-isu seperti perang di Suriah dan dukungan AS terhadap pasukan Kurdi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kerjasama antara kedua negara dalam bidang militer, misalnya Turki sebagai anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), tetap menjadi landasan penting dalam hubungan bilateral yang terjalin (Altunışık, 2019).

Studi kasus lain yang relevan adalah hubungan antara Iran dan negara-negara Eropa, khususnya terkait program nuklir Iran. Negara-negara Eropa, melalui mekanisme seperti perjanjian nuklir Iran (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*), berusaha menjaga hubungan diplomatik yang stabil dengan Teheran meskipun ada tekanan dari sekutu mereka, AS, yang menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018. Upaya diplomasi Eropa untuk menjaga stabilitas regional dan menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah menunjukkan pentingnya hubungan bilateral ini (Pinfari, 2020). Meskipun hubungan tersebut sering kali mengalami ketegangan, tetapi terdapat potensi besar untuk kerjasama di bidang energi dan perdagangan.

Hubungan antara Arab Saudi dan negara-negara Barat juga menawarkan wawasan penting tentang dinamika hubungan bilateral yang terjalin. Arab Saudi, sebagai negara mayoritas Muslim dengan pengaruh ekonomi dan politik yang besar, memiliki hubungan erat dengan AS dan negara-negara Eropa, terutama dalam bidang energi dan keamanan. Namun, hubungan ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait isu hak asasi manusia dan keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman. Kritik ini memengaruhi persepsi publik terhadap hubungan bilateral tersebut, meskipun kepentingan ekonomi tetap menjadi faktor dominan yang mempertahankan kerjasama (Miller, 2019).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan China juga menarik untuk dikaji. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam hubungannya dengan China. Proyek infrastruktur besar-besaran yang dibiayai oleh China, seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), menjadi tulang punggung kerjasama ekonomi antara kedua negara. Namun, ketegangan muncul terkait isu-isu seperti sengketa Laut China Selatan dan sentimen domestik terhadap keberadaan pekerja asing dari China. Meskipun demikian, hubungan bilateral ini tetap kuat karena keuntungan ekonomi yang diharapkan dicapai oleh kedua belah pihak (Santoso, 2020).

Sementara itu, Pakistan dan India merupakan contoh lain dari hubungan bilateral yang sangat kompleks. Keduanya adalah tetangga dengan sejarah konflik yang panjang, terutama terkait

sengketa wilayah di Kashmir. Meskipun hubungan ini diwarnai oleh ketegangan militer dan diplomatik, terdapat juga upaya sporadis untuk meningkatkan dialog dan kerjasama, terutama dalam bidang perdagangan dan sumber daya air. Meskipun demikian, ketidakpercayaan dan ketegangan politik terus menjadi hambatan utama dalam hubungan bilateral antara dua negara tersebut (Chakma, 2018).

Hubungan bilateral antara Mesir dan Israel juga merupakan studi kasus yang penting. Setelah bertahun-tahun berkonflik, kedua negara mencapai perdamaian melalui Perjanjian *Camp David* pada tahun 1979. Sejak saat itu, Mesir dan Israel menjaga hubungan diplomatik yang stabil meskipun masyarakat Mesir sering kali skeptis terhadap normalisasi hubungan ini. Kerjasama dalam bidang keamanan dan intelijen terutama dalam menghadapi ancaman terorisme di Semenanjung Sinai menjadi salah satu alasan utama kelangsungan hubungan bilateral ini (Bahgat, 2019).

Turki dan Rusia juga menawarkan contoh menarik dari hubungan bilateral yang fluktuatif. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang hubungan yang terkadang bersifat kolaboratif dan di lain waktu penuh konflik. Ketegangan yang terjadi selama perang saudara Suriah menggambarkan kompleksitas hubungan ini, namun kerjasama dalam bidang energi, terutama proyek pipa gas *TurkStream*, menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dapat mengatasi perbedaan politik yang mendalam (Özdal, 2021).

Hubungan antara Qatar dan AS memberikan contoh lain dari dinamika bilateral yang kuat meskipun ada perbedaan dalam beberapa kebijakan regional. Qatar, sebagai tuan rumah pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah, memainkan peran penting dalam kebijakan pertahanan AS di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, kebijakan Qatar yang lebih mendukung kelompok-kelompok politik Islam di kawasan telah menimbulkan ketegangan dengan beberapa sekutu AS lainnya di kawasan Teluk (Ulrichsen, 2020).

Malaysia dan Australia menunjukkan bagaimana hubungan bilateral dapat berkembang meskipun ada perbedaan budaya dan agama yang signifikan. Kedua negara ini memiliki hubungan yang kuat dalam bidang pendidikan, dengan ribuan mahasiswa Malaysia

yang belajar di Australia setiap tahunnya. Selain itu, kerjasama dalam bidang keamanan dan penanggulangan terorisme juga menjadi pilar penting dalam hubungan bilateral ini. Walaupun demikian, isu-isu seperti hak asasi manusia dan kebijakan imigrasi terkadang menimbulkan ketegangan dalam hubungan ini (Gomez, 2019).

Studi kasus lain yang dapat dianalisis adalah hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Perancis. Kerjasama ini didorong oleh kepentingan ekonomi dan pertahanan, di mana Perancis memainkan peran penting sebagai pemasok utama senjata ke UEA. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri UEA yang proaktif di kawasan, termasuk keterlibatan mereka dalam konflik di Yaman dan Libya, terkadang menciptakan tantangan bagi hubungan bilateral ini, terutama di forum-forum internasional (Roberts, 2019).

Pada level yang lebih global, hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Jepang menyoroti pentingnya energi dalam dinamika hubungan antara negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Jepang sangat bergantung pada impor minyak dari Arab Saudi, dan ini mendorong kerjasama ekonomi yang kuat antara kedua negara. Namun, hubungan ini juga mengalami ketegangan, terutama terkait pandangan masyarakat Jepang terhadap kebijakan domestik Arab Saudi, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan represi politik (Katada, 2018).

D. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat: Contoh Kerjasama Strategis di Bidang Politik, Ekonomi, dan Keamanan

Dalam konteks hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim, hubungan antara Indonesia dan AS adalah salah satu contoh yang sangat signifikan. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menjalin hubungan yang dinamis dan kompleks dengan AS, negara dengan pengaruh besar dalam ekonomi dan politik global. Hubungan bilateral ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan, yang memberikan tantangan dan peluang bagi kerjasama yang lebih erat. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah melihat AS sebagai

mitra penting di panggung internasional, meskipun dinamika hubungan ini tidak selalu mulus (Weatherbee, 2013).

Pada era awal kemerdekaan, hubungan antara Indonesia dan AS sangat dipengaruhi oleh konstelasi Perang Dingin. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, AS melihat Indonesia sebagai wilayah strategis dalam upayanya membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Terutama setelah konfrontasi ideologis antara Presiden Soekarno yang condong ke blok Timur dan AS yang mewakili blok Barat, hubungan kedua negara sering kali fluktuatif. Namun, setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto, AS semakin mempererat hubungan dengan Indonesia dalam konteks kerjasama anti-komunisme (Rizal, 2015). Era Orde Baru ini menjadi periode di mana hubungan Indonesia-AS mencapai stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik.

Di ranah politik, pasca-reformasi tahun 1998, hubungan Indonesia dan AS memasuki babak baru dengan lebih menekankan pada kerjasama dalam mendukung demokratisasi. AS menganggap Indonesia sebagai contoh keberhasilan transisi demokrasi di negara mayoritas Muslim. Kedua negara sering melakukan dialog politik untuk membahas isu-isu internasional, termasuk hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjadi contoh penting bagi AS dalam upaya mempromosikan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia Tenggara (Hefner, 2000).

Di bidang ekonomi, Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan yang penting. AS adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, sementara Indonesia juga merupakan pasar penting bagi ekspor AS di kawasan Asia Tenggara. Volume perdagangan antara kedua negara mencakup berbagai sektor seperti minyak dan gas, produk pertanian, dan produk manufaktur. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan multinasional AS seperti Chevron dan ExxonMobil telah lama beroperasi di Indonesia, khususnya dalam sektor energi, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional (Suryadinata, 2017). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kebijakan perdagangan yang sering kali menjadi bahan perdebatan antara kedua negara, terutama mengenai akses pasar dan peraturan tarif yang dianggap tidak seimbang.

Kerjasama di bidang keamanan menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral Indonesia-AS. Sejak peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di AS, kerjasama kontra-terorisme antara kedua negara semakin intensif. AS melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara, terutama karena Indonesia juga menghadapi ancaman terorisme domestik dari kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah. Melalui bantuan teknis dan militer, AS mendukung Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kontra-terorisme, baik melalui pelatihan maupun transfer teknologi militer (Whitlock, 2016).

Dalam bidang lingkungan, kerjasama bilateral Indonesia-AS juga semakin penting, terutama terkait isu-isu seperti perubahan iklim dan deforestasi. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, yang menjadikannya sebagai aktor kunci dalam upaya global untuk mitigasi perubahan iklim. AS telah memberikan bantuan dalam bentuk dana dan teknologi untuk membantu Indonesia mengurangi deforestasi dan emisi karbon (Rabasa & Haseman, 2002). Namun, konflik antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering kali menjadi tantangan yang dihadapi kedua negara dalam kerjasama ini.

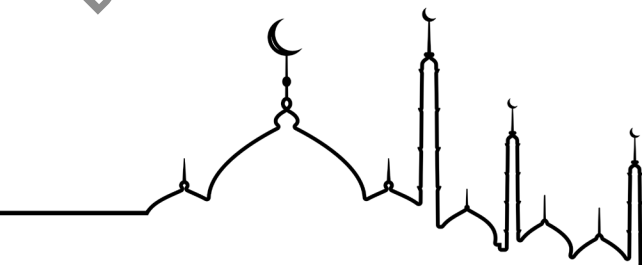
Dalam bidang kesehatan, pandemi COVID-19 menekankan pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan AS dalam memperkuat sistem kesehatan. AS berperan besar dalam membantu distribusi vaksin ke Indonesia melalui program-program seperti COVAX. Kerjasama di bidang kesehatan ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral yang lebih mendalam dalam menghadapi tantangan global (Whitlock, 2016).

Hubungan bilateral Indonesia-AS memang tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu isu sensitif yang sering kali menjadi hambatan adalah perbedaan kebijakan luar negeri AS dan Indonesia terkait konflik Israel-Palestina. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia telah lama mendukung hak-hak Palestina untuk merdeka, sementara AS memiliki kebijakan luar negeri yang lebih condong mendukung Israel. Ketegangan dalam isu ini sering kali memengaruhi sikap diplomatik Indonesia dalam forum internasional ketika menghadapi AS (Jackson & Pye, 1980). Meskipun demikian,

BAB V

ISLAM DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Terkait kajian mengenai keamanan internasional, peran Islam sering kali menjadi sorotan dalam konteks isu-isu penting seperti terorisme, konflik, dan pemeliharaan perdamaian. Penting untuk menggarisbawahi bahwa Islam tidak hanya dipandang sebagai faktor yang memicu ketegangan, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai yang mendorong stabilitas dan solusi damai. Keterlibatan umat Muslim dalam upaya memerangi ekstremisme dan membangun dialog antaragama mencerminkan komitmen yang kuat terhadap perdamaian global. Selain itu, berbagai inisiatif untuk mendorong toleransi lintas budaya menjadi krusial dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam arena internasional. Kontribusi Islam dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, terdapat potensi besar untuk kolaborasi dan pengembangan solusi yang efektif dalam konteks keamanan global.



A. Peran Islam dalam Isu-Isu Keamanan Internasional: Terorisme, Konflik, dan Pemeliharaan Perdamaian

Islam memainkan peran yang sangat penting dalam isu-isu keamanan internasional, terutama terkait dengan terorisme, konflik, dan pemeliharaan perdamaian. Sebagai agama yang dianut oleh lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, Islam mempengaruhi banyak aspek kehidupan global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Islam sering kali dikaitkan dengan isu terorisme akibat tindakan beberapa kelompok ekstremis yang menggunakan agama ini sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan mereka. Hal ini menciptakan persepsi negatif yang merugikan, di mana ajaran Islam secara keseluruhan digeneralisasi sebagai mendorong kekerasan. Padahal, kenyataannya adalah bahwa mayoritas umat Islam di seluruh dunia menentang terorisme dan kekerasan. Islam justru memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai perdamaian, keadilan, dan toleransi, yang jauh bertentangan dengan tindakan ekstremis yang sering diberitakan di media (Ali & Khan, 2020).

Radikalisasi dalam Islam tidak hanya terjadi akibat interpretasi ekstremis terhadap ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Marginalisasi politik, ketidakadilan ekonomi, dan intervensi asing di negara-negara Muslim sering kali menjadi penyebab utama radikalisasi (Hafez & Mullins, 2015). Misalnya, kelompok-kelompok yang merasa termarginalkan oleh pemerintah atau dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik lebih rentan untuk dipengaruhi oleh ideologi ekstremis. Namun, penting untuk dipahami bahwa radikalisasi ini bukanlah representasi dari Islam itu sendiri, melainkan respon terhadap kondisi sosial-politik yang kompleks.

Salah satu konsep dalam Islam yang sering disalahpahami di Barat adalah jihad. Dalam konteks teologis, jihad sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar perang. Jihad meliputi perjuangan spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan yang baik, bukan hanya perjuangan fisik. Sayangnya, kelompok-kelompok ekstremis telah memanipulasi konsep ini untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Jihad sejati dalam Islam lebih berkaitan dengan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kedamaian, bukan perang tanpa batas (Aslan, 2016).

Negara-negara Muslim, di sisi lain, memainkan peran penting dalam memerangi terorisme di tingkat global. Indonesia, misalnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengadopsi pendekatan moderat dalam melawan ekstremisme dan terorisme. Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara-negara lain dalam kampanye melawan terorisme internasional, sekaligus telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah radikalisasi di dalam negeri dengan mempromosikan Islam moderat. Pendekatan Indonesia ini berhasil dalam menjaga stabilitas internal sambil tetap berperan aktif dalam upaya keamanan global (Rizvi, 2019).

Selain itu, Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya perdamaian. Konsep *salam* dalam Islam, yang berarti perdamaian, adalah salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama ini. Al-Qur'an sendiri berisi banyak ajaran yang mendorong umat Muslim untuk hidup damai dan menghindari kekerasan. Islam mengajarkan pentingnya harmoni, baik di tingkat individu maupun masyarakat, dan bahwa kekerasan hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir ketika semua upaya perdamaian telah gagal (Esposito, 2018).

Dalam konteks konflik, Islam memberikan kerangka kerja yang sangat kuat untuk resolusi konflik. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya dialog, mediasi, dan kompromi sebagai sarana utama untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam setiap perselisihan, umat Islam diharapkan untuk mencari solusi damai terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penggunaan kekuatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mendorong perdamaian dan rekonsiliasi (Ramadan, 2017).

OKI juga memainkan peran penting dalam upaya resolusi konflik di dunia Muslim. Sebagai organisasi antar-pemerintah yang beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim, OKI sering kali terlibat dalam mediasi konflik, terutama di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, meskipun OKI menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran ini, keterlibatan OKI mencerminkan komitmen negara-negara Muslim terhadap perdamaian dan stabilitas regional (Ahmed, 2020). Kontribusi negara-negara Muslim dalam pemeliharaan perdamaian global juga patut dicatat. Banyak negara Muslim, seperti Bangladesh dan Pakistan, telah menjadi kontributor

utama dalam misi penjaga perdamaian PBB. Negara-negara ini tidak hanya berkontribusi dalam hal jumlah pasukan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam yang mendukung perdamaian dan stabilitas internasional (Malik, 2021).

Dalam upaya pencegahan radikalisasi, banyak negara Muslim seperti Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada pengajaran Islam moderat. Pendidikan Islam moderat ini memainkan peran kunci dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremis, terutama di kalangan generasi muda (Hasan, 2021). Di banyak negara Muslim, sekolah-sekolah kini juga mulai mengajarkan pentingnya pluralisme, toleransi, dan resolusi konflik secara damai sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Indonesia, dengan konsep Islam Nusantara-nya, adalah salah satu contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam untuk menciptakan model Islam yang moderat dan toleran. Islam Nusantara berhasil mempromosikan Islam yang damai dan mampu menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya pencegahan radikalisasi (Yusran, 2019).

Selain itu, keadilan sosial adalah salah satu elemen kunci dalam ajaran Islam yang dapat berkontribusi terhadap pencegahan konflik. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap yang tertindas, yang secara langsung dapat mengurangi ketegangan sosial yang sering kali menjadi pemicu konflik. Dalam hal ini, keadilan sosial dalam Islam adalah landasan penting bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan (Esposito, 2019). Islam juga memiliki tradisi diplomasi yang kuat dalam menyelesaikan konflik. Dalam banyak kasus, negara-negara Muslim telah terlibat dalam negosiasi internasional untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Kamali (2020) menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi Islam sering kali menekankan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendalam, yang berakar pada ajaran agama tentang keadilan dan perdamaian.

Di lain sisi, stigma yang mengaitkan Islam dengan terorisme masih menjadi tantangan besar. Meskipun mayoritas umat Islam menolak terorisme, persepsi negatif ini masih kuat di banyak masyarakat global. Keberadaan dialog antaragama dan diplomasi

budaya adalah cara yang efektif untuk mengatasi persepsi yang salah ini dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam sebagai agama yang mendukung perdamaian (Said, 2021). Inisiatif dialog antaragama, yang melibatkan pemimpin Muslim dan non-Muslim, memang telah memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Dialog semacam ini berpotensi besar dalam menyelesaikan konflik dan membangun jembatan antar-keyakinan yang berbeda (Ghobadzadeh, 2021).

Secara keseluruhan, Islam memiliki potensi besar untuk berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun sering dikaitkan dengan terorisme oleh beberapa pihak, banyak negara dan pemimpin Muslim yang aktif dalam memerangi radikalisme, mempromosikan perdamaian, serta berkontribusi dalam keamanan global. Dengan mendukung upaya-upaya pendidikan Islam moderat dan memperkuat dialog antaragama, komunitas internasional dapat membantu mendorong peran proaktif Islam dalam keamanan global.

B. Inisiatif Negara-Negara Islam dalam Meningkatkan Keamanan Siber

Keamanan siber telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur kritis di negara-negara Muslim semakin rentan terhadap ancaman siber. Oleh karena itu, negara-negara Muslim mulai mengembangkan strategi keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis mereka, seperti sektor energi, transportasi, dan sistem keuangan (Alotaibi, 2020).

Salah satu langkah awal dalam meningkatkan keamanan siber adalah dengan membangun kerangka regulasi yang kuat. Negara-negara Muslim mulai mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang dirancang khusus untuk mengatasi ancaman siber. Misalnya, Uni Emirat Arab (UEA) telah meluncurkan undang-undang keamanan siber yang bertujuan untuk melindungi informasi dan sistem kritis dari serangan siber (Alhaj, 2019). Regulasi ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam mengatasi ancaman siber. Banyak negara Muslim telah menjalin aliansi strategis dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam memerangi kejahatan siber. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah berupaya untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan siber dengan menyelenggarakan konferensi dan forum untuk membahas isu-isu terkait (Khan, 2021). Upaya ini diharapkan dapat membangun kapasitas negara-negara Muslim dalam menangani ancaman siber secara kolektif.

Investasi dalam teknologi juga merupakan aspek penting dalam strategi keamanan siber negara-negara Muslim. Banyak negara, seperti Arab Saudi dan UEA, telah mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan teknologi informasi dan keamanan siber. Arab Saudi, melalui Vision 2030, telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur digital dan keamanan siber, termasuk pembentukan pusat respon insiden siber (Siddiqui, 2018). Hal ini menunjukkan komitmen negara-negara Muslim untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat melindungi infrastruktur kritis mereka. Pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan siber juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan keamanan siber di negara-negara Muslim. Institusi pendidikan tinggi di negara-negara ini mulai menawarkan program studi yang berfokus pada keamanan siber dan teknologi informasi. Misalnya, beberapa universitas di Turki dan Mesir telah meluncurkan program-program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keamanan siber (Aydin, 2020). Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ini sangat penting untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.

Peran sektor swasta dalam meningkatkan keamanan siber juga tidak dapat diabaikan. Banyak negara Muslim telah mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan solusi keamanan siber. Kerjasama ini mencakup berbagi informasi tentang ancaman, pengembangan teknologi baru, dan penyediaan layanan keamanan siber (Mahmood, 2019). Dengan melibatkan sektor

swasta, negara-negara Muslim dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada untuk memperkuat pertahanan siber mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dalam meningkatkan keamanan siber adalah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Banyak individu dan organisasi masih mengabaikan praktik keamanan dasar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pembaruan perangkat lunak. Oleh karena itu, kampanye kesadaran publik yang menekankan pentingnya keamanan siber sangat diperlukan (Raza, 2021). Negara-negara Muslim perlu berinvestasi dalam program-program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan siber.

Dalam konteks geopolitik, ketegangan antara negara-negara dapat mempengaruhi keamanan siber. Negara-negara Muslim, terutama yang berada di kawasan yang rawan konflik, harus memperhatikan ancaman siber dari aktor negara lain. Misalnya, serangan siber terhadap infrastruktur kritis dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan stabilitas politik atau ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara Muslim untuk mengembangkan strategi keamanan siber yang mempertimbangkan dinamika geopolitik (Khan, 2021).

Beberapa negara Muslim juga telah meluncurkan pusat-pusat penelitian dan inovasi di bidang keamanan siber. Pusat-pusat ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru dan solusi yang dapat meningkatkan keamanan siber di kawasan tersebut. Misalnya, UEA telah mendirikan pusat penelitian keamanan siber yang berfokus pada pengembangan teknologi dan kebijakan keamanan (Hossain, 2020). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara-negara Muslim dalam merespon ancaman siber yang terus berkembang. Sebagai bagian dari strategi keamanan siber, negara-negara Muslim juga perlu memperkuat kerjasama regional. Dalam konteks ini, inisiatif keamanan siber dapat dilakukan melalui forum-forum regional yang melibatkan negara-negara Muslim. Forum-forum ini dapat menjadi platform untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan siber (Aziz, 2019). Melalui kerjasama regional, negara-negara Muslim dapat membangun jaringan pertahanan siber yang lebih kuat.

Salah satu contoh kerjasama regional dalam keamanan siber adalah inisiatif yang dilakukan oleh Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*). Negara-negara anggota GCC telah mengembangkan strategi keamanan siber bersama untuk melindungi infrastruktur kritis mereka. Kerja sama ini mencakup pelatihan, pertukaran informasi, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber di kawasan Teluk (Al-Hammadi, 2019). Inisiatif ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi ancaman siber.

Keamanan siber juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi. Negara-negara Muslim perlu membangun kerangka hukum yang memadai untuk menangani kejahatan siber dan melindungi privasi individu. Kebijakan yang jelas dan tegas dalam menghadapi kejahatan siber sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya (Saeed, 2021). Dalam konteks ini, kerjasama dengan lembaga internasional juga dapat membantu negara-negara Muslim dalam mengembangkan kebijakan yang efektif.

Singkatnya, pentingnya keamanan siber dalam konteks global tidak dapat diabaikan. Negara-negara Muslim perlu terlibat dalam diskusi dan kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman siber yang bersifat lintas batas. Melalui kerjasama internasional, negara-negara Muslim dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun kapasitas keamanan siber mereka (Ebrahimi, 2020). Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat pertahanan siber global dan melindungi infrastruktur kritis di seluruh dunia.

Dengan demikian, keberhasilan inisiatif negara-negara Muslim dalam meningkatkan keamanan siber bergantung pada komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan kolaboratif, negara-negara Muslim dapat membangun strategi keamanan siber yang efektif untuk melindungi infrastruktur kritis mereka dan menghadapi tantangan yang ada di dunia digital saat ini (Ali, 2021).

C. Upaya-Upaya Membangun Dialog Antaragama dan Toleransi dalam Mendorong Stabilitas dan Perdamaian

Dialog antaragama dan upaya membangun toleransi memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian global. Di tengah meningkatnya konflik berbasis agama dan etnis di berbagai wilayah dunia, dialog antaragama berfungsi sebagai sarana penting untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman antar komunitas yang berbeda. Berbagai inisiatif dialog antaragama telah dirancang untuk menciptakan ruang bagi diskusi dan kolaborasi antar kelompok agama yang berbeda, dengan tujuan akhir mendorong toleransi dan koeksistensi damai.

Dialog antaragama tidak hanya relevan dalam konteks konflik antaragama, tetapi juga menjadi penting dalam menangani ketidakstabilan politik dan sosial yang dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Dalam banyak kasus, ketidakstabilan ini diperparah oleh perbedaan agama yang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat. Melalui dialog, berbagai pemimpin agama dapat bekerja sama untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada pengikutnya dan mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis (Smith, 2019).

Upaya membangun dialog antaragama tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan teologis yang sering kali menjadi hambatan untuk mencapai konsensus. Namun, meskipun perbedaan ini signifikan, dialog antaragama dapat fokus pada nilai-nilai bersama, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, yang dianut oleh sebagian besar agama (Abu-Nimet, 2021). Di beberapa negara, dialog antaragama telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional untuk mencegah radikalisasi dan meningkatkan kohesi sosial. Indonesia, misalnya, dengan konsep Pancasila sebagai ideologi negara, mengakui pentingnya dialog antaragama sebagai cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Pancasila memungkinkan negara untuk mengakomodasi berbagai keyakinan agama, sekaligus mempromosikan kesetaraan dan toleransi (Yusran, 2020).

Organisasi internasional seperti PBB juga telah mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung dialog antaragama. Resolusi PBB tentang dialog antaragama menekankan pentingnya kerjasama antar umat beragama dalam menciptakan perdamaian global. Melalui inisiatif ini, PBB berupaya mempertemukan pemimpin agama dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi untuk masalah-masalah yang melibatkan ketegangan antar agama.

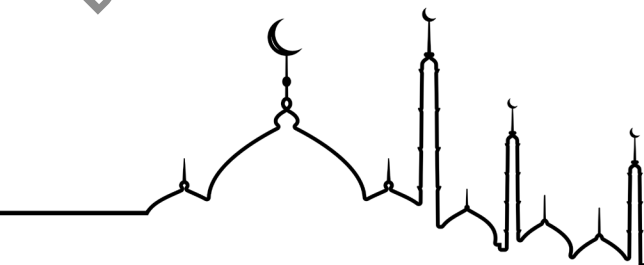
Pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong dialog antaragama. Dengan mengajarkan toleransi dan pemahaman lintas agama di sekolah-sekolah, masyarakat dapat membangun generasi yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Di banyak negara, kurikulum pendidikan telah dirancang untuk mencakup materi yang mengajarkan tentang agama-agama lain, dengan tujuan mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan penghormatan terhadap perbedaan (Hasan, 2018). Upaya untuk membangun toleransi juga melibatkan pemanfaatan media. Dalam konteks ini, media berperan dalam membentuk opini publik, sehingga dapat berfungsi sebagai alat penting untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan koeksistensi damai. Sayangnya, dalam banyak kasus, media justru memperkuat stereotip dan memicu ketegangan antar agama. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin agama dan politisi untuk bekerja sama dengan media dalam menyebarkan pesan-pesan yang mendukung dialog dan toleransi.

Peran pemimpin agama dalam dialog antaragama juga sangat signifikan. Sebagai figur otoritas moral dalam masyarakat, pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap pengikut mereka terhadap agama lain. Pemimpin agama yang aktif terlibat dalam dialog antaragama dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan komunitas yang berbeda, sekaligus mengedukasi pengikutnya tentang pentingnya toleransi. Selain peran pemimpin agama, pemuda juga memegang peranan penting dalam upaya membangun dialog antaragama. Pemuda sering kali lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak organisasi masyarakat sipil telah membentuk program dialog antaragama yang berfokus pada pemuda, dengan harapan bahwa generasi mendatang

BAB VI

ISLAM DAN LINGKUNGAN GLOBAL

Islam memiliki pandangan yang komprehensif terkait lingkungan, di mana prinsip-prinsip etika lingkungan dalam ajaran Islam menekankan keseimbangan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip-prinsip ini mendorong umat Muslim untuk menjaga kelestarian alam serta menghormati makhluk hidup lainnya. Di era modern, negara-negara mayoritas Muslim turut memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, meskipun menghadapi berbagai kendala, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tantangan lingkungan di negara-negara Muslim, seperti kelangkaan air dan deforestasi, memerlukan solusi yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Islam menawarkan kontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, upaya konservasi hutan dan air di negara-negara Muslim mencerminkan komitmen Islam terhadap lingkungan, serta peran penting yang dapat dimainkan dalam memitigasi dampak kerusakan alam dan memperkuat upaya global untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi mendatang.



A. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang holistik mengenai lingkungan dan keberlanjutan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika lingkungan yang kuat. Dalam Islam, alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan. Manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Tugas ini ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyiratkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam (Izzi Dien, 2000).

Al-Qur'an menyebutkan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan dengan tujuan yang jelas. Ayat-ayat seperti "Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat" (Al-Qur'an 25:2) menegaskan keseimbangan yang inheren dalam ciptaan Allah. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa segala bentuk kerusakan atau eksploitasi terhadap alam akan mengganggu keseimbangan yang diciptakan Allah, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukannya (Sanjotis, 2012).

Islam juga menekankan konsep *tawazun* atau keseimbangan dalam alam semesta. *Tawazun* ini merujuk pada keselarasan dan keteraturan yang melekat dalam penciptaan, yang harus dijaga oleh manusia. Al-Qur'an memperingatkan terhadap keserakahan dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, yang dapat mengakibatkan kehancuran lingkungan (Al-Qur'an 7:31). Oleh karena itu, prinsip moderasi atau *wasatiyyah* menjadi inti dari etika lingkungan Islam, yang menyerukan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan (Foltz, 2003).

Prinsip *tauhid* (keesaan Allah) juga memiliki relevansi dalam etika lingkungan. Karena segala sesuatu di bumi adalah ciptaan Allah, manusia harus memperlakukan alam dengan rasa hormat yang sama seperti memperlakukan ciptaan Allah lainnya. *Tauhid* menghubungkan manusia dengan seluruh alam semesta dalam satu jaringan penciptaan yang harmonis. Ini berarti bahwa perlindungan lingkungan adalah bentuk ibadah, karena menjaga ciptaan-Nya berarti memenuhi perintah-Nya (Khalid, 2010).

Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi adalah aspek penting lainnya dari etika lingkungan Islam. Konsep ini memberikan tanggung jawab moral dan hukum kepada manusia untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi" (Al-Qur'an 2:30). Peran *khalifah* ini bukan hanya untuk mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam penggunaan alam (Al-Damkhi, 2008).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak memberikan panduan tentang bagaimana umat Muslim harus berinteraksi dengan alam. Salah satu hadis yang terkenal menyatakan, "Jika Kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebatang pohon kurma, maka tanamlah." (HR. Ahmad). Hadis ini mengandung makna pentingnya menjaga dan melestarikan alam, bahkan di saat-saat genting sekalipun. Menanam pohon dan menjaga alam adalah tindakan ibadah dan kebaikan yang diakui dalam Islam (Sheikh, 2006).

Etika lingkungan dalam Islam juga mengakui pentingnya perlindungan air sebagai sumber kehidupan. Al-Qur'an menyatakan bahwa air adalah esensi kehidupan: "Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup" (Al-Qur'an 21:30). Air bukan hanya sumber daya alam yang harus dilindungi, tetapi juga simbol kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, membuang air atau mencemarinya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kelestarian lingkungan (Foltz, 2003).

Konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) juga berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan. Dalam Islam, setiap tindakan yang diambil harus bertujuan untuk kebaikan bersama dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Pengrusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam atau penurunan kualitas hidup dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai *maslahah*. Dengan demikian, menjaga alam adalah upaya untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang (Zaman, 2019).

Prinsip *adalah* (keadilan) dalam Islam juga berimplikasi pada bagaimana sumber daya alam dikelola. Keadilan dalam penggunaan sumber daya berarti tidak boleh ada eksploitasi pemakaian sumber daya oleh individu atau kelompok tertentu yang merugikan orang lain, terutama mereka yang rentan. Alam harus dikelola sedemikian rupa sehingga distribusi manfaatnya adil dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau makhluk hidup lainnya (Izzi Dien, 2000).

Islam juga memperkenalkan konsep *haram* dalam konteks lingkungan, yaitu larangan terhadap tindakan yang merusak atau mencemari bumi. Segala bentuk polusi, baik udara, air, maupun tanah, dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks modern, ini relevan untuk upaya pengendalian emisi karbon, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Al-Damkhi, 2008).

Peran manusia sebagai *'abd* (hamba Allah) juga menegaskan bahwa manusia harus mematuhi perintah Allah dalam hal menjaga dan merawat bumi. Manusia bukanlah pemilik alam, tetapi hanya pengelola sementara yang diberi amanah untuk merawat bumi demi kesejahteraan semua makhluk. Ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Sanjotis, 2012).

Konsep *ihsan* (kebaikan) dalam Islam juga memiliki relevansi dengan etika lingkungan. *Ihsan* berarti berbuat baik, tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap alam. Tindakan merawat alam dengan baik adalah wujud implementasi *ihsan*, di mana manusia tidak hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga demi keberlanjutan kehidupan di bumi (Khalid, 2010).

Dalam konteks perubahan iklim global, etika lingkungan dalam Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk melawan kerusakan lingkungan. Umat Muslim di seluruh dunia dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan lingkungan dan praktik sehari-hari. Dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap alam, negara-negara Muslim memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Sheikh, 2006).

Secara keseluruhan, etika lingkungan Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berperan sebagai pelindung bumi. Prinsip-prinsip *tauhid*, *khalifah*, *maslahah*, dan *tawazun* menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga kelestarian alam di tengah tantangan modern seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Al-Damkhi, 2008). Prinsip-prinsip ini, ketika diterapkan dengan konsisten, tidak hanya akan menjaga lingkungan tetapi juga memastikan bahwa kehidupan di bumi terus berlanjut secara harmonis dan berkelanjutan. Islam, melalui ajarannya, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya global dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana ekologis yang lebih besar di masa depan (Zaman, 2019).

B. Kontribusi Islam dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Islam sebagai sebuah agama dan sistem nilai telah memberikan landasan etika yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dalam Al-Qur'an, berbagai ayat menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan lingkungannya. Islam tidak hanya menyoroti kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan lingkungan yang menjadi pilar utama dari pembangunan berkelanjutan (Khalid, 2020).

Dalam Islam, manusia dianggap sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam. Konsep ini memberikan dasar teologis bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Manusia diharuskan menggunakan sumber daya secara bijaksana dan tidak merusaknya demi keuntungan sesaat (Zohdi & Halid, 2019). Prinsip-prinsip seperti ini sangat relevan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Islam juga mengajarkan konsep *mizan* atau keseimbangan, yang menuntut keharmonisan dalam semua aspek kehidupan. Penerapan konsep ini dalam kebijakan pembangunan menekankan pentingnya

menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan holistik ini memungkinkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan sosial (Al-Harbi et al., 2021).

Dalam hal ekonomi, Islam mendukung konsep keadilan distribusi. Prinsip ini mendorong pemerataan kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Melalui zakat, umat Muslim diajak untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka untuk membantu pihak yang kurang mampu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan (Hassan, 2016).

Selain zakat, konsep *waqf* atau wakaf juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Wakaf memungkinkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara berkelanjutan untuk tujuan sosial dan keagamaan. Banyak institusi pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur publik di dunia Muslim didirikan melalui wakaf. Dengan pemanfaatan wakaf yang optimal, banyak kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Shatzmiller, 2017).

Dari perspektif lingkungan, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Nabi Muhammad SAW sering kali mendorong para pengikutnya untuk tidak membuang air, bahkan ketika mereka berada di dekat sumber air yang melimpah. Hal ini mencerminkan kesadaran Islam tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien. Penggunaan air secara hemat dan bijaksana sangat relevan dengan tantangan modern terkait kelangkaan air di banyak negara Muslim (Ibrahim & Said, 2018).

Prinsip Islam lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah larangan atas pemborosan atau *israf*. Islam mengecam perilaku boros yang dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam. Larangan ini mendorong individu dan

masyarakat untuk hidup secara efisien dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya. Ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap alam (Nasr, 2016).

Konsep *maqasid al-shariah* atau tujuan-tujuan syariah juga memberikan kerangka kerja yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. *Maqasid al-shariah* menekankan perlindungan terhadap lima elemen utama: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan alam. Dengan memastikan bahwa kebijakan pembangunan memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia, pendekatan ini mendukung upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Kamali, 2019).

Pendidikan juga menjadi aspek penting dalam kontribusi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Islam sangat menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian. Pendidikan yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan mencari solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk dalam isu-isu lingkungan dan sosial (Zailan, 2018). Melalui pendidikan, masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam.

Di sektor energi, negara-negara Muslim mulai menyadari pentingnya beralih ke energi terbarukan. Islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan, dan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa negara Muslim seperti Uni Emirat Arab dan Maroko telah memulai inisiatif besar dalam investasi energi terbarukan, yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan (Safiullah & Ahmed, 2020).

Selain itu, Islam juga memiliki prinsip *maslahah* atau kepentingan umum yang mendorong kesejahteraan bersama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep ini menekankan

perlunya kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian, *maslahah* menjadi pedoman yang kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif (Dusuki, 2017).

Peran Islam dalam mendorong pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dari bagaimana komunitas-komunitas Muslim lokal berupaya menerapkan nilai-nilai agama dalam pengelolaan lingkungan. Di beberapa daerah, terdapat inisiatif masyarakat yang berfokus pada pengelolaan hutan, air, dan sumber daya alam lainnya dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, masyarakat di Indonesia dan Malaysia sering kali mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan hutan dan lahan pertanian mereka, yang mendorong praktik-praktik berkelanjutan (Rauf & Basri, 2021).

Lebih jauh lagi, peran pemimpin agama dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan juga penting. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim telah mengeluarkan fatwa yang mendukung pelestarian lingkungan dan menekankan tanggung jawab umat Muslim dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk mendorong tindakan-tindakan pro-lingkungan di berbagai tingkat masyarakat (Hosseini, 2018). Namun demikian, terdapat pula tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam terkait lingkungan di kalangan masyarakat Muslim. Sering kali, masalah lingkungan dianggap sebagai isu sekuler dan tidak memiliki relevansi dengan agama, padahal Islam memiliki banyak panduan yang relevan (Farid, 2019).

Selain itu, diperlukan pula kerjasama internasional yang lebih besar antara negara-negara mayoritas Muslim dan masyarakat global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Organisasi Islam internasional, seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengoordinasikan upaya global di bidang lingkungan dan pembangunan. OKI dapat menginisiasi program-program lintas negara yang bertujuan

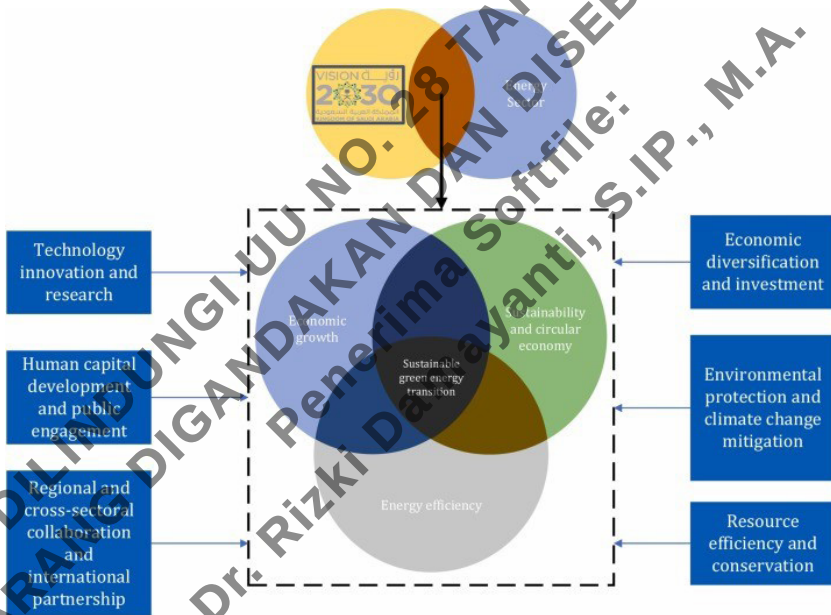
untuk melestarikan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggotanya (Qureshi, 2021). Secara keseluruhan, Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum yang diusung oleh ajaran Islam memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, negara-negara mayoritas Muslim dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat global.

C. Peran Negara-Negara Muslim dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan upaya kolektif dari semua negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara ini mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam menangani perubahan iklim melalui berbagai kebijakan, inisiatif, dan partisipasi dalam kesepakatan iklim internasional. Meskipun negara-negara Muslim sering kali memiliki tantangan khusus, seperti keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, banyak di antara negara-negara tersebut yang telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan (Khalid, 2016).

Salah satu contoh utama adalah Arab Saudi, yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Meskipun minyak tetap menjadi sumber pendapatan utama negara, Arab Saudi telah meluncurkan inisiatif "Saudi Vision 2030," yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Visi ini sejalan dengan komitmen Arab Saudi dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), di mana Arab Saudi telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Al-Ghabban, 2019).

Saudi Vision 2030 menempatkan transisi energi berkelanjutan sebagai inti dari kebijakan lingkungan dan ekonomi, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan ekonomi sirkular yang saling mendukung. Melalui inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi internasional, Arab Saudi berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Strategi ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi ekonomi, mitigasi perubahan iklim, serta efisiensi dan konservasi sumber daya alam. Dengan menyeimbangkan faktor ekonomi dan ekologis, Saudi Vision 2030 tidak hanya memperkuat keberlanjutan lingkungan tetapi juga menjadikan Arab Saudi sebagai pemimpin dalam transisi energi hijau di tingkat global.



Gambar 6. Transisi Energi Hijau Berkelanjutan di Arab Saudi
Melalui Saudi Vision 2030

Sumber: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X24000668>

Uni Emirat Arab (UEA) juga merupakan negara Muslim yang menunjukkan kepemimpinan dalam menangani perubahan iklim. UEA telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek energi terbarukan dan menjadi tuan rumah Masdar City, sebuah kota futuristik yang dirancang untuk menjadi salah satu komunitas paling

berkelanjutan di dunia. Selain itu, UEA telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk COP (*Conference of the Parties*), dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 (El-Katiri, 2014).

Di Asia Tenggara, Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, juga telah berperan aktif dalam isu perubahan iklim. Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan deforestasi dan kebakaran hutan. Namun, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk moratorium izin pembukaan lahan baru di hutan primer dan lahan gambut. Selain itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% pada tahun 2030 sebagai bagian dari *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang diajukan dalam Perjanjian Paris (Santoso, 2021).

Negara-negara di Afrika Utara seperti Maroko dan Tunisia juga menonjol dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Maroko, misalnya, telah membangun salah satu ladang tenaga surya terbesar di dunia, yaitu Kompleks Noor Quarzazate, yang merupakan bagian dari rencana ambisius negara untuk menghasilkan 52% listriknya dari energi terbarukan pada tahun 2030. Tunisia juga telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi bersih (El-Katiri & Fattouh, 2017).

Partisipasi negara-negara Muslim dalam kesepakatan iklim internasional juga penting. Hampir semua negara mayoritas Muslim telah menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris, menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan global untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius. Di tingkat regional, negara-negara di kawasan Teluk juga telah membentuk Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang bekerja sama dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi ke energi terbarukan (Krane, 2020).

Mesir, sebagai salah satu negara paling padat penduduk di dunia Arab, juga berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim. Mesir telah menyelenggarakan Konferensi Iklim PBB (COP27) di Sharm El-Sheikh, yang memberikan kesempatan bagi negara-negara Muslim dan negara-negara berkembang lainnya untuk

mendiskusikan tantangan iklim yang dihadapi, terutama terkait dengan adaptasi dan pendanaan untuk perubahan iklim (Amin, 2022).

Negara-negara Muslim di Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan juga telah mulai mengalihkan perhatian pada isu perubahan iklim. Meskipun kedua negara ini memiliki ketergantungan besar pada industri bahan bakar fosil, mereka telah mengambil langkah-langkah awal untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengeksplorasi potensi energi terbarukan, terutama energi angin dan surya (Overland, 2018).

Turki juga merupakan negara mayoritas Muslim yang telah mengambil langkah signifikan dalam menangani perubahan iklim. Meskipun pada awalnya enggan untuk meratifikasi Perjanjian Paris, Turki akhirnya melakukannya pada tahun 2021 dan berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2053. Turki juga telah meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan memperkenalkan berbagai kebijakan efisiensi energi di sektor transportasi dan industri (Acar & Yeldan, 2016).

Di sub-Sahara Afrika, Nigeria, yang merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di Afrika, menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim, termasuk penggurunan dan banjir. Namun, Nigeria telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peningkatan penggunaan energi bersih dan pelaksanaan kebijakan adaptasi iklim (Oladipo, 2021).

Pakistan, yang juga merupakan salah satu negara Muslim dengan populasi besar, telah meluncurkan inisiatif “Billion Tree Tsunami” untuk menanam miliaran pohon guna mengurangi dampak perubahan iklim dan mengembalikan keseimbangan ekosistem. Inisiatif ini diakui secara internasional sebagai salah satu langkah positif dalam memitigasi perubahan iklim (Ali, 2020).

Negara-negara Teluk, meskipun dikenal sebagai penghasil minyak utama, telah mulai mengalihkan perhatian mereka pada energi terbarukan. Qatar, misalnya, telah berinvestasi dalam proyek energi matahari dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Komitmen ini

mencerminkan langkah awal negara-negara Teluk dalam diversifikasi energi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon (Krane, 2020).

Iran, yang juga merupakan salah satu produsen minyak utama di dunia, telah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, Iran telah menunjukkan minat untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga angin dan surya, sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi perubahan iklim (Amidpour, 2015).

Demikian halnya Bangladesh, meskipun merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, telah berperan aktif dalam dialog iklim internasional. Bangladesh telah mengadopsi berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakatnya dari dampak perubahan iklim, termasuk pembangunan tanggul dan infrastruktur tahan iklim (Huq, 2019).

Di Afrika Utara, Aljazair juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan. Aljazair telah mengadopsi kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi energi surya dan mempromosikan efisiensi energi di berbagai sektor (Cherif, 2018).

Sementara Senegal, sebagai negara mayoritas Muslim di Afrika Barat, telah memulai proyek-proyek energi terbarukan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan akses energi bagi penduduknya. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan investasi dalam teknologi hijau (Ba, 2020).

Dengan demikian, secara keseluruhan, negara-negara mayoritas Muslim memainkan peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Meskipun banyak di antara negara-negara tersebut yang menghadapi tantangan besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan, komitmen yang ditunjukkan dalam berbagai kesepakatan internasional dan kebijakan domestik merupakan langkah positif menuju keberlanjutan lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim (Overland, 2018).

D. Tantangan Lingkungan di Negara-Negara Mayoritas Muslim

Negara-negara mayoritas Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Meskipun isu lingkungan bersifat global, kondisi geografis, ekonomi, dan sosial yang berbeda menyebabkan tantangan yang unik di setiap negara. Salah satu tantangan utama adalah degradasi lahan, yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti deforestasi, erosi tanah, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan (Elasha, 2010). Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa/ MENA*), misalnya, telah mengalami tekanan besar terhadap lahan akibat kekeringan yang berkepanjangan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Degradasi lahan di negara-negara Muslim juga diperburuk oleh perubahan iklim. Di beberapa negara, terutama di kawasan MENA, peningkatan suhu global telah memperparah kekeringan, mengurangi ketersediaan air, dan mempercepat proses desertifikasi (Omran & Negm, 2020). Hal ini berdampak langsung pada ketahanan pangan dan menyebabkan migrasi internal. Negara-negara seperti Sudan, Somalia, dan Irak menghadapi ancaman serius dari desertifikasi yang terus meluas, yang pada gilirannya mengancam mata pencaharian masyarakat pedesaan yang bergantung pada pertanian (Salman, 2016).

Polusi juga merupakan masalah yang sangat menonjol di negara-negara mayoritas Muslim. Di beberapa kota besar di kawasan ini, terutama di Asia Selatan, tingkat polusi udara telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pakistan dan Bangladesh, misalnya, sering kali masuk dalam daftar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara di kota-kota ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan, dan praktik industri yang tidak ramah lingkungan (Azadi et al., 2020). Dampak kesehatan dari polusi udara sangat besar, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua.

Di samping polusi udara, negara-negara mayoritas Muslim juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah. Banyak negara mengalami kesulitan dalam mengelola limbah padat, baik

di perkotaan maupun pedesaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Kairo, dan Lagos, masalah pengelolaan limbah sering kali diabaikan, menyebabkan penumpukan sampah yang mencemari tanah dan air (Gomez et al., 2019). Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang.

Krisis air merupakan tantangan lingkungan lainnya yang sangat penting di negara-negara mayoritas Muslim. Di banyak negara di kawasan MENA, ketersediaan air bersih semakin menurun akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya air. Penggunaan air yang tidak berkelanjutan untuk keperluan pertanian juga telah memperburuk masalah ini (Moussa, 2014). Negara-negara seperti Yaman dan Libya berada di garis depan krisis air, dengan banyak wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan dan keterbatasan akses air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Deforestasi juga merupakan masalah besar di negara-negara mayoritas Muslim, terutama di Asia Tenggara dan Afrika. Indonesia, sebagai contoh, telah kehilangan jutaan hektar hutan akibat penebangan ilegal, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun (Wijaya et al., 2017). Deforestasi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim. Di Afrika, Nigeria menghadapi masalah serupa, dengan tingginya laju deforestasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan kayu bakar dan lahan pertanian (Onyekuru et al., 2020).

Di banyak negara mayoritas Muslim, pengelolaan sumber daya alam masih menjadi tantangan besar. Banyak negara kaya sumber daya seperti minyak dan gas, namun pengelolaan yang buruk dan eksploitasi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di Timur Tengah, pengambilan air tanah secara berlebihan dan proyek-proyek infrastruktur besar telah menyebabkan penurunan kualitas air dan erosi tanah (Al-Zubari et al., 2021). Sementara itu, di negara-negara Afrika seperti Chad

dan Niger, eksploitasi sumber daya mineral telah menyebabkan pencemaran tanah dan air yang serius.

Isu perubahan iklim juga memperburuk tantangan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas Muslim. Peningkatan suhu global telah menyebabkan naiknya permukaan air laut, yang mengancam wilayah pesisir di negara-negara seperti Maladewa, Bangladesh, dan Indonesia (Islam et al., 2019). Negara-negara kepulauan ini sangat rentan terhadap banjir dan abrasi pantai, yang mengancam kehidupan jutaan orang. Maladewa, misalnya, telah menghadapi ancaman eksistensial karena permukaan laut yang terus naik dapat membuat pulau-pulau tersebut tidak layak huni dalam beberapa dekade mendatang.

Selain tantangan alamiah, negara-negara mayoritas Muslim juga menghadapi masalah kebijakan lingkungan yang kurang efektif. Di banyak negara, regulasi lingkungan sering kali diabaikan atau tidak ditegakkan dengan baik. Korupsi, kurangnya transparansi, dan minimnya kesadaran politik tentang pentingnya perlindungan lingkungan sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif (Bari, 2018). Akibatnya, meskipun terdapat berbagai inisiatif lingkungan di tingkat global, dampaknya di banyak negara Muslim masih terbatas.

Konflik bersenjata juga berkontribusi terhadap tantangan lingkungan di beberapa negara Muslim. Di negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan, konflik telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, termasuk hancurnya infrastruktur lingkungan, hilangnya akses air bersih, dan pencemaran tanah akibat penggunaan senjata kimia (Zohbi et al., 2020). Konflik juga sering kali menyebabkan migrasi massal, yang menambah tekanan pada sumber daya alam di daerah yang aman.

Berikutnya, urbanisasi yang cepat di banyak negara mayoritas Muslim juga memperburuk tantangan lingkungan. Di kota-kota besar seperti Kairo, Jakarta, dan Dhaka, pertumbuhan penduduk yang pesat telah menyebabkan masalah seperti kemacetan, polusi udara, dan pemukiman liar (Bala & Wahid, 2016). Banyak dari kota-kota ini juga kekurangan infrastruktur hijau, seperti taman dan

ruang terbuka hijau, yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari urbanisasi.

Selain itu, pengelolaan energi juga menjadi tantangan besar di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak negara masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk kebutuhan energinya, yang memperburuk polusi dan emisi gas rumah kaca (Amin et al., 2017). Meskipun beberapa negara seperti Arab Saudi dan UEA telah mulai berinvestasi dalam energi terbarukan, transisi ke energi bersih masih berjalan lambat di banyak negara lainnya.

Ketergantungan pada bahan bakar fosil juga terkait dengan subsidi energi yang tinggi di banyak negara mayoritas Muslim. Subsidi ini membuat harga energi lebih murah, tetapi juga mendorong konsumsi energi yang tidak efisien dan memperburuk polusi (Krane, 2018). Mengurangi subsidi energi ini merupakan tantangan politik yang sulit karena dapat menimbulkan ketidakpuasan publik, terutama di kalangan masyarakat miskin yang bergantung pada energi murah untuk kebutuhan sehari-hari.

Negara-negara mayoritas Muslim juga menghadapi tantangan dalam melindungi keanekaragaman hayati mereka. Banyak negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di wilayah seperti Asia Tenggara dan Afrika. Namun, hilangnya habitat akibat deforestasi, polusi, dan perubahan iklim telah mengancam banyak spesies di wilayah ini (Iskandar et al., 2020). Upaya konservasi sering kali kurang didukung oleh kebijakan pemerintah, dan minimnya dana untuk pelestarian alam memperburuk masalah ini.

Pengelolaan perikanan juga menjadi masalah penting di beberapa negara mayoritas Muslim, terutama di negara-negara pesisir seperti Indonesia, Mesir, dan Bangladesh. *Overfishing* dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan stok ikan di banyak wilayah, yang mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir (Pauly et al., 2017). Selain itu, pencemaran air laut akibat limbah industri dan plastik telah memperburuk kerusakan ekosistem laut.

Berbagai tantangan lingkungan di negara-negara mayoritas Muslim ini, memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerja sama internasional, peningkatan kesadaran publik, serta penerapan kebijakan yang efektif dan transparan sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah ini (Meadows et al., 2019). Negara-negara Muslim juga perlu meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

E. Konservasi Hutan dan Air di Negara-Negara Muslim

Konservasi hutan dan air menjadi isu lingkungan yang semakin mendesak di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Muslim. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menunjukkan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, yang menghadapi tantangan besar dalam konservasi hutan dan air akibat deforestasi dan degradasi sumber daya air. Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan yang relevan dengan nilai-nilai Islam untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan lestari (Nugroho, 2020).

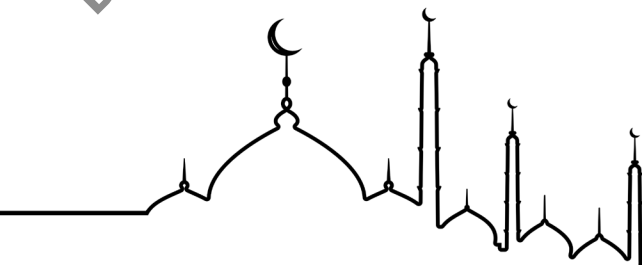
Indonesia memiliki beberapa inisiatif penting dalam konservasi hutan, termasuk program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Program ini bertujuan untuk menekan laju deforestasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan di wilayah-wilayah yang rawan eksploitasi. Selain itu, hutan hujan tropis Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi fokus utama dari kebijakan konservasi, dengan beberapa wilayah dijadikan kawasan konservasi dan taman nasional (Adnan et al., 2021).

Contoh lain dari negara Muslim yang berhasil dalam konservasi sumber daya air adalah Malaysia. Negara ini dikenal dengan keberhasilannya dalam pengelolaan sumber daya air melalui berbagai kebijakan dan strategi yang komprehensif. Malaysia memiliki program pengelolaan air terpadu (*Integrated Water Resource Management/IWRM*) yang memastikan bahwa air dikelola secara

BAB VII

ISLAM DAN EKONOMI GLOBAL

Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam ekonomi global melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan larangan praktik riba. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi ekonomi Islam, yang tidak hanya diadopsi oleh negara-negara Muslim tetapi juga menarik perhatian dunia internasional melalui sistem keuangan syariah yang berkembang pesat. Dalam konteks ekonomi global, negara-negara Muslim memainkan peran penting dalam sistem keuangan internasional, baik melalui partisipasi dalam lembaga-lembaga keuangan global maupun kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dunia. Selain itu, hubungan ekonomi antara negara-negara Muslim dan non-Muslim menawarkan potensi besar untuk memperkuat kerjasama lintas batas, khususnya dalam perdagangan dan investasi, yang didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati dan kesejahteraan bersama. Hal ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun kerjasama ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.



A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Pengaruhnya dalam Konteks Ekonomi Global

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama adalah konsep *keadilan* (*al-'adl*) yang menjadi landasan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi global, prinsip ini memiliki dampak besar dalam mendorong distribusi yang lebih adil, mengatasi ketimpangan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan melarang praktik eksploitasi, ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Zaman, 2017).

Prinsip lainnya adalah larangan *riba* atau bunga. Dalam ekonomi Islam, *riba* dianggap sebagai sumber ketidakadilan karena mempromosikan eksploitasi dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam ekonomi global, sistem perbankan syariah yang beroperasi tanpa bunga menawarkan alternatif yang menarik bagi negara-negara non-Muslim, terutama setelah krisis keuangan global 2008, ketika model keuangan berbasis bunga dianggap salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi (Kahf, 2019).

Selain itu, ekonomi Islam menekankan *zakat*, yaitu kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memainkan peran dalam menstabilkan ekonomi. Dalam konteks global, zakat dapat menjadi model bagi upaya redistribusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menangani masalah ketimpangan global (Ahmed, 2020).

Salah satu aspek yang signifikan dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Ini tercermin dalam larangan perjudian dan spekulasi yang berlebihan. Dengan mengurangi ketidakpastian dan spekulasi, ekonomi Islam mendorong stabilitas keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, yang menjadi semakin relevan dalam menghadapi fluktuasi pasar global (Chapra, 2016).

Kerjasama dan keadilan dalam transaksi ekonomi juga merupakan nilai fundamental dalam Islam. Ekonomi Islam mendorong adanya kolaborasi antara para pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini dapat dilihat dalam praktik *mudharabah* dan *musharakah*, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Model ini berpotensi menginspirasi sistem ekonomi global untuk menekankan pada kerja sama yang berkelanjutan, terutama di sektor investasi (Siddiqi, 2018).

Dalam konteks global, prinsip-prinsip ekonomi Islam juga memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah *khalifah* di bumi, yang berarti bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Prinsip ini relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan di dunia internasional. Negara-negara Muslim telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan ajaran Islam ini (Ismail & Puteh, 2021). Ekonomi Islam juga mengatur prinsip *hibah* dan *waqf*, yang mengedepankan kontribusi sosial dan filantropi sebagai bagian dari ekonomi yang sehat. Dalam skala global, konsep ini semakin diakui sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, terutama melalui pembangunan infrastruktur sosial di wilayah-wilayah yang kurang berkembang (Cizakca, 2017).

Dalam tataran yang lebih luas, penerapan ekonomi Islam di negara-negara Muslim telah menciptakan sistem perbankan syariah yang tumbuh dengan cepat di seluruh dunia. Sistem ini telah mendapatkan perhatian global karena stabilitasnya yang lebih baik dibandingkan sistem keuangan konvensional, terutama di tengah krisis keuangan global. Perbankan syariah sekarang tidak hanya terdapat di negara-negara Muslim, tetapi juga diadopsi di negara-negara non-Muslim sebagai bagian dari diversifikasi portofolio keuangan (El-Gamal, 2020).

Dalam perkembangannya, penerapan ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga meluas ke sektor investasi. *Sukuk* atau obligasi syariah telah menjadi instrumen keuangan yang menarik bagi investor global karena menawarkan stabilitas dan kepastian lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional. Dengan

berkembangnya pasar *sukuk* internasional, ekonomi Islam semakin terintegrasi ke dalam sistem keuangan global (Iqbal, 2019). Selain sektor keuangan, prinsip ekonomi Islam juga mulai berpengaruh dalam sektor perdagangan global. Islam mendorong perdagangan yang adil dan etis, di mana para pedagang diharapkan untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan atau merugikan pihak lain. Dalam konteks global, ini mencerminkan pentingnya memperkuat etika dalam perdagangan internasional, terutama dalam mendorong perdagangan yang adil dan berkelanjutan (Khan, 2018).

Dalam bidang keuangan mikro, konsep *qard hasan* atau pinjaman tanpa bunga telah digunakan untuk memerangi kemiskinan di berbagai negara Muslim. Dalam konteks global, ini dapat menjadi alternatif untuk model keuangan mikro yang berbasis bunga, yang sering kali memberatkan masyarakat miskin. *Qard hasan* menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam memberdayakan ekonomi mikro (Obaidullah, 2021).

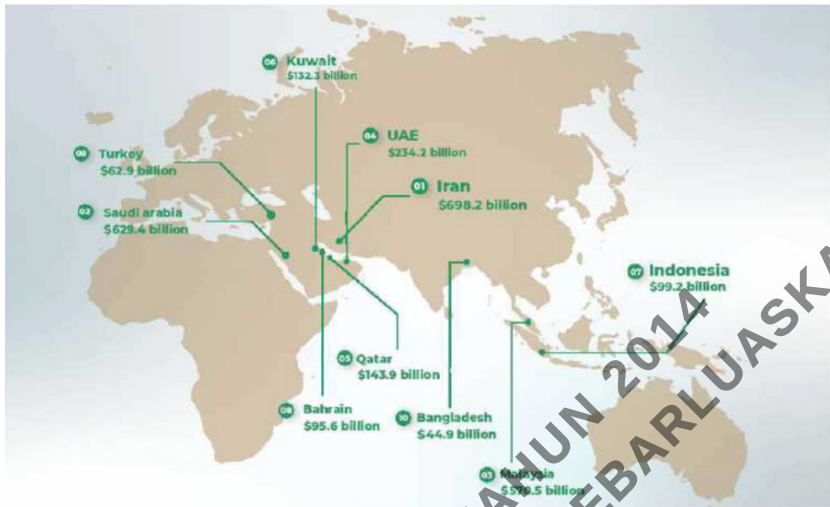
Ekonomi Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan fiskal negara. Dengan memperhatikan larangan terhadap akumulasi kekayaan secara tidak adil dan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, kebijakan fiskal di negara-negara Muslim dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih inklusif (Fahim Khan, 2019).

Berikutnya, *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap kekayaan adalah prinsip lain dalam ekonomi Islam yang mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dalam konteks global, ini relevan dengan upaya mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta pengurangan kesenjangan antarnegara (Asutay, 2018). Selain itu, ekonomi Islam juga memberikan perhatian khusus pada konsep *halal* dalam perdagangan dan investasi. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, tetapi juga mencakup investasi dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Ini menunjukkan relevansi ekonomi Islam dalam mendorong investasi etis yang selaras dengan nilai-nilai moral di pasar global (Bakar & Ibrahim, 2020).

Pada akhirnya, ekonomi Islam mendorong pengembangan *sistem ekonomi inklusif*, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ini sangat relevan dalam konteks global yang semakin menyadari pentingnya inklusivitas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti zakat, hibah, dan *qard hasan* mencerminkan upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dan marginal secara ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2017). Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini tidak hanya menawarkan solusi untuk tantangan ekonomi lokal tetapi juga menawarkan panduan untuk menciptakan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan integrasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, ekonomi Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk sistem ekonomi global yang lebih stabil (Kahf, 2019).

B. Peran Negara-Negara Muslim dalam Sistem Keuangan Internasional

Negara-negara Muslim memiliki peran yang semakin penting dalam sistem keuangan internasional. Salah satu faktor yang mendorong peran ini adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, serta sektor perbankan syariah yang berkembang pesat, yang menjadikan negara-negara ini aktor penting dalam ekonomi global (Kammer et al., 2015).



Gambar 7. Sepuluh Negara Teratas Berdasarkan Aset Keuangan Islam (2020)

Sumber: <https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2949>

Perbankan syariah merupakan salah satu kontribusi utama negara-negara Muslim dalam sistem keuangan internasional. Perbankan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga) dan spekulasi berlebihan (*gharar*), serta mendorong investasi dalam sektor riil. Dengan pertumbuhan yang stabil dan relatif tahan terhadap krisis global, perbankan syariah telah menarik perhatian banyak negara non-Muslim yang kini mulai mengadopsi beberapa praktik keuangan syariah (Abdul-Rahman & Nor, 2017).

Negara-negara Muslim, terutama di kawasan Teluk, juga memainkan peran penting dalam investasi internasional melalui dana kekayaan negara (*sovereign wealth funds/SWF*). Negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar mengelola dana kekayaan negara yang sangat besar, yang diinvestasikan dalam berbagai sektor, mulai dari *real estate* hingga teknologi, di seluruh dunia. Investasi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global dan memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam sistem keuangan internasional (Al-Hassan, Papaioannou, & Skancke, 2013).

Selain perbankan syariah dan dana kekayaan negara, negara-negara Muslim juga terlibat aktif dalam pasar obligasi syariah atau *sukuk*. *Sukuk* telah menjadi instrumen keuangan yang penting di pasar global, baik di kalangan investor Muslim maupun non-Muslim. *Sukuk* menawarkan alternatif yang lebih etis dan stabil dibandingkan obligasi konvensional, dan telah menarik minat investor global karena karakteristiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta transparansinya dalam penggunaan dana (Jobst et al., 2008).

Negara-negara Muslim juga terlibat dalam berbagai lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dan Bank Dunia. Melalui keterlibatan ini, negara-negara Muslim berkontribusi dalam perumusan kebijakan keuangan global dan memberikan perspektif yang berbeda mengenai keuangan dan ekonomi, khususnya terkait keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan (El-Gamal, 2006).

Peran negara-negara Muslim dalam keuangan internasional tidak hanya terbatas pada sektor perbankan dan investasi, tetapi juga mencakup kontribusi dalam pengembangan standar dan regulasi keuangan syariah. Lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah berperan penting dalam mengembangkan kerangka kerja regulasi yang mengatur operasi keuangan syariah di berbagai negara (Ali, 2015).

Negara-negara Muslim, khususnya di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, juga menjadi pionir dalam pendidikan dan penelitian terkait keuangan syariah. Universitas dan lembaga penelitian di negara-negara ini memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan mengenai keuangan syariah serta mendidik para profesional di bidang ini. Pendidikan dan penelitian ini kemudian disebarluaskan ke negara-negara lain, memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam sistem keuangan global (Dusuki & Abozaid, 2007).

Berikutnya, negara-negara Muslim juga berperan dalam memperkuat kerja sama keuangan antarnegara Muslim melalui berbagai organisasi seperti OKI dan *Islamic Development Bank* (IsDB). Lembaga-lembaga ini memfasilitasi kerja sama keuangan di antara

negara-negara Muslim dan mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Ahmed, 2011).

Seiring dengan semakin kuatnya peran negara-negara Muslim dalam sistem keuangan internasional, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah integrasi keuangan syariah dengan sistem keuangan global yang didominasi oleh prinsip-prinsip konvensional. Meski terdapat perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional, negara-negara Muslim telah berhasil membuktikan bahwa kedua sistem ini dapat saling melengkapi dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi global (Iqbal & Mirakhor, 2011). Di sisi lain, negara-negara Muslim juga harus menghadapi tantangan dalam memperkuat regulasi dan pengawasan keuangan syariah. Meski telah ada lembaga-lembaga seperti AAOIFI dan IFSB, harmonisasi regulasi antara negara-negara Muslim masih perlu ditingkatkan untuk memastikan stabilitas dan kredibilitas sektor keuangan syariah di tingkat global (Zulkhibri, 2016).

Negara-negara Muslim juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam yang mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Negara-negara Muslim dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ini untuk mempromosikan model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global (Dusuki, 2017).

Kontribusi negara-negara Muslim dalam sistem keuangan internasional juga terlihat dalam peningkatan partisipasi di pasar modal syariah. Bursa saham syariah yang beroperasi di berbagai negara Muslim telah menarik minat investor global yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menawarkan diversifikasi portofolio yang lebih luas (El-Hawary, Grais, & Iqbal, 2004).

Dalam konteks geopolitik, negara-negara Muslim seperti Arab Saudi dan Iran juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan energi global. Dengan cadangan minyak

yang besar, negara-negara ini memegang peranan penting dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (*Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC*) dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga minyak dunia, yang berdampak langsung pada ekonomi global (Krane, 2015). Selain itu, negara-negara Muslim juga berperan dalam perdagangan global, khususnya dalam perdagangan produk halal. Pasar produk halal yang berkembang pesat di seluruh dunia memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi negara-negara Muslim, baik sebagai produsen maupun konsumen. Hal ini semakin memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam sistem ekonomi global (Riaz & Chaudry, 2018).

Negara-negara Muslim juga terlibat dalam kerja sama keuangan dengan negara-negara non-Muslim. Misalnya, kerja sama antara Malaysia dan Inggris dalam mengembangkan pasar keuangan syariah telah memberikan dampak positif bagi kedua negara dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral (Shafii, Abidin, & Zakaria, 2010). Sementara di bidang inovasi keuangan, negara-negara Muslim telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru dalam sistem keuangan global. *Fintech* syariah, yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi keuangan modern, telah berkembang pesat di negara-negara Muslim seperti Indonesia dan UEA, menawarkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan efisien (Ghazal, 2020). Keseluruhan peran negara-negara Muslim dalam sistem keuangan internasional ini menunjukkan bahwa negara-negara Muslim tidak hanya mengikuti, tetapi juga membentuk arsitektur keuangan global. Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh dan inovasi dalam sektor keuangan syariah, negara-negara Muslim memiliki potensi untuk semakin memperkuat peran dalam ekonomi global di masa depan (Ali & Al-Ali, 2020).

C. Potensi Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Muslim dan non-Muslim

Kerjasama ekonomi antara negara-negara Muslim dan non-Muslim telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena globalisasi, serta kebutuhan untuk memperkuat hubungan ekonomi yang lebih inklusif, telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi ekonomi lintas batas. Negara-negara Muslim, khususnya

yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, serta negara dengan populasi besar seperti Indonesia, telah menjadi mitra strategis bagi negara-negara non-Muslim. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, dan teknologi (Ali & Ali, 2016).

Di sektor energi, negara-negara Muslim, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa/MENA*), memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Cadangan ini menjadi daya tarik utama bagi negara-negara non-Muslim, terutama negara-negara industri maju yang sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Negara-negara seperti AS, China, dan negara-negara Uni Eropa (UE) telah menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara penghasil minyak di kawasan MENA untuk menjamin stabilitas pasokan energi global (Cordesman, 2017).

Selain sektor energi, kerjasama ekonomi juga berkembang di sektor perdagangan barang dan jasa. Negara-negara Muslim seperti Malaysia, Turki, dan UEA menjadi pusat perdagangan yang penting, baik secara regional maupun global. Negara-negara ini memiliki peran strategis dalam jaringan perdagangan global karena posisinya yang strategis dan kemampuan dalam menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Muslim dan non-Muslim menjadi instrumen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi (Zandi & Rasool, 2019).

Kerjasama di bidang infrastruktur juga menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan ekonomi antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Misalnya, negara-negara Asia Timur seperti China dan Jepang telah aktif berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar di negara-negara Muslim. Melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), China telah memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara Muslim di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika (Grare, 2018).

Di sektor pariwisata, kerjasama antara negara-negara Muslim dan non-Muslim juga semakin meningkat. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Indonesia menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan non-Muslim. Di sisi lain, wisatawan Muslim juga menjadi

pasar yang penting bagi negara-negara non-Muslim, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang semakin fokus pada pariwisata halal untuk menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara Muslim (Samori et al., 2016).

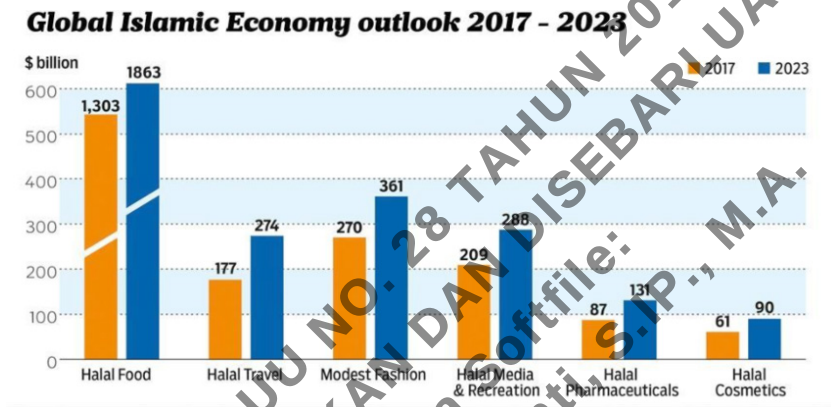
Sebagai tambahan, kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian juga menunjukkan potensi yang besar. Beberapa universitas di negara-negara non-Muslim, seperti Inggris, AS, dan Australia, telah menjalin kemitraan akademis dengan universitas di negara-negara Muslim. Pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi penelitian, menjadi elemen penting dalam memperkuat hubungan antarnegara, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap kerjasama ekonomi di masa depan (Saeed et al., 2018).

Industri keuangan, terutama sektor keuangan syariah, juga menjadi salah satu bidang kerjasama yang berkembang antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada hukum Islam, telah menarik minat negara-negara non-Muslim yang ingin mendiversifikasi portofolio investasi. Negara-negara seperti Inggris, Jepang, dan Australia telah menunjukkan minat yang besar terhadap instrumen keuangan syariah seperti *sukuk* (Warde, 2016).

Kerjasama ekonomi juga terlihat dalam sektor manufaktur dan teknologi. Negara-negara Muslim seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia telah meningkatkan investasi dalam sektor manufaktur, di mana negara-negara non-Muslim melihat ini sebagai peluang untuk berkolaborasi, terutama dalam pengembangan teknologi tinggi. Hubungan ini saling menguntungkan, karena negara-negara Muslim mendapatkan transfer teknologi, sementara negara-negara non-Muslim mendapatkan akses ke pasar baru (Esen & Bayrak, 2017).

Kerjasama di sektor pertanian juga menjadi potensi yang sangat besar. Negara-negara non-Muslim, terutama di Eropa dan Amerika Utara, telah berinvestasi dalam proyek-proyek pertanian di negara-negara Muslim yang memiliki lahan luas dan subur. Melalui kerjasama ini, negara-negara Muslim dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, sementara negara-negara non-Muslim dapat memperoleh akses ke sumber daya pertanian yang melimpah (Ali et al., 2015).

Tidak kalah penting, potensi kerjasama ekonomi juga dapat dilihat dalam bidang industri halal yang mencakup makanan, kosmetik, dan farmasi, yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di negara-negara non-Muslim. Permintaan akan produk halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang mencari produk yang dianggap lebih sehat dan etis. Hal ini menciptakan peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk mengeksport produk halal ke negara-negara non-Muslim (Riaz & Chaudry, 2018).



Gambar 8. Prospek Ekonomi Islam Global (2017-2023)

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Prospek-Ekonomi-Islam-Global-State-of-the-Global-Islamic-Economy-Report-2018_fig1_365261643

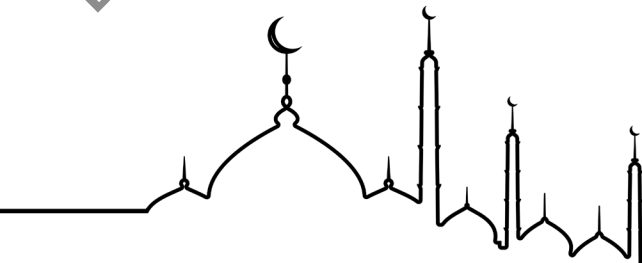
Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi bidang kerjasama yang potensial antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Negara-negara Muslim seperti UEA, Malaysia, dan Turki telah menjadi pusat inovasi teknologi di kawasan, sekaligus menjalin kolaborasi dengan negara-negara non-Muslim, sehingga membantu mempercepat adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *blockchain*, di negara-negara Muslim (Khan & Samad, 2020).

Kerjasama ekonomi di sektor kesehatan juga semakin penting, terutama setelah pandemi COVID-19. Negara-negara Muslim dan non-Muslim bekerja sama dalam pengembangan vaksin, penelitian medis, dan distribusi alat kesehatan. Kemitraan ini mencerminkan pentingnya kerjasama lintas batas dalam menghadapi tantangan

BAB VIII

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Islam memiliki pandangan yang unik dan kaya mengenai hak asasi manusia (HAM), yang terwujud dalam prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam ajaran Islam, hak-hak individu diakui sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas, yang mencakup kewajiban moral dan spiritual. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Dinamika politik, budaya, dan sosial di berbagai negara mayoritas Muslim kerap mempengaruhi implementasi HAM, menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Di tengah tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki catatan HAM di negara-negara Muslim, termasuk melalui reformasi hukum, peningkatan kesadaran publik, dan keterlibatan dalam dialog internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam dan standar HAM global, guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.



A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

HAM dalam Islam berakar pada ajaran fundamental Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan perhatian besar terhadap martabat manusia dan hak-hak individu serta kewajiban sosial. Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk yang mulia karena diciptakan oleh Allah, dan dengan itu, memiliki hak-hak yang melekat yang harus dihormati dan dijaga oleh individu serta masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan (*al-'adl*), yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hingga hak ekonomi dan politik (*Maqasid al-Shariah*).

Prinsip ini ditegaskan dalam ajaran tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa Islam mendukung konsep kesetaraan antar individu, yang menjadi landasan penting dalam HAM modern (Abu-Nimer, 2021). Islam juga menjunjung tinggi kebebasan beragama, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam agama," yang menjadi landasan bagi kebebasan berkeyakinan dalam konteks HAM.

Salah satu aspek unik dari konsep HAM dalam Islam adalah pengakuan terhadap hak kolektif di samping hak individu. Islam tidak hanya menekankan pada perlindungan hak individu, tetapi juga mendorong adanya tanggung jawab sosial yang memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam kondisi yang adil dan bermartabat. Ini terlihat dalam konsep zakat dan sedekah, yang merupakan kewajiban sosial yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.

HAM dalam Islam juga meliputi hak-hak khusus bagi kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Al-Qur'an menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 9, yang memperingatkan umat Islam agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Hak-hak perempuan juga diakui dan dilindungi dalam Islam, baik dalam

hal warisan, kepemilikan harta, dan partisipasi sosial, meskipun sering kali terjadi perbedaan penafsiran yang memengaruhi implementasinya di berbagai negara mayoritas Muslim. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan HAM dalam Islam sering kali berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang beragam di dunia Muslim. Misalnya, hak-hak perempuan dalam Islam yang diakui secara teologis sering kali dibatasi oleh norma-norma patriarkal di beberapa masyarakat (Sachedina, 2018). Oleh karena itu, memahami HAM dalam Islam harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik setempat.

Dalam sejarahnya, Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan HAM global, baik melalui pengaruh intelektual maupun kontribusi praktis. Misalnya, Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad dianggap sebagai salah satu dokumen awal yang menetapkan prinsip-prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas. Piagam ini merupakan contoh konkret bagaimana Islam menghargai keberagaman dan pluralisme, serta menempatkan hak individu dan kelompok sebagai bagian integral dari kehidupan sosial (Bielefeldt, 2020).

Penghormatan terhadap hak-hak minoritas dalam Islam juga menjadi bagian penting dari konsep HAM. Dalam konteks sejarah, komunitas Yahudi dan Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Islam diizinkan untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas, selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban sosial tertentu seperti pembayaran jizyah, pajak khusus bagi non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam telah lama mengakui dan melindungi hak-hak kelompok agama minoritas dalam kerangka negara Islam (An-Na'im, 2016).

HAM dalam Islam juga mencakup hak untuk hidup dan keamanan pribadi. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32, "Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya."

Hal ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap hak hidup dan keamanan pribadi.

Konsep HAM dalam Islam juga tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi dan sosial. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan ekonomi dan menentang eksploitasi dalam berbagai bentuk, baik melalui *riba* (bunga) maupun praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Prinsip keadilan sosial ini juga diterapkan dalam pengaturan hak-hak pekerja, di mana Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak buruh dan imbalan yang adil bagi kerja keras mereka.

Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Ini berbeda dengan beberapa konsep modern HAM yang lebih fokus pada hak individu tanpa menekankan aspek tanggung jawab sosial. Dalam Islam, setiap hak diimbangi dengan kewajiban, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun alam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep HAM dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif dan holistik. Konsep ini tidak hanya meliputi hak-hak individu, tetapi juga tanggung jawab sosial, spiritual, dan ekologis. Oleh karena itu, HAM dalam Islam harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yang mencakup tidak hanya aspek-aspek legalistik, tetapi juga moral, etika, dan spiritual.

B. Tantangan dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Muslim

Mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam masyarakat Muslim seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah perbedaan penafsiran terhadap teks-teks agama Islam, terutama terkait dengan hak-hak individu dan sosial. Banyak ahli hukum Islam yang berbeda pendapat mengenai batasan dan ruang lingkup HAM, terutama ketika nilai-nilai HAM bertentangan dengan norma-norma tradisional atau praktik keagamaan yang telah berlangsung lama (Ali, 2018).

Beberapa negara mayoritas Muslim masih mengadopsi hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, pidana, dan sipil. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama, dalam konteks yang masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi tradisional hukum syariah. Dalam banyak kasus, interpretasi ini sering kali dipandang bertentangan dengan standar HAM internasional (An-Na'im, 2016).

Salah satu contoh tantangan besar dalam implementasi HAM di negara-negara Muslim adalah isu kesetaraan gender. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Meskipun Al-Qur'an memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak untuk memiliki harta, dalam praktiknya, hak-hak ini sering kali dibatasi oleh interpretasi patriarkal terhadap teks agama. Kondisi ini semakin diperumit oleh faktor budaya lokal yang memperkuat struktur patriarki tersebut (Ali, 2018). Selain itu, kebebasan beragama dan keyakinan juga menjadi tantangan besar dalam banyak masyarakat Muslim. Di beberapa negara, hak untuk berpindah agama atau mempraktikkan agama minoritas sering kali dibatasi atau bahkan dilarang. Kebebasan beragama dalam Islam sering diartikan sebagai kebebasan untuk memeluk agama Islam, tetapi tidak sebaliknya, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang menjamin kebebasan individu untuk memeluk atau meninggalkan agama tertentu (Sachedina, 2018).

Penerapan hukuman yang berdasarkan hukum syariah, seperti hukuman cambuk atau rajam untuk pelanggaran tertentu, juga sering menjadi sorotan dalam perdebatan HAM di dunia Muslim. Organisasi HAM internasional sering mengkritik praktik-praktik ini karena dianggap melanggar prinsip-prinsip martabat manusia dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, bagi beberapa masyarakat Muslim, hukuman ini dianggap sebagai bagian dari hukum Allah yang tidak dapat diubah (Kamali, 2019).

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga memperburuk tantangan dalam mengimplementasikan prinsip HAM di banyak negara Muslim. Ketidakadilan ekonomi dan korupsi yang meluas menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pelaksanaan HAM, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum miskin dan minoritas etnis atau agama. Banyak negara Muslim menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya memperkuat ketimpangan dan memperburuk pelanggaran HAM (Esposito & Moghed, 2017).

Kondisi politik di banyak negara Muslim juga memainkan peran penting dalam menghambat implementasi prinsip-prinsip HAM. Beberapa pemerintahan di negara mayoritas Muslim cenderung otoriter dan menekan kebebasan berpendapat serta partisipasi politik. Banyak aktivis HAM dan oposisi politik menghadapi penindasan, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, dan bahkan penyiksaan. Di bawah sistem pemerintahan yang represif, prinsip-prinsip HAM sulit ditegakkan (Abu-Nimer, 2021). Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap pengaruh barat. Beberapa masyarakat Muslim melihat prinsip-prinsip HAM yang didorong oleh lembaga internasional seperti PBB sebagai bentuk imperialisme budaya. Mereka menganggap bahwa standar HAM internasional tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dunia Muslim. Perspektif ini memicu kebijakan-kebijakan yang menolak atau setidaknya membatasi penerapan prinsip-prinsip HAM yang dianggap “asing” (Hassan, 2018).

Di samping itu, interpretasi plural hukum di banyak negara Muslim, di mana hukum agama dan hukum negara berjalan bersamaan, menciptakan kompleksitas tambahan dalam implementasi HAM. Dalam beberapa kasus, hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi negara dapat bertentangan dengan hukum syariah yang juga berlaku, menciptakan ambiguitas hukum dan konflik interpretasi antara dua sistem hukum tersebut (Zaman, 2018).

Selain tantangan internal, tekanan eksternal dari komunitas internasional juga sering kali menjadi faktor yang memengaruhi implementasi HAM di negara-negara Muslim. Sanksi ekonomi, embargo, atau intervensi militer oleh negara-negara Barat sering kali memperburuk kondisi sosial dan politik di negara-negara tersebut,

yang pada gilirannya menghambat upaya reformasi HAM. Di sisi lain, negara-negara Muslim sering kali merespon tekanan ini dengan semakin menutup diri terhadap kritik luar, yang memperparah situasi (Esposito & Mogahed, 2017).

Sementara itu, gerakan reformasi internal di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Tunisia dan Malaysia, menunjukkan bahwa ada potensi untuk memperbaiki catatan HAM di dunia Muslim. Meskipun tantangannya besar, ada upaya dari intelektual Muslim, aktivis, dan pemerintah untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip HAM dengan nilai-nilai Islam. Beberapa reformasi, seperti penghapusan hukum pidana yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas, menjadi contoh positif dari perubahan ini (Kamali, 2019).

Tantangan lainnya yang sering kali diabaikan adalah kurangnya pendidikan mengenai HAM di banyak masyarakat Muslim. Di banyak negara, sistem pendidikan formal jarang memasukkan pendidikan HAM sebagai bagian dari kurikulumnya. Akibatnya, kesadaran publik tentang hak-hak dasar yang mereka miliki masih rendah. Kurangnya pendidikan HAM ini memperburuk masalah karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau sarana untuk menuntut hak-hak mereka (Bielefeldt, 2020). Terdapat juga masalah birokrasi dan korupsi dalam penegakan HAM di banyak negara Muslim. Sering kali, bahkan ketika undang-undang HAM yang progresif telah disahkan, implementasinya terhambat oleh kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk, dan tingkat korupsi yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkungan di mana pelanggaran HAM terus terjadi meskipun ada undang-undang yang dimaksudkan untuk melindunginya (Zaman, 2018).

Tantangan lainnya datang dari kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Di beberapa negara, penegakan hukum sering kali tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas dan mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Misalnya, hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama sering kali berbeda antara orang kaya dan miskin, atau antara mayoritas dan minoritas (Hassan, 2018). Selain itu, faktor keamanan dan terorisme juga menjadi alasan utama bagi beberapa negara Muslim untuk menunda atau membatasi reformasi HAM. Banyak

pemerintah yang menggunakan alasan keamanan nasional untuk menekan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan hak untuk berkumpul. Ancaman terorisme dan kekerasan politik ini sering kali menjadi alasan bagi negara untuk memperkuat kontrol dan pengawasan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak warga negara (Abu-Nimer, 2021).

Tantangan berikutnya yang juga sering dihadapi adalah konservatisme agama. Di beberapa masyarakat Muslim, interpretasi agama yang sangat konservatif masih mendominasi wacana publik, yang memengaruhi cara masyarakat memandang hak-hak individu. Interpretasi konservatif ini sering kali menentang reformasi dalam hal hak-hak perempuan, minoritas, dan kebebasan berpendapat (Sachedina, 2018).

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, terdapat juga contoh-contoh positif dari negara-negara Muslim yang mulai mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara lebih progresif. Sebagai contoh, Tunisia telah berhasil membuat reformasi hukum yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak minoritas. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, implementasi HAM dalam masyarakat Muslim bukanlah sesuatu yang mustahil.

C. Upaya-Upaya untuk Memperbaiki Catatan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Mayoritas Muslim

Negara-negara mayoritas Muslim sering kali menghadapi kritik internasional terkait pelanggaran HAM, baik yang terjadi di dalam negeri maupun dalam konteks kebijakan luar negeri. Meskipun demikian, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk memperbaiki catatan HAM di wilayah-wilayah ini. Dinamika politik, sosial, dan hukum yang ada di setiap negara mayoritas Muslim sering kali menjadi tantangan besar dalam proses memperbaiki situasi HAM, tetapi juga membuka peluang bagi reformasi yang lebih luas.

Reformasi hukum merupakan salah satu langkah penting dalam upaya memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Tunisia, misalnya, menjadi salah satu contoh negara yang mengambil langkah progresif dengan reformasi hukum yang melindungi hak-hak perempuan. Pada tahun 2017, Tunisia menghapus hukum yang melarang perempuan Muslim menikah dengan pria non-Muslim, suatu langkah signifikan yang dipuji oleh komunitas HAM internasional. Reformasi ini mencerminkan kemauan politik untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan setara dalam hal kebebasan individu, yang juga memberikan sinyal bahwa Tunisia siap mengikuti standar internasional dalam hal HAM (Toumi, 2020).

Selain reformasi hukum, masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mempromosikan HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Kelompok masyarakat sipil di Mesir, seperti *Egyptian Initiative for Personal Rights* (EIPR), terus melakukan advokasi di tengah pembatasan kebebasan berekspresi yang ketat. Meski menghadapi banyak rintangan, organisasi-organisasi ini tetap berupaya mendokumentasikan pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa aktor non-negara di negara mayoritas Muslim memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan kondisi HAM, meskipun mereka harus menghadapi risiko dan represi dari pihak berwenang (Abdelrahman, 2021).

Di samping peran domestik, aktor-aktor internasional juga turut berperan dalam upaya memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan *Amnesty International* sering kali memberikan tekanan kepada pemerintah negara-negara mayoritas Muslim untuk melakukan reformasi. Di Afghanistan, misalnya, dukungan dari Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*) telah membantu memperkuat sistem peradilan yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Bantuan internasional ini sangat penting untuk memastikan bahwa standar HAM global diadopsi dan diterapkan secara konsisten (Khalid & Jaleel, 2019).

Di beberapa negara, prinsip-prinsip syariah bahkan digunakan sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan HAM. Di Indonesia, interpretasi syariah yang lebih progresif telah digunakan untuk mendukung hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Konsep Islam Nusantara, yang dikembangkan oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, mengedepankan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini memungkinkan syariah untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip HAM modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar Islam (Azra, 2019).

Pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesadaran HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Di Maroko, program pendidikan HAM telah diperkenalkan di berbagai sekolah dan universitas sebagai bagian dari upaya untuk membentuk generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya hak asasi. Dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, toleransi beragama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu sejak dini, diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman (Mounir, 2020).

Media, baik tradisional maupun digital, juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran HAM di kalangan masyarakat negara-negara mayoritas Muslim. Di Pakistan, misalnya, media sosial menjadi alat yang efektif bagi aktivis HAM untuk menyuarakan kritik terhadap pelanggaran HAM, termasuk isu-isu seperti kebebasan beragama dan hak-hak perempuan. Platform-platform ini memungkinkan wacana HAM berkembang di luar kontrol negara, memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam dialog kritis mengenai isu-isu sensitif (Khan, 2021).

Beberapa negara juga mulai merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap HAM. Di Yordania, misalnya, kebijakan pemerintah yang menghapus hukuman penjara bagi perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah menandakan adanya perubahan dalam pendekatan negara terhadap hak-hak individu. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu memperbaiki catatan HAM negara di mata internasional, tetapi juga menciptakan preseden untuk reformasi lebih lanjut dalam isu-isu gender dan privasi (Al-Hadidi, 2018).

Perlindungan terhadap kelompok minoritas agama juga menjadi perhatian utama dalam upaya memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Di Malaysia, meskipun tantangan masih ada, pemerintah dan masyarakat sipil berusaha untuk mempromosikan dialog antaragama dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok non-Muslim. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi potensi konflik berbasis agama (Saari, 2020).

Di lain sisi, negara-negara mayoritas Muslim juga menghadapi tantangan besar dalam hal penanganan pengungsi dan pencari suaka. Turki dan Yordania, yang telah menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi Suriah, mendapat pujian atas kebijakan mereka yang memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Meskipun memiliki sumber daya terbatas, negara-negara ini berusaha memberikan pelayanan dasar dan perlindungan hukum bagi para pencari suaka, yang menjadi contoh positif dalam konteks HAM di kawasan tersebut (Ayoub & Laffan, 2022).

Advokasi hak-hak perempuan juga terus menjadi salah satu prioritas utama di berbagai negara mayoritas Muslim. Di Arab Saudi, meskipun kemajuan berjalan lambat, perubahan-perubahan seperti pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada 2018 menunjukkan bahwa ada ruang bagi reformasi gender di negara yang sangat konservatif ini. Meski demikian, upaya untuk memperluas hak-hak perempuan masih menghadapi resistensi dari kalangan tradisional (Hamdan, 2019).

Ulama juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya reformasi HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, ulama-ulama moderat seperti Quraish Shihab dan Gus Dur telah lama mengedepankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam ajaran Islam. Narasi-narasi keagamaan yang moderat dan inklusif ini menjadi landasan penting bagi upaya reformasi sosial yang berbasis pada penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan (Shihab, 2020).

Tantangan besar lainnya adalah perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis HAM yang kerap menjadi sasaran represi. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Tunisia dan Indonesia

telah mulai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para aktivis dan jurnalis yang berjuang untuk memperbaiki situasi HAM. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pembela HAM dan meningkatkan transparansi pemerintah (Awan, 2020). Terkait ini, teknologi digital telah membuka jalan baru dalam memantau pelanggaran HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Penggunaan teknologi seperti *drone* dan citra satelit telah membantu organisasi HAM internasional mendokumentasikan kejahatan perang di Suriah dan daerah konflik lainnya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan membantu mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan internasional (Kelley, 2019).

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Bangladesh, juga merupakan indikator positif dari kemajuan dalam memperbaiki situasi HAM. Perempuan yang memegang jabatan publik berperan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan minoritas (Hashemi, 2021). Demikian halnya penguatan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi dan pengadilan HAM, juga menjadi komponen penting dalam upaya reformasi HAM di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia dan Turki, lembaga-lembaga ini telah mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM oleh negara, memberikan keadilan bagi korban, dan mengawasi pelaksanaan hukum yang sesuai dengan standar internasional (Hirschl, 2021).

Program pemberdayaan ekonomi juga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk memperkuat HAM, terutama di kalangan perempuan dan kelompok-kelompok rentan. Di Bangladesh, misalnya, program-program ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Sen, 2022).

Kerja sama regional juga memainkan peran penting dalam memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR),

meskipun terbatas, telah mencoba memperkuat perlindungan HAM di Asia Tenggara. Organisasi ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan situasi di Myanmar dan Filipina, tetapi tetap menjadi platform penting untuk diskusi regional tentang HAM (Muntarbhorn, 2021). Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan juga berperan penting dalam memperkuat kesadaran HAM di kalangan masyarakat Muslim. Di Malaysia dan Indonesia, lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah berperan aktif dalam mempromosikan HAM sebagai bagian dari ajaran Islam, menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM dan agama dapat berjalan seiring (Effendy, 2021).

Secara keseluruhan, meskipun tantangan-tantangan besar masih ada, upaya untuk memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim terus berlanjut melalui reformasi hukum, partisipasi masyarakat sipil, bantuan internasional, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Kombinasi antara dukungan internal dan eksternal sangat penting dalam memastikan bahwa negara-negara ini dapat mencapai standar HAM internasional yang lebih baik, sekaligus mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka.

D. Peran Negara-negara Muslim dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia

Negara-negara Muslim memiliki peran yang signifikan dalam perumusan resolusi di PBB terkait HAM. Keikutsertaan negara-negara ini bukan hanya didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi, tetapi juga diwarnai oleh kerangka teologis dan budaya yang menekankan keadilan sosial dan hak-hak individu dalam Islam. Banyak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terlibat secara aktif dalam proses negosiasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di mana mereka memperjuangkan pengakuan hak-hak kelompok-kelompok tertentu, khususnya hak-hak minoritas Muslim yang kerap mengalami diskriminasi di berbagai negara.

Salah satu kontribusi terbesar negara-negara Muslim adalah keterlibatan dalam membentuk diskursus tentang HAM yang lebih inklusif secara kultural. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia sering kali mendorong resolusi yang mengakui pentingnya menghormati keragaman budaya dan agama dalam pelaksanaan HAM (Feldman, 2015). Pendekatan ini dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan norma-norma internasional dengan prinsip-prinsip lokal yang sering kali berbeda dari standar HAM Barat. Misalnya, dalam konteks hak-hak perempuan, negara-negara Muslim cenderung menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam pembahasan tentang kesetaraan gender (Rosen, 2016).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran sentral dalam diplomasi HAM di PBB. Sejak keanggotaan tetapnya di Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menjadi jembatan antara negara-negara Muslim dan negara-negara Barat dalam berbagai isu HAM. Salah satu contoh utamanya adalah keterlibatan Indonesia dalam upaya merumuskan resolusi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang berusaha menjembatani kepentingan negara-negara Muslim dan perspektif HAM universal (Sukma, 2018).

Negara-negara Muslim juga berfokus pada isu-isu HAM yang berkaitan dengan Palestina. Dukungan terhadap hak-hak Palestina telah menjadi salah satu pilar kebijakan luar negeri banyak negara Muslim di PBB. Resolusi-resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pengakuan atas hak-hak Palestina sering kali mendapatkan dukungan penuh dari blok negara-negara Muslim di Majelis Umum PBB (Jamal, 2019). Dukungan ini tidak hanya mencerminkan solidaritas agama tetapi juga komitmen negara-negara Muslim terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Mesir, sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia Arab, juga terlibat aktif dalam perdebatan mengenai HAM di PBB. Meskipun menghadapi kritik atas kondisi HAM di dalam negerinya, Mesir tetap aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan internasional, terutama terkait dengan hak-hak imigran dan pengungsi. Sebagai salah satu negara penerima pengungsi terbesar, Mesir mendorong resolusi yang menekankan

perlindungan hak-hak dasar bagi para pengungsi dan pencari suaka, khususnya dari negara-negara Muslim yang dilanda konflik (El-Mikawy, 2017).

Turki juga memainkan peran penting dalam isu-isu HAM di PBB, terutama setelah meningkatnya peran internasionalnya di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan. Turki secara konsisten mendorong resolusi yang menekankan perlunya perlindungan terhadap umat Muslim yang menjadi korban kekerasan etnis, seperti yang terjadi pada Muslim Rohingya di Myanmar. Melalui Dewan Hak Asasi Manusia, Turki telah menyerukan tindakan yang lebih tegas dari komunitas internasional untuk melindungi Rohingya dari genosida dan pelanggaran HAM lainnya (Ahmed & Hassan, 2018). Sebagai tambahan, blok negara-negara Muslim di PBB juga mendukung resolusi yang menyerukan penghapusan diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan. Resolusi yang menentang islamofobia, misalnya, diajukan oleh negara-negara Muslim dan didukung oleh negara-negara dari berbagai benua. Mereka berpendapat bahwa diskriminasi terhadap umat Muslim tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih luas (Hellyer, 2020).

Di sisi lain, beberapa negara Muslim menghadapi tantangan dalam upaya untuk mendukung HAM di tingkat internasional, terutama ketika kebijakan domestiknya dipertanyakan. Arab Saudi, misalnya, telah menerima kritik atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak-hak perempuan. Meski demikian, Arab Saudi tetap berusaha mempertahankan posisinya di Dewan Hak Asasi Manusia dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghormati tradisi budaya lokal (Al-Rasheed, 2016). Demikian halnya dengan Pakistan dan Afghanistan, kedua negara ini dikritik karena dipandang gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menghadapi kritik ini, Pakistan dan Afghanistan tetap berupaya membela posisi mereka di forum internasional dengan menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dan konteks sosial-politik yang unik (Shah, 2019).

Negara Muslim lainnya, seperti Iran, juga terlibat dalam diskusi HAM di PBB dengan perspektif yang sering kali bertentangan dengan negara-negara Barat. Iran berpendapat bahwa standar HAM yang ditetapkan oleh PBB sering kali bias dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Iran tetap berkomitmen untuk terlibat dalam forum-forum internasional dan berupaya mengadvokasi hak-hak yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zubaida, 2011).

Isu lain yang sering diangkat oleh negara-negara Muslim di PBB adalah perlindungan terhadap kelompok minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim. Diskusi mengenai Muslim Uighur di Tiongkok, misalnya, telah menjadi salah satu topik yang kontroversial. Beberapa negara Muslim, terutama yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Tiongkok, memilih untuk tidak mengkritik keras pelanggaran HAM terhadap Uighur. Namun, negara-negara seperti Turki dan Malaysia secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka dan menyerukan investigasi internasional (Chin & Miller, 2021).

Selain resolusi tentang isu-isu spesifik, negara-negara Muslim juga terlibat dalam debat mengenai hak-hak individu secara lebih umum. Misalnya, dalam diskusi mengenai hak-hak LGBTQ+, banyak negara Muslim yang menolak resolusi yang mendukung pengakuan hak-hak LGBTQ+ dengan argumentasi bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perbedaan perspektif ini mencerminkan tantangan global dalam mengharmonisasikan standar HAM dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berbeda (Grewal, 2017).

Dalam hal perlindungan hak-hak perempuan, beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan hak-hak perempuan di negara tersebut. Di dalam forum-forum PBB, negara-negara ini mendukung resolusi yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender, sambil tetap mempertahankan pandangan bahwa hak-hak ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Charrad, 2020). Sementara dalam diskusi HAM terkait pengungsi, negara-negara Muslim menekankan solidaritas antar-umat Muslim. Negara-negara seperti Yordania dan Lebanon, yang menampung jutaan pengungsi dari

konflik di Suriah dan Palestina, mendesak PBB untuk memberikan dukungan internasional yang lebih besar kepada negara-negara yang menampung pengungsi (Acharya, 2016).

Secara keseluruhan, negara-negara Muslim memainkan peran yang penting dalam resolusi PBB terkait HAM. Meskipun menghadapi tantangan dari negara-negara Barat terkait isu-isu kontroversial seperti kebebasan berekspresi, hak-hak LGBTQ+, dan hak-hak perempuan, tetapi negara-negara ini tetap menjadi pemain kunci dalam forum-forum internasional. Negara-negara Muslim terus berusaha untuk menyeimbangkan komitmen terhadap HAM dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya.

E. Studi Kasus: Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Syariah di Arab Saudi

HAM dalam Islam merupakan isu yang sering diperdebatkan, terutama dalam hal bagaimana prinsip-prinsip universal HAM diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim. Salah satu tantangan utama adalah mengharmonisasikan prinsip-prinsip HAM dengan hukum syariah yang menjadi dasar hukum di banyak negara Islam. Studi kasus penerapan prinsip-prinsip HAM di Arab Saudi, yang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariah sebagai landasan hukum negara, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan-tantangan dalam implementasi HAM di negara mayoritas Muslim dan upaya untuk memperbaiki catatan HAM negara tersebut.

Konsep HAM dalam Islam secara prinsip tidak berbeda jauh dengan konsep yang diakui secara global, seperti yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB. Islam juga mengakui hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas keadilan, dan hak untuk diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Namun, perbedaan muncul ketika hak-hak ini ditafsirkan melalui prisma hukum syariah, yang dalam beberapa aspek dapat bertentangan dengan standar internasional HAM, khususnya di bidang kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan hak-hak minoritas (Baderin, 2003).

Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan syariah dalam sistem hukumnya, sering kali mendapatkan sorotan internasional terkait pelanggaran HAM. Misalnya, kebebasan berekspresi di Arab Saudi terbatas, terutama bagi mereka yang mengkritik pemerintah atau mengekspresikan pandangan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kasus-kasus seperti penahanan aktivis dan pembatasan terhadap kebebasan pers menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi menerapkan interpretasi syariah yang ketat yang mendominasi kehidupan politik dan sosial masyarakat (Human Rights Watch, 2020).



Gambar 9. Kasus Hilangnya Wartawan Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi, Menjadi Perhatian Dunia

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-hilangnya-wartawan-arab-saudi-termasuk-eksekusi-i-extra-judicial-i-lt5bc8901f68fa3/>

Hak perempuan juga menjadi salah satu isu penting dalam penerapan HAM di Arab Saudi. Secara historis, perempuan di negara ini dipandang mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti pembatasan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial. Sistem perwalian yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka untuk melakukan berbagai aktivitas menjadi salah satu kebijakan yang sering dikritik oleh komunitas internasional. Meski demikian, reformasi yang dilakukan oleh Putra

Mahkota Mohammad bin Salman, seperti pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada 2018, menunjukkan upaya untuk memperbaiki catatan HAM terkait hak perempuan (Al-Dosari, 2018).

Meskipun reformasi ini dipandang sebagai langkah maju, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di Arab Saudi masih cukup besar. Salah satu tantangan utamanya adalah konservatisme agama yang mengakar kuat di masyarakat. Banyak pihak di Arab Saudi yang memandang HAM internasional sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam, dan setiap upaya untuk menerapkan reformasi yang dianggap bertentangan dengan syariah sering kali menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok agama konservatif. Ini menunjukkan bahwa penerapan HAM di negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut (Doutato, 2010).

Di sisi lain, Arab Saudi juga menunjukkan upaya untuk memperbaiki catatan HAM-nya di tingkat internasional. Negara ini telah terlibat dalam berbagai forum internasional terkait HAM. Pada tahun 2000, Arab Saudi meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), meskipun dengan beberapa reservasi yang berkaitan dengan syariah. Meskipun ada kemajuan, kritik internasional terhadap Arab Saudi menyoroti bahwa reformasi HAM yang dilakukan sering kali bersifat simbolik dan belum menyentuh akar permasalahan seperti kebebasan berekspresi dan hak-hak minoritas (Peters, 2014).

Sebagai negara yang juga memainkan peran penting dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Arab Saudi menghadapi dilema antara mempertahankan identitas keislamannya dan memenuhi tuntutan internasional untuk memperbaiki catatan HAM. OKI sendiri telah mencoba untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip Islam dengan HAM internasional melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990. Namun, Deklarasi Kairo sering kali dianggap sebagai bentuk tandingan terhadap *Universal Declaration of Human Rights* karena mengedepankan syariah sebagai landasan utama dalam mengartikan HAM (Mayer, 2007).

Penerapan syariah di Arab Saudi juga menimbulkan perdebatan mengenai hak-hak minoritas. Sebagai negara yang secara resmi menganut Islam Sunni, Arab Saudi kerap dituduh mendiskriminasi minoritas Muslim Syiah, terutama di wilayah-wilayah seperti Provinsi Timur. Diskriminasi ini mencakup akses yang terbatas terhadap pekerjaan, layanan publik, dan kebebasan beragama. Kasus pelanggaran HAM terhadap komunitas Syiah di Arab Saudi menyoroti tantangan besar dalam penerapan prinsip-prinsip HAM yang inklusif di negara ini (Jones, 2006). Namun, Arab Saudi tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Pemerintah telah berupaya untuk menyeimbangkan antara tuntutan reformasi HAM dengan penerapan syariah. Salah satu contohnya adalah pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang bertugas untuk mempromosikan HAM sesuai dengan hukum Islam. Meski komisi ini dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi pelanggaran HAM, langkah ini menunjukkan bahwa Arab Saudi setidaknya menyadari pentingnya reformasi di bidang ini (Vogel, 2000).

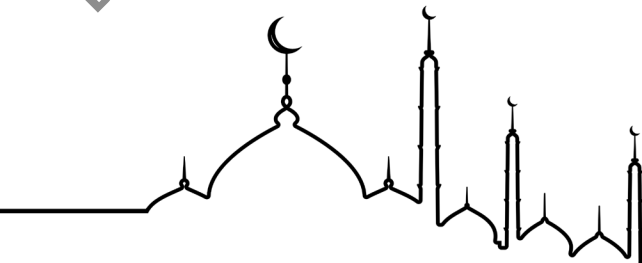
Selain itu, Arab Saudi telah menunjukkan keterlibatannya dalam isu-isu HAM global, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan. Sebagai salah satu donor utama di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi telah berkontribusi dalam berbagai upaya bantuan kemanusiaan di wilayah konflik seperti Suriah dan Yaman. Namun, peran ini sering kali dinodai oleh keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman, di mana negara ini dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil melalui kampanye militernya (Bonney, 2018).

Dengan demikian, studi kasus Arab Saudi dalam konteks penerapan prinsip-prinsip HAM menunjukkan kompleksitas yang ada di negara-negara mayoritas Muslim, khususnya ketika hukum syariah menjadi landasan utama dalam sistem hukum. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti hak perempuan dan keterlibatan internasional dalam isu-isu HAM, tantangan-tantangan besar masih ada, terutama terkait kebebasan berekspresi, hak-hak minoritas, dan peran syariah dalam menginterpretasikan HAM. Oleh karena itu, untuk mencapai harmonisasi antara syariah dan HAM internasional, diperlukan dialog yang konstruktif dan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional.

BAB IX

ISLAM DAN MEDIA INTERNASIONAL

Islam memiliki hubungan yang kompleks dengan media internasional, di mana citra dan persepsi tentang agama ini kerap dipengaruhi oleh pemberitaan global. Media memainkan peran krusial dalam membentuk pandangan masyarakat dunia terhadap Islam, seringkali menciptakan gambaran yang tidak seimbang. Melalui pemberitaan yang beragam, media internasional tidak hanya mempengaruhi persepsi global terhadap Islam tetapi juga memengaruhi pandangan terhadap negara-negara mayoritas Muslim. Pengaruh ini dapat dilihat dalam cara negara-negara tersebut diposisikan di dalam narasi global, terutama terkait isu-isu politik, sosial, dan keamanan. Namun, di tengah tantangan ini, berbagai upaya dilakukan oleh komunitas Muslim dan aktor internasional untuk memperbaiki representasi Islam di media global. Langkah-langkah strategis diambil untuk menciptakan pemahaman yang lebih seimbang dan akurat tentang Islam, serta untuk menanggulangi stereotip yang sering muncul dalam pemberitaan.



A. Peran Media dalam Membentuk Citra Islam di Arena Internasional

Media internasional memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi global tentang Islam, sering kali menghadirkan representasi yang bias dan menyimpang dari kenyataan. Sejak peristiwa 11 September 2001, Islam menjadi salah satu topik yang paling banyak diberitakan, dengan fokus utama pada isu-isu terorisme, radikalisme, dan kekerasan. Gambaran ini menciptakan persepsi bahwa Islam identik dengan kekerasan, meskipun kenyataannya agama ini memiliki berbagai dimensi yang kaya dan damai (Jaspal & Cinnirella, 2019). Media Barat cenderung mempublikasikan berita negatif tentang Islam dan Muslim, yang berdampak pada meningkatnya stereotip serta prasangka terhadap agama ini (Karim, 2020).

Pemberitaan yang dominan tentang Islam lebih sering berfokus pada aspek-aspek negatif, seperti konflik di negara-negara mayoritas Muslim dan tindakan kelompok teroris. Media di negara-negara Barat cenderung mengaitkan Islam dengan kekerasan dan ekstremisme, sebaliknya sering mengabaikan kontribusi Muslim terhadap kemajuan sosial, budaya, dan intelektual di dunia (Jabbar, 2021). Ketidakeimbangan dalam cara Islam direpresentasikan memperkuat stereotip dan prasangka di kalangan masyarakat global, menciptakan pandangan yang sempit tentang agama ini.

Di arena internasional, media sering menjadi alat untuk memperkuat narasi yang mempolarisasi pandangan tentang Islam. Media sosial telah memberikan ruang bagi kelompok ekstremis untuk menyebarkan pesan mereka secara luas, sedangkan media arus utama seringkali memperkuat narasi bahwa Islam merupakan ancaman bagi keamanan global. Peran media dalam membentuk narasi ini sangat kuat, terutama ketika berita yang disajikan berfokus pada ketakutan dan ketidakamanan yang disebabkan oleh tindakan kelompok-kelompok ekstremis. Hal ini menciptakan citra yang mendalam dan kadang-kadang menyesatkan tentang Islam di benak publik (Faksh, 2020).

Salah satu dampak utama dari representasi Islam di media internasional adalah meningkatnya Islamofobia, terutama di negara-negara Barat. Representasi media yang negatif berkontribusi

langsung terhadap peningkatan diskriminasi terhadap Muslim di negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis (Khan, 2021). Narasi yang dibentuk media tentang Islam sebagai ancaman global menciptakan ketidakpercayaan terhadap komunitas Muslim, yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diterapkan di berbagai negara.

Media tidak hanya membentuk persepsi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kebijakan internasional terhadap negara-negara mayoritas Muslim. Pemberitaan yang konstan tentang kekerasan dan konflik di Timur Tengah memengaruhi persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap wilayah tersebut (Eisenstadt, 2022). Dalam banyak kasus, negara-negara Barat menggunakan media sebagai alat untuk membenarkan intervensi militer di negara-negara Muslim, dengan alasan memerangi terorisme atau menegakkan hak asasi manusia (HAM). Media tidak hanya membentuk persepsi publik tetapi juga memberikan legitimasi bagi tindakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun demikian, media juga memiliki potensi besar untuk menciptakan narasi alternatif yang lebih positif tentang Islam. Beberapa media independen dan jurnalis kritis telah berupaya untuk menghadirkan perspektif yang lebih seimbang, menyoroti kontribusi komunitas Muslim di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian (Kumar, 2023). Upaya ini seringkali tertutupi oleh dominasi media arus utama yang terus memperkuat narasi negatif. Meskipun terdapat beberapa suara yang mencoba mengimbangi narasi negatif, tetapi media-media ini sering kekurangan platform dan dukungan yang cukup untuk memiliki dampak yang luas.

Media sosial juga telah menjadi ruang bagi Muslim di seluruh dunia untuk menantang narasi yang salah tentang agama Islam. Platform seperti *Twitter*, *Instagram*, dan *YouTube* digunakan oleh banyak Muslim untuk menyampaikan pandangan mereka dan berbagi pengalaman hidup sebagai Muslim di dunia yang sering kali tidak ramah (Mansoor, 2020). Media sosial memberikan kesempatan bagi komunitas Muslim untuk mengambil alih narasi tentang Islam, sekaligus memungkinkan untuk mempresentasikan pandangan yang lebih autentik dan personal (Alvi & Arora, 2021). Media sosial memang memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk menantang stereotip, tetapi di sisi lain, platform ini juga

digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk menyebarkan propaganda mereka. Ini menciptakan dilema di mana platform yang sama dapat digunakan untuk mempromosikan narasi positif maupun negatif tentang Islam. Meskipun ada peningkatan dalam upaya untuk menghapus konten ekstremis di media sosial, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan bahwa platform ini tidak disalahgunakan untuk tujuan negatif (Yusof, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk menekankan peran jurnalis dan media dalam menghadirkan liputan yang adil dan seimbang tentang Islam. Para jurnalis memiliki tanggung jawab etis untuk tidak hanya mengejar sensasionalisme, tetapi juga untuk menyajikan berita yang didasarkan pada fakta dan konteks yang benar. Sayangnya, dalam banyak kasus, media lebih memilih untuk menyoroti sisi dramatis dari suatu peristiwa, yang sering kali berujung pada penggambaran yang tidak akurat tentang Islam dan komunitas Muslim (Ali, 2022). Reformasi dalam praktik jurnanisme global sangat diperlukan agar lebih responsif terhadap dampak dari pemberitaan mereka.

Upaya untuk memperbaiki citra Islam di media internasional memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas Muslim itu sendiri. Banyak negara mayoritas Muslim menyadari pentingnya membangun hubungan yang lebih baik dengan media internasional untuk mengubah narasi tentang Islam. Pemerintah Malaysia dan Indonesia, misalnya, telah bekerja sama dengan media internasional untuk mempromosikan citra Islam yang damai dan toleran (Hassan, 2019). Selain itu, banyak organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu HAM dan dialog antaragama terlibat dalam kampanye untuk memperbaiki representasi Islam di media (Bashir & Saleem, 2023).

Dalam upaya memperbaiki citra Islam pula, pendidikan media menjadi sangat penting. Pendidikan ini tidak hanya penting bagi jurnalis dan praktisi media, tetapi juga bagi masyarakat umum agar mereka dapat lebih kritis terhadap pemberitaan yang mereka konsumsi (Alavi, 2020). Literasi media dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami bias dalam pemberitaan dan tidak serta merta menerima stereotip yang dipromosikan oleh media. Literasi media juga memungkinkan masyarakat untuk membedakan antara laporan

yang berdasarkan fakta dan narasi yang dibentuk oleh kepentingan politik atau ekonomi.

Di era digital ini, media memang memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya dalam membentuk citra agama, termasuk Islam. Oleh karena itu, penting bagi media global untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menyajikan liputan yang adil dan seimbang tentang Islam. Dengan begitu, media dapat berfungsi sebagai jembatan antara budaya dan agama yang berbeda, ketimbang sebagai alat yang memperkuat perpecahan dan ketegangan global. Peran media dalam membentuk citra Islam di arena internasional sangat penting, baik dalam menciptakan pemahaman yang lebih mendalam maupun dalam mengurangi ketegangan antaragama.

B. Pengaruh Media terhadap Persepsi Negara-Negara Muslim dan Agama Islam

Media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat global terhadap negara-negara Muslim dan agama Islam. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media menjadi sumber utama informasi yang memengaruhi opini publik di seluruh dunia. Representasi media tentang Islam dan negara-negara Muslim dipengaruhi oleh bias politik, ekonomi, dan budaya, yang pada akhirnya memengaruhi cara masyarakat internasional memahami agama ini serta negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Salah satu faktor yang memengaruhi persepsi negatif terhadap negara-negara Muslim adalah pemberitaan tentang konflik dan kekerasan yang sering terjadi di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Media internasional sering kali fokus pada aspek kekerasan yang terjadi di wilayah ini, tanpa memberikan konteks yang lengkap mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi di negara-negara tersebut (Esposito, 2018). Liputan yang dominan ini menciptakan kesan bahwa negara-negara Muslim adalah kawasan yang tidak stabil, penuh dengan kekerasan, dan sulit diatur.

Selain konflik, isu terorisme menjadi sorotan utama dalam pemberitaan tentang Islam dan negara-negara Muslim. Kelompok-kelompok ekstremis seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Al-Qaeda sering kali menjadi representasi Islam di media, yang memperkuat stereotip bahwa Islam adalah agama yang mendukung kekerasan (Jabbar, 2021). Akibatnya, masyarakat internasional memiliki persepsi yang salah tentang Islam sebagai agama yang mempromosikan kekerasan, padahal ajaran Islam sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang.

Media Barat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik tentang negara-negara Muslim. Banyak media di Barat yang cenderung menyajikan berita tentang negara-negara Muslim dari sudut pandang yang menguntungkan kepentingan politik dan ekonomi Barat. Liputan yang bias ini menciptakan stereotip tentang dunia Muslim sebagai tempat yang terbelakang, tertindas, dan membutuhkan intervensi dari negara-negara Barat. Hal ini memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Barat terhadap dunia Muslim, yang sering kali berbasis pada misinformasi dan stereotip (Alvi & Arora, 2021).

Persepsi negatif ini tidak hanya memengaruhi cara negara-negara Barat berinteraksi dengan dunia Muslim, tetapi juga berdampak pada hubungan internasional secara keseluruhan. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara dunia Barat dan negara-negara Muslim mengalami ketegangan yang semakin meningkat, sebagian besar dipicu oleh liputan media yang terus-menerus menyoroti konflik, terorisme, dan ekstremisme (Norris, 2019). Representasi yang tidak seimbang ini menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, yang pada akhirnya memperdalam jurang perbedaan di antara kedua belah pihak. Tidak hanya media Barat yang berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi negatif, tetapi juga media di negara-negara Muslim. Dalam beberapa kasus, media di negara-negara Muslim menyoroti kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang dianggap merugikan umat Muslim, seperti intervensi militer di Irak dan Afghanistan (Hassan, 2020). Liputan ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat Muslim bahwa Barat adalah ancaman bagi Islam, yang dapat memperdalam perpecahan global dan meningkatkan ketegangan antarnegara.

Pengaruh media dalam membentuk persepsi negara-negara Muslim juga terlihat dalam konteks migrasi dan pengungsi. Banyak media di Eropa dan Amerika Utara yang sering mengaitkan pengungsi dari negara-negara Muslim dengan peningkatan kriminalitas dan ancaman terorisme (Faksh, 2020). Liputan ini memperkuat ketakutan dan prasangka terhadap imigran Muslim, yang berdampak pada kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan diskriminatif di negara-negara Barat. Hal ini juga memperburuk situasi pengungsi Muslim yang sering kali diperlakukan secara tidak adil di negara-negara penerima.

Meskipun demikian, tidak semua pemberitaan tentang Islam dan negara-negara Muslim bersifat negatif. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan dalam liputan yang lebih seimbang tentang kontribusi negara-negara Muslim di berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, dan budaya. Beberapa media internasional mulai menyadari pentingnya memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia Muslim, termasuk menyoroti upaya negara-negara Muslim dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kemajuan sosial. Upaya untuk mengubah persepsi ini juga didukung oleh berbagai organisasi internasional dan negara-negara Muslim itu sendiri. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, misalnya, aktif mempromosikan citra Islam yang damai dan moderat melalui diplomasi budaya dan dialog antaragama (Bashir & Saleem, 2023). Upaya ini bertujuan untuk melawan narasi negatif yang sering dipromosikan oleh media internasional dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang Islam dan negara-negara Muslim.

Perlu dicatat pula bahwa media memiliki potensi besar untuk membentuk persepsi yang positif tentang negara-negara Muslim dan agama Islam. Dengan liputan yang lebih adil dan seimbang, media dapat berfungsi sebagai jembatan antarbudaya, memperkuat hubungan antarnegara, dan mengurangi ketegangan antaragama. Penting bagi media global untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menyajikan liputan yang berdasarkan fakta dan kontekstual, bukan sensasionalisme. Kesimpulannya, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat internasional tentang negara-negara Muslim dan agama Islam. Liputan yang bias dan tidak seimbang memperkuat stereotip negatif, sementara media

yang lebih bertanggung jawab dapat mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan positif. Oleh karena itu, di tengah kemajuan teknologi komunikasi, penting bagi masyarakat untuk menjadi konsumen media yang lebih kritis. Literasi media harus menjadi bagian penting dari upaya global untuk melawan misinformasi dan stereotip tentang Islam dan negara-negara Muslim. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara media bekerja, masyarakat dapat berperan dalam menciptakan dialog yang lebih inklusif dan konstruktif tentang agama dan budaya yang berbeda.

C. Upaya Memperbaiki Representasi Islam dalam Media Global

Dalam beberapa dekade terakhir, representasi Islam dalam media global telah menjadi topik yang semakin penting, terutama mengingat peningkatan stereotip negatif yang sering kali melingkupi agama ini. Upaya untuk memperbaiki citra Islam tidak hanya datang dari komunitas Muslim itu sendiri, tetapi juga dari berbagai pihak yang menyadari pentingnya representasi yang lebih akurat dan adil di media. Representasi yang tidak seimbang mengenai Islam telah menimbulkan banyak kesalahpahaman yang dapat memperburuk hubungan antarbangsa dan mengarah pada kebijakan yang tidak adil.

Salah satu langkah utama dalam memperbaiki representasi Islam di media global adalah dengan menantang narasi yang dominan tentang terorisme dan ekstremisme yang sering dikaitkan dengan Islam. Banyak liputan media cenderung menyoroti insiden kekerasan yang melibatkan individu atau kelompok yang mengatasnamakan Islam, namun jarang memberi ruang bagi pandangan mayoritas Muslim yang menolak kekerasan tersebut (Esposito, 2018). Upaya untuk memperluas ruang bagi narasi-narasi alternatif ini menjadi penting dalam menciptakan keseimbangan pemberitaan.

Langkah penting lainnya yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat Muslim dan non-Muslim. Literasi media memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami bias, manipulasi, dan *framing* yang sering digunakan dalam pemberitaan tentang Islam. Dengan

literasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis terhadap informasi yang diterima, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyudutkan agama tertentu. Upaya lain untuk memperbaiki representasi Islam dalam media global datang melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media itu sendiri. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, pemerintah telah berperan aktif dalam mempromosikan citra Islam yang moderat dan damai melalui diplomasi budaya dan program dialog antaragama (Bashir & Saleem, 2023). Program ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman internasional tentang Islam, tetapi juga membuka dialog yang lebih luas tentang isu-isu yang dihadapi oleh umat Muslim di seluruh dunia. Komunitas Muslim sendiri juga memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki citra mereka di media global. Melalui platform media sosial, Muslim dari seluruh dunia dapat berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan yang mencerminkan ajaran Islam yang damai dan inklusif (Khan, 2021). Dalam konteks ini, media sosial memberikan peluang bagi umat Muslim untuk melawan narasi negatif yang sering dikembangkan oleh media tradisional, dengan mempromosikan konten yang lebih autentik dan berbasis pada realitas kehidupan Muslim sehari-hari.

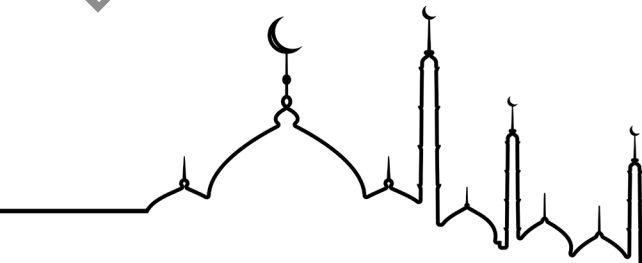
Di beberapa negara Barat, kelompok Muslim telah bekerja sama dengan organisasi media untuk memastikan bahwa liputan tentang Islam lebih akurat dan tidak bias. Ini termasuk melatih jurnalis dan editor tentang isu-isu yang berhubungan dengan Islam dan masyarakat Muslim, serta mendorong kehadiran lebih banyak jurnalis Muslim di ruang redaksi. Kehadiran jurnalis yang memahami Islam secara mendalam dapat membantu mengubah cara pemberitaan tentang agama Islam, yaitu dengan menawarkan perspektif yang lebih bernuansa. Selain itu, platform media alternatif juga memainkan peran penting dalam upaya ini. Berbagai media independen telah muncul dengan tujuan memberikan pandangan yang lebih mendalam dan seimbang tentang Islam. Media ini sering kali berfokus pada liputan yang lebih positif tentang kontribusi Muslim dalam berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, dan HAM. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan dominasi narasi negatif yang sering kali diperkuat oleh media arus utama.

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.**

BAB X

MASA DEPAN HUBUNGAN ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Islam dengan komunitas internasional terus mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan politik global, tantangan ekonomi, dan dinamika budaya. Dalam konteks ini, ada tantangan yang signifikan namun juga peluang besar untuk memperkuat interaksi yang positif antara dunia Islam dan masyarakat global. Pentingnya kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, dan budaya menjadi kunci dalam memperkuat hubungan tersebut. Di tengah perbedaan yang ada, upaya untuk memperkuat dialog antaragama dan mempromosikan toleransi terus menjadi agenda penting. Dengan semakin terbukanya ruang bagi kerjasama global, terdapat harapan yang besar bahwa dialog yang inklusif dan konstruktif dapat memperkuat hubungan internasional serta mendorong terciptanya dunia yang lebih damai dan berkeadilan.



A. Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Hubungan Islam dengan Komunitas Internasional

Hubungan antara Islam dan komunitas internasional menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah stereotip negatif yang sering disebarluaskan oleh media global. Media sering menggambarkan Islam sebagai agama yang terkait dengan ekstremisme dan kekerasan, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi publik global tentang umat Muslim (Ahmed, 2020). Representasi seperti ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap negara-negara mayoritas Muslim dan memperburuk ketegangan diplomatik dengan negara-negara Barat. Dalam konteks ini, negara-negara Muslim perlu bekerja keras untuk menantang dan mengubah persepsi tersebut melalui diplomasi publik dan diplomasi budaya.

Di tengah tantangan ini, terdapat juga peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk memperbaiki citra internasional mereka. Salah satunya adalah melalui dialog antaragama yang semakin berkembang di forum-forum internasional, seperti yang diinisiasi oleh negara-negara Muslim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Said, 2020). Dialog ini tidak hanya membantu memperbaiki citra Islam di mata dunia, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pemahaman yang lebih baik antar agama dan budaya. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan Islam moderat melalui upaya diplomasi ini.

Tantangan besar lainnya muncul dari konflik politik dan militer yang sering terjadi di dunia Muslim, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Konflik-konflik ini sering dijadikan contoh oleh media global untuk menggambarkan ketidakstabilan di negara-negara Muslim, meskipun konteks dan akar penyebab konflik sering kali jauh lebih kompleks. Sebagai akibatnya, upaya diplomatik negara-negara Muslim sering kali terganggu oleh citra negatif yang dihasilkan oleh liputan media. Meskipun demikian, beberapa negara Muslim telah berusaha keras untuk memanfaatkan posisi mereka sebagai kekuatan regional dalam menggalang dukungan di forum internasional.

Isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi fokus perhatian dalam hubungan antara Islam dan komunitas internasional. Banyak negara mayoritas Muslim mendapatkan kritik tajam terkait pelanggaran HAM, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan hak minoritas. Kritik ini sering menjadi hambatan dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim dan negara-negara Barat. Namun, negara-negara seperti Tunisia dan Maroko telah melakukan reformasi signifikan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperbaiki hubungan internasional mereka. Ekonomi juga menjadi bidang yang penuh tantangan, tetapi sekaligus menawarkan banyak peluang bagi negara-negara mayoritas Muslim. Sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas, telah memberikan kekuatan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meskipun ketergantungan pada ekspor sumber daya alam membuat ekonomi negara-negara ini rentan terhadap fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, banyak negara Muslim yang mulai mendiversifikasi ekonomi mereka, berinvestasi dalam teknologi, pendidikan, dan sektor kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam (Sulaiman, 2022).

Dalam konteks keamanan, negara-negara Muslim menghadapi tantangan berat dari ekstremisme dan terorisme global. Negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan terus berjuang melawan kelompok-kelompok ekstremis yang mengklaim melakukan jihad atas nama Islam, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi global tentang Islam sebagai agama yang mendukung kekerasan (Kumar, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama internasional dalam hal intelijen dan penanggulangan terorisme telah menjadi kunci bagi banyak negara Muslim. Penting untuk dicatat, pendekatan keamanan yang semata-mata berfokus pada militer terbukti tidak cukup efektif. Oleh karena itu, banyak ahli menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, termasuk melalui pendidikan dan pembangunan sosial.

Pada saat yang sama, peluang untuk memperkuat hubungan Islam dengan komunitas internasional muncul dari peningkatan partisipasi negara-negara Muslim dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan G20. Melalui partisipasi aktif ini, negara-negara Muslim dapat menyuarakan kepentingan mereka

dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan krisis kemanusiaan. Keberhasilan diplomasi multilateral ini bergantung pada kemampuan negara-negara Muslim untuk menjalin kerjasama yang produktif dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks politik global yang semakin kompleks. Selain itu, diplomasi budaya menjadi instrumen penting dalam memperbaiki citra Islam di kancah internasional. Melalui promosi seni, sastra, dan tradisi Islam, negara-negara Muslim dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kaya akan warisan budaya dan intelektual (Sardar, 2021). Beberapa inisiatif diplomasi budaya yang sukses, seperti festival budaya dan pameran seni Islam, telah membantu mengubah persepsi negatif tentang Islam di negara-negara Barat. Inisiatif ini juga memperkuat hubungan antar negara melalui pengakuan terhadap kontribusi budaya Islam bagi peradaban dunia.

Dalam bidang politik, kerjasama antara negara-negara Muslim dan komunitas internasional dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi telah menunjukkan bahwa perbedaan ideologi tidak selalu menjadi penghalang untuk bekerjasama. Meskipun terdapat tantangan dari segi persepsi dan politik domestik, banyak negara Muslim yang aktif dalam berbagai inisiatif global, menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi mitra yang konstruktif di kancah internasional. Terakhir, dalam konteks dialog antaragama, berbagai inisiatif internasional telah mendorong pemahaman yang lebih baik antara Islam dan agama-agama lain. Dialog ini, yang sering difasilitasi oleh organisasi internasional, telah membantu menciptakan jembatan komunikasi antara komunitas Muslim dan non-Muslim, yang pada akhirnya berkontribusi pada perdamaian global. Upaya ini perlu terus diperkuat agar dapat menciptakan lingkungan global yang lebih inklusif dan toleran.

B. Prospek Kerjasama dalam Konteks Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Budaya

Kerjasama antarnegara dalam konteks politik, ekonomi, keamanan, dan budaya di dunia Islam terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu faktor yang mendorong kerjasama ini adalah kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian regional di tengah dinamika geopolitik yang semakin

kompleks. Misalnya, kerjasama politik antara negara-negara mayoritas Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa/MENA*) menunjukkan bahwa isu-isu seperti konflik Palestina-Israel, krisis Suriah, dan ketegangan dengan Iran menjadi fokus utama dalam mempererat hubungan diplomatik di kawasan ini (Hinnebusch, 2020). Negara-negara seperti Qatar dan Turki memainkan peran penting dalam mediasi konflik, menggarisbawahi pentingnya diplomasi politik dalam menjaga perdamaian regional.

Di bidang ekonomi, prospek kerjasama antarnegara Muslim semakin cerah berkat adanya inisiatif-inisiatif ekonomi regional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Komite Ekonomi dan Komersial Islam (*The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation/COMCEC*). Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai platform untuk mempererat hubungan ekonomi antarnegara Islam, termasuk melalui investasi bersama, perdagangan bebas, dan pengembangan teknologi. Inisiatif seperti pengembangan ekonomi halal yang mencakup industri makanan, kosmetik, dan pariwisata menjadi contoh penting dari bagaimana ekonomi berbasis syariah menawarkan potensi besar untuk kerjasama lebih lanjut (Khan, 2022). Melalui penguatan sektor ekonomi halal, negara-negara Muslim dapat memperluas pasar global mereka, terutama di negara-negara non-Muslim yang memiliki populasi Muslim yang signifikan.

Di bidang keamanan, kerjasama dalam melawan terorisme dan ekstremisme juga menjadi fokus utama. Negara-negara Muslim seperti Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi telah terlibat dalam berbagai inisiatif internasional untuk melawan terorisme, baik di tingkat regional maupun global (Shafiq, 2021). Forum-forum keamanan regional seperti ASEAN dan Liga Arab memfasilitasi diskusi dan kerjasama dalam mengatasi ancaman-ancaman keamanan, terutama yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Melalui pertukaran informasi dan pelatihan militer bersama, negara-negara Muslim semakin meningkatkan kapabilitas mereka dalam menanggulangi ancaman keamanan.

Sementara itu, kerjasama budaya antarnegara Muslim juga terus berkembang, terutama melalui diplomasi budaya dan dialog antarbudaya. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, yang

dikenal sebagai contoh Islam moderat, menggunakan diplomasi budaya untuk mempromosikan Islam Nusantara sebagai bentuk Islam yang toleran dan inklusif. Diplomasi budaya ini membantu memperkuat citra positif Islam di dunia internasional dan mempromosikan dialog yang lebih luas antara peradaban Islam dan Barat. Festival budaya, pertukaran akademik, dan program pertukaran pemuda juga menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antarnegara Muslim di berbagai bidang.

Selain itu, potensi kerjasama di bidang pendidikan dan riset ilmiah antara negara-negara Muslim juga menjadi prospek yang menjanjikan. Misalnya, negara-negara seperti Turki, Iran, dan Mesir memiliki sejarah panjang dalam pendidikan tinggi Islam dan telah menjadi pusat-pusat penting untuk studi Islam. Kerjasama antara universitas-universitas Islam di seluruh dunia Muslim dapat mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan ruang bagi dialog intelektual di antara para sarjana Muslim (Zaman, 2020). Melalui program-program beasiswa dan pertukaran pelajar, negara-negara Muslim juga dapat memperkuat jaringan pendidikan global mereka, yang pada gilirannya akan memperkaya kerjasama di bidang lain.

Pada tingkat regional, inisiatif-inisiatif seperti Kawasan Perdagangan Bebas Timur Tengah dan Afrika Utara (*MENA Free Trade Area*) bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Karim, 2021). Kerjasama ini penting untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Muslim pada ekspor minyak dan gas, serta untuk mendiversifikasi ekonomi. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, telah memulai reformasi ekonomi yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan beralih ke Dalam hal keamanan regional, kerjasama di antara negara-negara di Teluk Persia menjadi penting dalam menjaga stabilitas kawasan yang sering kali rentan terhadap konflik dan ketegangan. Meskipun ada perbedaan politik antara negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Iran, kerjasama dalam hal keamanan laut dan patroli perbatasan telah membantu menjaga kestabilan wilayah tersebut dari ancaman eksternal (Hinnebusch, 2020). Negara-negara ini juga telah berpartisipasi dalam inisiatif internasional seperti Koalisi Anti-

Terorisme yang dipimpin oleh AS, meskipun dengan pendekatan yang bervariasi tergantung pada kepentingan nasional masing-masing.

Di samping itu, kerjasama dalam mengatasi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pengungsi menjadi area penting untuk prospek kerjasama lebih lanjut. Negara-negara mayoritas Muslim, khususnya yang berada di kawasan MENA, telah merasakan dampak dari perubahan iklim yang melibatkan peningkatan suhu ekstrem dan kekurangan air (Ahmed, 2020). Kerjasama dalam hal energi terbarukan dan manajemen sumber daya alam di kawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Negara-negara seperti Maroko dan Uni Emirat Arab telah memimpin dalam pengembangan energi surya, yang tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada minyak tetapi juga menciptakan peluang kerjasama ekonomi yang baru.

Kerjasama dalam mengatasi krisis pengungsi juga menjadi penting, terutama di kawasan yang terkena dampak konflik seperti Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Negara-negara Muslim seperti Turki dan Yordania telah menampung jutaan pengungsi dan berperan aktif dalam forum-forum internasional untuk mencari solusi bagi krisis kemanusiaan ini. Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Komite Palang Merah Internasional, negara-negara Muslim dapat memperkuat solidaritas internasional dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani krisis kemanusiaan.

Di bidang budaya, kerjasama lebih lanjut antara negara-negara Muslim dalam mempromosikan warisan budaya Islam juga merupakan prospek yang menjanjikan. Melalui pameran seni Islam, pertukaran budaya, dan festival budaya internasional, negara-negara Muslim dapat mempromosikan citra positif Islam di dunia internasional. Diplomasi budaya ini membantu melawan stereotip negatif tentang Islam yang sering muncul di media global, serta mendorong dialog yang lebih luas antara dunia Muslim dan Barat. Di bidang ekonomi, pengembangan sektor teknologi dan inovasi juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Negara-negara Muslim seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab telah berinvestasi

besar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Melalui kemitraan teknologi dengan negara-negara lain, negara-negara Muslim dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, kerjasama yang lebih erat dalam konteks politik, ekonomi, keamanan, dan budaya di antara negara-negara Muslim akan membantu memperkuat posisi di kancah global. Tantangan seperti konflik regional, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan ekonomi memang masih ada, tetapi melalui kerjasama yang lebih kuat, negara-negara Muslim dapat mengatasi hambatan ini dan menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi, politik, dan budaya secara lebih maksimal, negara-negara Muslim juga memiliki peluang besar untuk menjadi aktor utama dalam tatanan global yang terus berubah.

C. Harapan untuk Memperkuat Dialog Antaragama, Toleransi, dan Kerjasama Global di Masa Depan

Harapan untuk memperkuat dialog antaragama, toleransi, dan kerjasama global di masa depan sangat relevan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, dialog antaragama dipandang sebagai salah satu jalan efektif untuk mencegah konflik berbasis agama dan mendorong toleransi yang lebih luas. Banyak negara dan organisasi internasional telah memfasilitasi dialog antaragama sebagai bagian dari upaya diplomasi budaya dan perdamaian. Dialog antaragama berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan berbagai komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan.

Sebagai contoh, inisiatif dialog antaragama yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Alliance of Civilizations* merupakan salah satu bentuk kerjasama global yang menargetkan upaya pencegahan ekstremisme berbasis agama. Program ini mempromosikan dialog antarbudaya dan antaragama untuk membangun rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok

agama. Selain itu, program ini juga berfokus pada pendidikan dan kebijakan publik yang mendukung inklusivitas dan pluralisme. Inisiatif seperti ini memberikan harapan bahwa dialog antaragama dapat menjadi pilar penting dalam menjaga perdamaian global di masa depan. Beberapa negara dengan populasi beragam secara agama seperti Indonesia, Malaysia, dan India juga telah mengembangkan berbagai platform dialog antaragama. Di Indonesia, misalnya, melalui organisasi seperti *Majelis Ulama Indonesia* (MUI) dan *Konferensi Waligereja Indonesia* (KWI), dialog antaragama dilakukan secara terstruktur untuk mengatasi isu-isu sosial yang terkait dengan agama (Effendy, 2018). Inisiatif ini telah terbukti berkontribusi pada peningkatan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat stabilitas sosial dalam masyarakat yang plural.

Harapan untuk memperkuat toleransi agama juga didorong oleh perkembangan di bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dapat membantu generasi muda untuk lebih memahami pentingnya kerjasama dan saling menghormati di antara berbagai kelompok agama. Pendidikan lintas budaya yang mengajarkan tentang keanekaragaman agama dan keyakinan dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi yang lebih inklusif terhadap komunitas agama lain (Ali & Bagir, 2020). Di beberapa negara, pendidikan tentang pluralisme agama telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari upaya untuk mencegah radikalisme dan meningkatkan dialog lintas agama.

Tidak hanya dalam pendidikan formal, dialog antaragama juga semakin difasilitasi melalui platform digital. Internet telah membuka ruang baru untuk dialog antaragama yang melibatkan partisipasi masyarakat lintas negara dan budaya. Media sosial, blog, dan forum *online* memberikan akses langsung bagi individu untuk berdiskusi tentang berbagai isu agama dalam lingkungan yang lebih informal. Meskipun ada risiko penyebaran disinformasi, jika dikelola dengan baik, platform ini dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan dialog antaragama yang konstruktif dan toleran (Bunt, 2018).

Selain itu, dialog antaragama juga berpotensi menjadi mekanisme yang efektif dalam mengatasi konflik berbasis agama. Banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia didasari oleh perbedaan agama dan keyakinan. Dialog antaragama dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan, mempromosikan rekonsiliasi, dan membuka jalan bagi penyelesaian damai. Sebagai contoh, dialog antaragama telah memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi di beberapa negara yang dilanda konflik, seperti Irak, Nigeria, dan Myanmar (Ostien, 2020). Dalam konteks ini, para pemimpin agama berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara kelompok yang berkonflik.

Di masa depan, harapan untuk memperkuat kerjasama global dalam konteks dialog antaragama dan toleransi semakin besar dengan adanya dukungan dari berbagai organisasi internasional. Organisasi seperti *The World Council of Churches*, *The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization* (ISESCO), dan *The Pontifical Council for Interreligious Dialogue* telah memimpin berbagai inisiatif global untuk mempromosikan dialog antaragama dan mengatasi isu-isu seperti ekstremisme dan intoleransi (Moyaert, 2019). Partisipasi aktif dari lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat sipil global juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dialog antaragama di masa depan.

Harapan untuk memperkuat dialog antaragama tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks sosial, dialog antaragama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di antara berbagai komunitas agama tentang isu-isu seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan HAM. Dalam konteks politik, dialog antaragama dapat membantu mengurangi polarisasi politik yang sering kali diperparah oleh perbedaan agama. Sementara dalam konteks ekonomi, dialog antaragama dapat mendorong kerjasama ekonomi yang lebih inklusif, yang mengedepankan prinsip keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama (Abu-Nimer, 2018).

Dialog antaragama juga relevan dalam konteks globalisasi, di mana migrasi dan mobilitas antarbangsa semakin meningkat. Dengan meningkatnya interaksi antarbudaya, kebutuhan akan dialog antaragama semakin mendesak. Banyak negara saat ini memiliki

populasi yang beragam secara agama, dan dialog antaragama dapat membantu mengatasi tantangan yang timbul dari multikulturalisme. Harapan untuk memperkuat dialog antaragama dalam konteks ini adalah agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai di tengah perbedaan agama yang ada.

Upaya memperkuat dialog antaragama juga dapat diperluas ke ranah kebijakan publik. Pembuat kebijakan di berbagai negara diharapkan dapat mendukung inisiatif dialog antaragama dengan menyediakan kerangka hukum yang kondusif bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas agama dan memfasilitasi dialog lintas agama sebagai bagian dari kebijakan domestik mereka (Gunn, 2019). Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dialog antaragama didukung oleh kebijakan yang adil dan inklusif.

Tantangan utama dalam memperkuat dialog antaragama di masa depan adalah mengatasi ekstremisme agama dan intoleransi. Ekstremisme agama sering kali menjadi hambatan terbesar bagi upaya membangun toleransi dan kerjasama antaragama. Oleh karena itu, dialog antaragama harus mencakup strategi untuk melawan narasi ekstremis yang sering kali memanipulasi ajaran agama untuk tujuan kekerasan. Para pemimpin agama memiliki peran krusial untuk menyuarakan pesan damai dan menolak ideologi kekerasan yang merusak (Hashmi, 2019). Selain itu, harapan untuk memperkuat dialog antaragama di masa depan juga terletak pada partisipasi aktif kaum muda. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Melalui platform digital, program pendidikan, dan kegiatan lintas budaya, generasi muda dapat terlibat secara langsung dalam upaya memperkuat kerjasama antaragama. Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dialog antaragama terus berlanjut dan berkembang di masa depan.

Sebagai tambahan, harapan untuk memperkuat dialog antaragama juga mencakup kolaborasi antara komunitas agama dengan sektor swasta. Banyak perusahaan global saat ini terlibat dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang mempromosikan dialog lintas agama dan

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, M. (2021). Islamic diplomacy in the modern world: Principles and practice. *International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 45-60.

Abdul-Rahman, A. R., & Nor, S. M. (2017). *Challenges of Islamic Banking in the Global Financial Market*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 34(2), 49-60.

Abu-Lughod, J. L. (2018). *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350*. Oxford University Press.

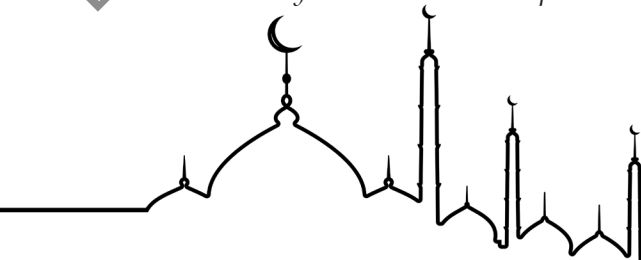
Abu-Nimer, M. (2001). *Peace-building through dialogue among civilizations: The role of faith-based organizations*. The Islamic World and the West: An International Dialogue.

Abu-Nimer, M. (2020). *Nonviolence and Peacebuilding in Islam: Theory and Practice*. Gainesville: University Press of Florida.

Abubakar, D. (2020). Diplomacy and security in the Sahel: Nigeria and Senegal in focus. *African Security Review*, 29(2), 67-80.

Acharya, A. (2021). *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Cornell University Press.

Agoston, G. (2011). *Guns for the Sultan: Military power and the weapons industry in the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.



Ahmad, I. (2021). *Islamic Cosmopolitanism: The Global Integration of Muslims in India and Africa*. Cambridge University Press.

Ahmad, S. (2020). Peace and diplomacy in early Islam. *Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 18(2), 213–227.

Ahmed, A. S. (2020). *Islam and the West: Negotiating the Future*. Oxford University Press.

Akyol, M. (2020). *Islam without extremes: A Muslim case for liberty*. W. W. Norton & Company.

Alatas, S. F. (2015). Aceh and the Ottoman Empire: A historical survey of relations between the Acehnese sultanate and the Turkish Empire. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(2), 245–260.

Al-Dosari, H. (2018). "Women's Rights in Saudi Arabia: A Timeline of Reforms." *Human Rights Watch*.

Al-Hassan, A., Papaioannou, M., & Skancke, M. (2013). *Sovereign Wealth Funds: A Growing Global Force*. IMF Working Papers.

Ali, T. (2016). The Spread of Islam in West Africa: Trade, Politics, and Diplomacy." *Journal of Islamic Studies*, 29(2), 213–236.

Ali, S. S. (2018). *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* Springer.

Al-Mughni, H., & Altorki, S. (2021). *Gender and citizenship in the Middle East: Nationalism, gender, and politics of belonging*. Syracuse University Press.

Al-Rasheed, M. (2016). *A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia*. Cambridge University Press.

Al-Rasheed, M. (2020). *The Gulf States and the Syrian War*. Oxford University Press.

Altun, F. (2021). *Turkish foreign policy under Erdogan: Diplomacy in the age of realpolitik*. Palgrave Macmillan.

Altunisik, M. (2020). Turkish foreign policy in a changing world: The role of diplomacy and soft power. *Turkish Review of International Relations*, 15(4), 111-130.

An-Na'im, A. A. (2016). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

Anwar, D. F. (2022). Indonesia's foreign policy and the role of Islamic diplomacy in ASEAN. *Southeast Asian Affairs*, 18(4), 157–176.

Aras, B. (2013). *Ottoman diplomacy and the Islamic world: From Byzantine relations to the post-World War I order*. Palgrave Macmillan.

Aslan, R. (2017). *Islam in Africa: The Trade Routes and the Spread of Religion*. Princeton University Press, 2017.

Ayoob, M. (2008). *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. University of Michigan Press.

Baderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press.

Barkawi, T. (2019). *Diplomacy and Culture: Representations in Global Politics*. Cambridge University Press.

Bayat, A. (2020). *Islam and the Politics of Development in the Middle East*. Oxford University Press.

Beckwith, C. I. (2015). *Empires of the Silk Road: A history of Central Eurasia from the Bronze Age to the present*. Princeton University Press.

Bennison, A. K. (2016). *The Almoravid and Almohad Empires*. Edinburgh University Press.

Bromley, S. (2020). *American Hegemony and World Oil: The Industry, the State System, and the World Economy*. Penn State University Press.

Brown, C. (2018). *International Relations Theory: New Normative Approaches*. Oxford University Press.

Brown, L. C. (2019). *International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game*. Princeton University Press.

Bunt, G. R. (2018). *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas, and Cyber Islamic Environments*. Pluto Press.

Cagaptay, S. (2017). *The new sultan: Erdogan and the crisis of modern Turkey*. I.B. Tauris.

Cagaptay, S. (2020). *Erdogan's empire: Turkey and the politics of the Middle East*. I.B. Tauris.

Çapan, Z. G. (2020). *Contemporary Turkish foreign policy: Diplomacy, Islam, and nationalism*. Routledge.

Charrad, M. (2020). Women and the Reform of Family Law in Morocco: The Role of Civil Society. *Journal of Middle East Women's Studies*, 16(1), 20-37.

Chaudhuri, K. N. (2015). *Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge University Press.

Cordesman, A. H. (2017). *The Geopolitics of Energy: Middle Eastern and Global Strategic Perspectives*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Cordesman, A. (2020). *The Strategic Balance in the Middle East: A Saudi-Russian Perspective*. CSIS Press.

Dien, M. Y. (2004). *Islam and International Law: Engaging Self-Determination and the Challenges of Modernity*. Cambridge University Press.

Donner, F. M. (1981). *The Early Islamic Conquests*. Princeton University Press.

Doumato, E. A. (2010). *Saudi Arabia and the U.S.: Human Rights, Women, and the Wahhabi Factor*. University of Pennsylvania Press.

Eaton, R. M. (2003). *A social history of the Deccan, 1300–1761: Eight Indian lives*. Cambridge University Press.

Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia: A Theological Perspective*. Institute of Southeast Asian Studies.

Ehteshami, A. (2018). Iranian foreign policy in the age of sanctions: Diplomatic challenges and opportunities. *Middle East Journal*, 22(1), 78-95.

Eid, M., & Karim, K. H. (Eds.). (2011). *Re-imagining the Other: Culture, Media, and Western-Muslim Intersections*. Palgrave Macmillan.

El-Gamal, M. (2020). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

El-Khouri, O. (2019). *The Role of the Islamic Development Bank in the Economic Development of OIC Countries*. Springer.

Esposito, J. L. (2016). *Islam and Politics*. Syracuse University Press.

Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2017). *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. Gallup Press.

Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2018). *Islam and Democracy After the Arab Spring*. Oxford University Press.

Esposito, J. L. (2019). *The Future of Islam*. Oxford University Press.

Fakhry, M. (2019). The concept of *Ummah* in Islamic diplomacy: Past and present. *Global Diplomacy Journal*, 10(3), 110–123.

Faruqui, M. D. (2016). Ottoman Diplomacy in the Indian Ocean and the Role of Islamic Trade Networks. *International Journal of Middle East Studies*, 48(3), 321–339.

Feldman, N. (2015). *The Fall and Rise of the Islamic State*. Princeton University Press.

Fisher, M. H. (2001). *The Politics of the British Annexation of India, 1757–1857*. Oxford University Press.

Fletcher, R. A. (2006). *Moorish Spain*. University of California Press.

Foltz, R. C. (2003). *Environmentalism in the Muslim World*. Nova Publishers.

Foltz, R. (2019). *Religions of the Silk Road: Premodern patterns of globalization* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

Gade, A. (2019). *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*. Columbia University Press.

Gibb, H. A. R. (2006). *The life of Saladin*. Clarendon Press.

Goodarzi, J. (2018). *Syria and Iran: Diplomatic alliance and power politics in the Middle East*. I.B. Tauris.

Grare, F. (2018). *The Belt and Road Initiative and the Muslim World: China's Expanding Influence*. The Carnegie Endowment for International Peace.

Gül, A. (2021). Turkey's diplomatic role in the Syrian refugee crisis: An Islamic perspective. *Refugee Studies Quarterly*, 29(1), 34–58.

Hansen, V. (2020). *The Silk Road: A new history with documents*. Oxford University Press.

Haque, M. E. (2020). Climate change diplomacy in the Muslim world: The case of Bangladesh. *Global Environmental Politics*, 19(2), 157–176.

Hassan, R. (2018). *Inside Muslim Minds: An Intellectual History of Islam and Human Rights*. Oxford University Press.

Hassan, A. (2021). Diplomacy and justice in Islamic international relations. *Middle Eastern Politics*, 22(2), 105–121.

Hefner, R. W. (2013). *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. University of Hawaii Press.

Hefner, R. W. (2020). *Sharia Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.

Hellyer, H. A. (2020). *Muslims of Europe: The Other Europeans*. Edinburgh University Press.

Hinnebusch, R. (2020). *Turkey and the Arab uprisings: Leadership in a time of crisis*. Lynne Rienner Publishers.

Hinnebusch, R. (2020). *The International Politics of the Middle East*. Manchester University Press.

Hourani, A. (1991). *A History of the Arab Peoples*. Faber & Faber.

Horton, M., & Middleton, J. (2000). *The Swahili: The Social Landscape of a Mercantile Society*. Wiley-Blackwell.

Ibrahim, A. (2018). *Indonesia and Global Islam: Contributions to Contemporary Muslim Thought*. I.B. Tauris.

Imber, C. (2002). *The Ottoman Empire, 1300-1650: The structure of power*. Palgrave Macmillan.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.

Ismail, R. (2020). *Islamic Finance in Indonesia: Policy and Regulatory Issues*. Routledge.

Kaldor, M. (2019). *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era*. Polity Press.

Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-shariah and sustainable development*. Islamic Foundation.

Kamali, M. H. (2020). The Treaty of Hudaibiyah: A diplomatic precedent in Islamic history. *Journal of Peace Studies*, 28(2), 59–77.

Kammer, A., Norat, M., Pinon, M., Prasad, A., Towe, C., Zeidane, Z., & Chami, R. (2015). *Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options*. IMF Staff Discussion Notes.

Kamrava, M. (2020). *Qatar: Small State, Big Politics*. Cornell University Press.

Karim, K. H. (2021). *Islam in the Global Media: Shaping the Muslim Image*. Oxford University Press.

Kennedy, H. (2004). *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*. Pearson Education.

Kennedy, H. (2007). *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In*. Da Capo Press.

Khaldun, I. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.

- Khalid, F. (2010). Islam and the Environment: Ethics and Practice. In R. G. Tanner (Ed.), *Religions and the Environment: Sustainability in a Time of Climate Crisis* (pp. 73-92). Cambridge University Press.
- Khan, M. A. (2016). *The Palestine-Israel Conflict: A Never-ending Struggle for Peace*. Palgrave Macmillan.
- Khan, A. (2020). The role of Islam in maritime trade networks: A study on economic and cultural exchanges on the Indian Ocean. *Journal of Islamic History and Civilization*, 7(2), 123–139.
- Khashan, H. (2020). Saudi Arabia's diplomatic strategy in the Middle East. *Middle East Policy*, 27(1), 23-37.
- Kundnani, A. (2014). *The Muslims are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror*. Verso Books.
- Lapidus, I. M. (2002). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Levtzion, N., & Hopkins, J. F. P. (2000). *Corpus of early Arabic sources for West African history*. Marcus Wiener Press.
- Lewis, B. (2002). *The Arabs in History*. Oxford University Press.
- Liu, X. (2019). *The Silk Road in world history*. Oxford University Press.
- Loimeier, R. (2017). Muslim Societies in Africa: A Historical Anthropology of the Spread of Islam. *African Affairs*, 114(457), 593–615.
- Lynch, M. (2020). *The New Dynamics of Middle Eastern Geopolitics: Saudi-Russian Relations*. Oxford University Press.
- Mandaville, P. (2019). *Islam and politics*. Routledge.
- Moussalli, A. (2018). Trust and honesty in Islamic diplomatic relations. *Middle Eastern International Affairs*, 20(3), 213–230.
- Muntarbhorn, V. (2021). *Challenges to Human Rights in Southeast Asia: The Role of ASEAN and AICHR*. Springer.
- Nashir, H. (2020). *Islam and the State in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Nasr, S. H. (2016). *Islamic science and the making of the European Renaissance*. MIT Press.

Nasr, S. H. (2016). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Kazi Publications.

Nasr, S. V. R. (2018). *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. Oxford University Press.

Omran, E.-S. E., & Negm, A. M. (Eds.). (2020). *Climate change impacts on the Middle East and North Africa region*. Springer.

Pearson, Michael. (2016). *The Indian Ocean: Trade and Cultural Exchange from the Classical World to the Modern Age*. Routledge.

Pereira, C. (2019). Artistic exchanges along the Silk Road: Muslim contributions to global art and culture. *Arts and Humanities Journal*, 5(1), 67–85.

Peters, R. (2014). *Islam and Human Rights: The Continuing Debate in Muslim Societies*. Oxford University Press.

Peterson, J. E. (2021). *The GCC and the International Relations of the Gulf: Diplomacy, Security and Economy Coordination in a Changing Middle East*. I.B. Tauris.

Pew Research. (2020). *Muslim Diaspora and Global Migration Trends*. Pew Research Center.

Poole, E. (2002). *Reporting Islam: Media Representations of British Muslims*. I.B. Tauris.

Rabasa, A. (2009). *Radical Islam in Southeast Asia: A Threat to Stability?* RAND Corporation.

Reid, A. (2010). *Islam, trade and empire in Southeast Asia: Fourteenth to eighteenth centuries*. Yale University Press.

Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Halal Food Production*. CRC Press.

Roberts, D. B. (2020). *Qatar: Securing the global ambitions of a city-state*. Oxford University Press.

Rosen, L. (2016). *The Justice of Islam: Comparative Perspectives on Islamic Law and Society*. Oxford University Press.

Roy, O. (2020). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.

Sachedina, A. (2018). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.

Sadykov, M. (2020). *The Saudi-Russian Strategic Partnership: Implications for the Middle East and Beyond*. Routledge.

Safiullah, M. (2021). *Islamic Tourism: The Muslim Market for Travel and Culture*. Edward Elgar Publishing.

Said, E. W. (2014). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. Vintage.

Saleem, S. (2020). *Islamophobia and Securitization: Media Framing and Public Opinion in Europe*. Palgrave Macmillan.

Saliba, G. (2007). *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press.

Saeed, A. (2020). Islam and international relations in the 21st century: The role of moral diplomacy. *Global Politics Review*, 8(2), 78–92.

Sardar, Z. (2016). *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader*. Pluto Press.

Shatzmiller, M. (2017). *Waqf and the Public Good: An Islamic Institution in Development*. Oxford University Press.

Slaughter, A. M. (2018). *The New World Order*. Princeton University Press.

Sen, T. (2020). *Buddhism, diplomacy, and trade: The realignment of Sino-Indian relations, 600-1400*. University of Hawai'i Press.

Stern, N. (2019). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Sulaiman, I. (2017). *Islam in International Relations: Politics and Paradigms*. Routledge.

Suryadinata, L. (2017). *Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring to an Inward-Looking State*. Singapore University Press.

Thapar, R. (1990). *A History of India: Volume One*. Penguin Books.

Thornton, J. K. (2019). Islam and Trade in the Indian Ocean Region: The Role of East African Swahili Traders. *The Journal of African History*, 57(4), 517–538.

UNHCR. (2020). *Rohingya Refugee Emergency: Response in the Time of COVID-19*. UNHCR Report.

Vernet, T. (2018). Islamic Empires and African Kingdoms: The Spread of Islam through Trade in Africa. *Islamic World Journal*, 35(3), 139–161.

Wade, G. (2009). *The Zheng He Voyages: A Reassessment*. Asia Research Institute.

Warde, I. (2016). *Islamic Finance in the Global Economy: Challenges and Prospects*. Cambridge University Press.

Weatherbee, D. E. (2013). *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Weatherbee, D. E. (2014). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Rowman & Littlefield.

Wilson, R. (2018). *Islamic Finance in Europe: Policy and Practice*. Palgrave Macmillan.

Yusuf, M. (2019). *Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.

Zaman, M. Q. (2018). *Islam in Pakistan: A History*. Princeton University Press.

Zaman, M. Q. (2018). *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*. Cambridge University Press.

Zartman, I. W. (2016). *Islam and the management of statecraft*. Palgrave Macmillan.

Zayani, M. (2018). *Digital Middle East: State and Society in an Age of Communications Technology*. Oxford University Press.

Zubaida, S. (2011). *Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas and Movements in the Middle East*. I.B. Tauris.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

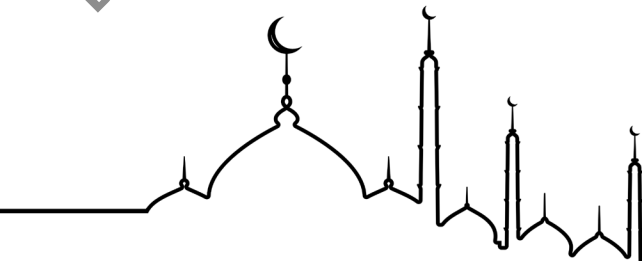
TENTANG PENULIS



Rizki Damayanti menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan S2 dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dari University of Florence (Italia) dan meraih gelar *Master of Arts* (M.A) melalui program beasiswa penuh dari Kementerian Luar Negeri Italia. Ketika menempuh pendidikan S2, penulis juga melakukan magang di Kedutaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) Roma, Italia. Pada tahun 2023 penulis menyelesaikan pendidikan S3 dan meraih gelar Doktor dalam bidang *Islamic Studies* (Konsentrasi: Islam dan Hubungan Internasional) dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain pendidikan formal, penulis juga menempuh berbagai pendidikan non-formal antara lain: *Italian Language and Literature* (Istituto Parola, Florence, 2003-2005) dan *French Language and Literature* (Institut de Langue Francaise, Paris, 2004).



Penulis juga pernah menjadi peserta internasional terpilih untuk mengikuti *International Summer Academy in Comparative Regional Integration* di Center for European Integration Studies, University of Bonn (Jerman) pada tahun 2007 melalui beasiswa penuh dari *German Federal Foreign Office and German Academic Exchange Service* (DAAD). Pada tahun 2012, penulis juga terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia untuk mengikuti Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) melalui pendanaan dari *Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT).

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, sejak tahun 2005 hingga sekarang dan aktif melakukan penelitian serta menulis berbagai artikel di jurnal nasional maupun internasional. Pada tahun 2010-2014, penulis merupakan Kepala Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, sekaligus juga berkontribusi sebagai *Program Coordinator* untuk Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP). Sebelumnya, di tahun 2008, penulis berkesempatan menjadi *Program Coordinator* dalam program *Paramadina Study Visit Abroad to China* (Beijing dan Shanghai) dengan mengunjungi berbagai universitas, institusi pemerintahan dan lembaga penelitian diantaranya University of Beijing (Peking University), Renmin University of China, KBRI Beijing, dan lembaga *think tank China Institutes of Contemporary International Relations* (CICIR). Penulis juga pernah terpilih menjadi salah satu *writing fellow* dalam program *Dissertation Scholarship* untuk periode November 2022-Januari 2023, dari *Center for Muslim Politics and World Society* (COMPOSE), *Faculty of Social Sciences* (FOSS), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Pada bulan November 2023, penulis mengikuti *International Short Course "the Scientific-Educational Course of Hawwa"* di Mashhad dan Qom (Iran) melalui pendanaan dari *the Goharshad International Foundation*. Terakhir, penulis terpilih mengikuti *International Conference on Social Sciences* (ICSS) di Istanbul, Turkiye, pada bulan Agustus 2024.

Khusus terkait kajian Islam dan Hubungan Internasional, penulis merupakan pengajar mata kuliah Islam, Diplomasi, dan Politik Internasional di Program Magister Hubungan Internasional,

Universitas Paramadina, Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan S3 dalam bidang Islam dan Hubungan Internasional, penulis memiliki kompetensi keilmuan yang kuat untuk membahas peran Islam dalam tatanan global. Selain itu, penulis juga telah terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam konteks Islam dan hubungan internasional, seperti diplomasi negara-negara Muslim, peran Islam dalam organisasi internasional, serta dinamika politik dan keamanan di dunia Islam.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

"Islam dan Hubungan Internasional" menghadirkan analisis komprehensif mengenai peran Islam dalam diplomasi, ekonomi, dan perdamaian dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam menjembatani Islam dan dunia global. Buku ini memberikan wawasan akademik yang kaya dan reflektif terhadap tantangan serta peluang yang dihadapi negara-negara Muslim dalam percaturan global.

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Rektor Universitas Paramadina

Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman tentang Islam dan hubungan internasional semakin relevan. Buku ini menjelajahi keterlibatan Islam dalam diplomasi modern, resolusi konflik, serta dialog antarperadaban. Dengan pendekatan akademik yang komprehensif, karya ini menjadi referensi penting bagi akademisi, diplomat, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih jauh kontribusi Islam dalam tatanan global.

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Buku ini tidak hanya mengkaji peran Islam dalam sejarah dan teori hubungan internasional, tetapi juga bagaimana Islam berkontribusi terhadap kebijakan global. Di tengah tantangan geopolitik dan krisis global, pemahaman tentang Islam dan hubungan internasional menjadi semakin penting. Karya ini diharapkan menginspirasi kajian lebih lanjut serta mendorong dialog konstruktif antara dunia Islam dan komunitas internasional.

Prof. Jamhari Makruf, M.A., Ph.D.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia



PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)

Email : redaksi@wawasanilmu.co.id
WA : 009 535 969 2310
FB : Penerbit Wawasan Ilmu
IG : @penerbitwawasanilmu
@katalogwawasanilmu
Web : www.wawasanilmu.co.id

